LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP)
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
2015

KATA PENGANTAR

Assalamu' alaikum Wr.Wb

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Rembang Tahun 2014.LKjIPKabupaten Rembang disusun dalam rangka implementasiPeraturan PresidenRepublik Indonesia Nomor29 Tahun2004tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PeraturanMenteri Negara PendayagunaanAparatur Negara danReformasiBirokrasiNomor53 Tahun 2014TentangPetunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP ini mengacu pada dokumenRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2010-2015, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rembang Tahun 2014, dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2014.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Rembang untuk menginformasikan kinerja Pemerintah Daerah dalam menjalankan pemerintahan maupun melaksanakan pembangunan selama Tahun 2014. Laporan ini sekaligus sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Rembang dalam menciptakan transparansi informasi guna terciptanya tata pemerintahan yang baiksebagai upaya mewujudkan visi **"TerwujudnyaRembang yang Maju, Mandiri, Dinamisdan Sejahtera".**Keberhasilan pencapaian kinerja ini tidak terlepas dari kerjasama semua pihak yaitu masyarakat, swasta dan aparat pemerintah mulai dari perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasinya dalam proses pembangunan selama Tahun 2014 serta dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Rembang Tahun 2014.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Rembang, Maret 2015

Plt. BUPATI REMBANG
WAKIL BUPATI

H. ABDUL HAFIDZ

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar ..... *I*
Daftar Isi ..... *ii*
IkhtisarEksekutif..... *iii*

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang..... 1
B. Dasar Hukum Penyusunan LKjIP..... 3
C. Bidang Kewenangan 4
D. Gambaran Umum Daerah 5
E. Kelembagaan Perangkat Daerah 15
F. Aparatur Pemerintah Daerah 16
G. Permasalahan / Isu Pembangunan Daerah 17

BAB II PERENCANAAN KINERJA 20

A. Visi dan Misi 20
B. Tujuan 21
C. Sasaran 22
D. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah..... 25
E. Prioritas Daerah 29
F. Perjanjian Kinerja Tahun 2014 31

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ……..……..…..... 39

A. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang..... 41
B. Evaluasi Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis..... 52
C. Akuntabilitas Keuangan..... 127

BAB IV PENUTUP 137
A. Kesimpulan ……. 137
B. Rekomendasi……..... 138

LAMPIRAN
1. Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2014
2. Pernyataan Reviu oleh Inspektorat Kabupaten Rembang

IKHTISAR EKSEKUTIF

Rencana Pembangunan Jangka Menegah (RPJM) Kabupaten Rembang Tahun 2010 – 2015 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010. Penyusunan RPJM memerlukan landasan pembangunan yang memiliki cakupan luas sehingga dapat ditetapkan sebagai dasar bagi daerah untuk menentukan visi, misi dan arah pembangunan di Kabupaten Rembang untuk jangka waktu 1 hingga 5 tahun.Penetapan RPJM merupakan acuan dalam penyusunan rencana tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Adapun Visi Pemerintah Kabupaten Rembang adalah :

"Terwujudnya Rembang yang Maju, Mandiri, Dinamis dan Sejahtera"

Dalam rangka mencapai visi seperti tersebut diatas, dirumuskan sejumlah misi sebagai berikut :

1. Memacu pertumbuhan investasi dalam rangka menghidupkan dan meningkatkan perkembangan sektor riil dan peningkatan kesempatan kerja.
2. Meningkatkan akses UMKM terhadap sumber permodalan dan menciptakan iklim usaha yang kondusif.
3. Meningkatkan produktivitas pertanian dalam arti luas.
4. Meningkatkan pendapatan asli daerah terutama dari sumber-sumber pendapatan non konvensional dan tidak membebani masyarakat.
5. Meningkatkan mutu, akses dan relevansi pendidikan sejak dari jenjang PAUD sampai dengan jenjang menengah dan pendidikan tinggi yang menjadi kewenangan kabupaten.
6. Meningkatkan mutu dan akses pelayanan kesehatan, baik pada tingkatan pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.

7. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan aparatur yang profesional, berbudi pekerti luhur dan agamis.
8. Meningkatan mutu dan pemerataan pelayanan infrastruktur untuk meningkatkan kualitas pelayanan, mendukung pertumbuhan ekonomi dan terwujudnya Rembang Sea-Front City.
9. Mengimplementasikan pembangunan yang selalu mengikuti perkembangan dan perubahan situasi serta kondisi lokal, nasional dan global.

Sesuai dengan penetapan kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2014 yang telah ditetapkan, capaian kinerja sasaran yang terdiri - dari46 (empat puluh enam) sasaranadalah sebagaiberikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN KINERJA
1	2	3
1	Penyederhanaan prosedur pelayanan dan perijinan investasi.	100
2	Promosi peluang investasi.	162
3	Terjaminnya keamanan berusaha.	146
4	Tersedianya infrastruktur yang memadai.	143,18
5	Tersedianya dukungan SDM yang memadai.	115,28
6	Penyebaran sarana pelayanan bank dan lembaga keuangan non bank ke pelosok daerah.	156
7	Ketersediaan skim kredit sesuai dengan perilaku jenis usaha.	93,75
8	Adanya kemampuan UMKM untuk menyusun rencana bisnis yang baik.	98
9	Dimilikinya legalitas asset pelaku usaha sebagai jaminan kredit.	59,09
10	Jaminan keamanan oleh Pemda.	148,2
11	Mudahnya akses petani terhadap sarana produksi pertanian dan alat mesin pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan.	119,5
12	Meningkatnya kemampuan petani dalam pengelolaan usaha.	104,05

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN KINERJA
1	2	3
13	Tersedianya akses permodalan untuk pengembangan usaha	102,7
14	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar pertanian.	166,45
15	Meningkatnya intensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah.	118,24
16	Meningkatnya efisiensi dalam penarikan pendapatan asli daerah.	218,23
17	Terwujudnya sumber PAD baru yang tidak membebani masyarakat	167,87
18	Meningkatnya kualitas proses pembelajaran pada semua jenjang pendidikan.	114,04
19	Tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi dan bersertifikat profesi.	100,13
20	Terwujudnya penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai pada semua jenjang pendidikan.	107,88
21	Terwujudnya Angka Partisipasi Murni (APM) yang tinggi pada semua jenjang pendidikan.	89,63
22	Tersedianya beasiswa bagi penduduk miskin.	99,9
23	Meningkatnya kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan.	73,96
24	Tersedianya tenaga medis yang memadai.	28,7
25	Tersedianya obat-obatan yang memadai.	95,85
26	Tersedianya peralatan medis yang memadai.	62,28
27	Meningkatnya pengelolaan penyelenggara pelayanan kesehatan.	89,95
28	Meningkatnya pemerataan pelayanan kesehatan.	122,77
29	Tersedianya jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin	105,29
30	Meningkatnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan masyarakat.	100
31	Meningkatnya sarana peribadatan dan pendidikan agama.	96,45
32	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan dan latihan (Diklat) pegawai.	132,5

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN KINERJA
1	2	3
33	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelatihan kerja/ketrampilan bagi masyarakat.	100
34	Meningkatnya kualitas prasarana jalan dan jembatan.	103,34
35	Meningkatnya kualitas saluran irigasi.	83,7
36	Meningkatnya kualitas saluran drainase.	54
37	Terbangunnya sarana dan prasarana yang mendukung terwujudnya *sea front city.*	93,5
38	Terwujudnya pemberdayaan masyarakat wilayah pesisir.	100
39	Terbangunnya kawasan pengembangan budidaya perikanan kelautan.	101,78
40	Terwujudnya kawasan wisata bahari	138,44
41	Terselenggaranya pemerintahan daerah yang mempertimbangkan prinsip-prinsip demokrasi serta *good and clean governance*.	89
42	Tersedianya sistem dan kelembagaan layanan publik yang efektif dan efisien.	88
43	Tersedianya sistem informasi pembangunan yang memadai dan peka terhadap perubahan.	97,5
44	Responsif terhadap perkembangan situasi.	92,29
45	Responsif terhadap perubahan dinamika kebijakan nasional.	100
46	Proaktif dalam mengantisipasi perkembangan / perubahan lingkungan strategis	117,04
	Rata-rata	108,62

ProsentasecapaiankinerjaPemerintahKabupatenRembangTahun 2014 secarakeseluruhan108,62 (kategorisangatbaik). Dari 46 (empat puluh enam) sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD capaian kinerja sasaran dengan kategori sangat baik ada 37 (tiga puluh tujuh) sasaran, kategori baik 3 (tiga) sasaran, kategori cukup 5 (lima) sasaran dan kategori kurang 1(satu) sasaran.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep *goodgovernance* atau tata pemerintahan yang baik memberikan rekomendasi pada sistem pemerintahan yang demokratis, pemerintahan yang menekankan pada kesetaraan antara lembaga lembaga negara baik di tingkat pusat maupun daerah, sektor swasta dan masyarakat. Dalam kerangka tata pemerintahan yang baik (*goodgovernance*) diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Institusi *goodgovernance* meliputi 3 domain yaitu state (negara/pemerintahan), *private sector* (sektor swasta atau dunia usaha) dan *society* (masyarakat), yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing. Institusi pemerintahan berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan, sedangkan *society* berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi dan politik. Agar *goodgovernance* berjalan dengan baik dibutuhkan komitmen dari ketiga domain tersebut berpartisipasi secara aktif dalam kerangka pencapaian tujuan bersama. Dilihat dari ketiga domain dalam rangka perwujudan *goodgovernance*, maka domain state menjadi domain yang paling memegang peranan penting karena fungsi pengaturan dan fasilitasi domain sektor swasta, dunia usaha dan masyarakat serta fungsi administratif penyelenggaraan pemerintahan melekat pada domain ini.

Prinsip akuntabilitas dalam wacana *goodgovernance* disebut sebagai setiap kegiatan yang berorientasi pada sasaran, dimana sasaran yang ditetapkan dan hendak dicapai tingkat ketepatannya diuji melalui mekanisme komunikasi. Akuntabilitas layanan publik ditujukan sebagai perwujudan kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya

untuk dapat menjawab hal yang menyangkut pertanggungjawaban fiskal,manajerial dan program. Dalam pengertian yang lebih luas akuntabilitas pelayanan publik berarti pertanggungjawaban pegawai pemerintah kepada publik yang menjadi konsumen pelayanannya.

A*kuntabilitas* akan mendorong setiap aparat pemerintahan daerah untuk melaksanakan setiap tugasnya dengan cara yang terbaik bagi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan didaerahnya. Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik atau masyarakat adalah suatu ukuran yang menunjuk pada seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma eksternal yang ada di masyarakat atau yang dimiliki *stake holder.*

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Peraturan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa setiap Instansi Pemeritah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

LKjIP merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan pada setiap instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analis terhadap pengukuran kinerjayang telah ditetapkan selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Tujuan penyusunan pelaporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi Pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Berdasarkan acuan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2010-2015 penyusunan LKjIP Pemerintah Kabupaten Rembang didasarkan pada indikator kinerja yang ada yang ditetapkan lewat tujuan dan sasaran yang direncanakan. Realisasi dan dilaporkan dalam LKjIP ini adalah realisasi dari pelaksanaan program dan

kegiatan tahun 2014 berdasarkan perjanjian kinerja yang telah disusun pada Tahun 2014.

B. Dasar Hukum Penyusunan LKjIP

Pelaksanaan penyusunan LKjIP Kabupaten Rembang Tahun 2014 didasarkan pada beberapa landasan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Peraturan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005 – 2025;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010 – 2015;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014.

C. Bidang Kewenangan

Sesuai dengan ketentuan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12, Pemerintah Kabupaten Rembang melaksanakan Urusan Pemerintahan baik Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan pilihan.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

1. pendidikan;
2. kesehatan;
3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindunganmasyarakat; dan
6. sosial.

Sedangkan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

1. tenaga kerja;
2. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
3. pangan;
4. pertanahan;
5. lingkungan hidup;
6. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
8. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. perhubungan;
10. komunikasi dan informatika;
11. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
12. penanaman modal;

13. kepemudaan dan olah raga;
14. statistik;
15. persandian;
16. kebudayaan;
17. perpustakaan; dan
18. kearsipan.

Adapun urusan pemerintahan pilihan yang ada di Kabupaten Rembang meliputi:

1. kelautan dan perikanan;
2. pariwisata;
3. pertanian;
4. kehutanan;
5. energi dan sumber daya mineral;
6. perdagangan;
7. perindustrian; dan
8. transmigrasi.

D. Gambaran Umum Daerah

1. Kondisi Geografis Daerah

Kabupaten Rembang terletak di ujung timur laut Propinsi Jawa Tengah, pada garis koordinat 111º00' - 111º30' Bujur Timur dan 6º30'-7º6' Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut :

a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Laut Jawa
b. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Tuban (Jawa
D. Timur)
c. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Blora
d. Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Pati

Secara umum kondisi tanahnya berdataran rendah dengan ketinggian maksimum ± 70 meter di atas permukaan air laut. Sebagian besar wilayahnya (46,39%) berada pada ketinggian 25-100 meter dari permukaan air laut. Sekitar 30,42 % berada pada ketinggian 100-500 meter dan sisanya berada pada ketinggian 0-25 m dan 500-1000 m.

Dengan luas 101.408 hektar,wilayah administratifnya terbagi dalam 14 kecamatan, 287 desa dan 7 kelurahan. Nama dan luas wilayah untuk masing-masing Kecamatan di Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

Tabel I.1

Luas Wilayah Kecamatan Di Kabupaten Rembang

No	Nama Kecamatan	Luas Wilayah (ha)
1	Sumber	7.673
2	Bulu	10.240
3	Gunem	8.020
4	Sale	10.712
5	Sarang	8.794
6	Sedan	7.964
7	Pamotan	8.156
8	Sulang	8.525
9	Kaliori	6.150
10	Rembang	5.881
11	Pancur	4.864
12	Kragan	6.166
13	Sluke	3.759
14	Lasem	4.504
Jumlah		101.408

2. Topografi

Kondisi topografi di Kabupaten Rembang berelief datar, pegunungandan berbukit-bukit.Luas lahan yang relatif datar mencapai 82.713 hektar, sedangkan lahan curam sampai dengan sangat curam seluas 18.694 hektar.Kelerengan yang terdapat di Kabupaten Rembang terdiri dari kelerengan 0-2 % seluas 45.205 Ha (46,58%), kelerengan 2-15% seluas 33.233 Ha (43,18%), kelerengan 15-40 % seluas 13.980 Ha (14,38 %), dan sisanya 4,86% merupakan kelerengan daerah dengan kelerengan > 40%.

3. Jenis Tanah

Secara umum dapat dikatakan bahwa wilayah Kabupaten Rembang merupakan daerah pertanian yang cukup berpotensi, kecuali di daerah pegunungan di sebelah timur yang termasuk pegunungan tandus. Berbagai jenis tanah yang ada di Kabupaten Rembang diantaranya adalah tanah *aluvial* meliputi sekitar 10%, tanah regosol meliputi area seluas 5%, tanah *andosol* meliputi area seluas 8%, tanah *grumosol* sebesar 32%, dan tanah *mediteran* merah kuning seluas 45 % dari seluruh wilayah kabupaten.

4. Klimatologi

Wilayah Kabupaten Rembang memiliki jenis iklim tropis dengan suhu maksimum 33 º C dan suhu rata-rata 23 º C. Dengan bulan basah 4 sampai 5 bulan, sedangkan selebihnya termasuk kategori bulan sedang sampai kering. Terdapat hujan selama 1 tahun yang tidak menentu, sehingga implikasinya sering terjadi kekeringan di wilayah Kabupaten Rembang.Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan upaya-upaya untuk melakukan konservasi sumber daya air dan pengembangan embung-embung kecil untuk menahan air hujan.Upaya tersebut diharapkan dapat menjaga kesinambungan sumber daya air terutama pada musim kemarau baik untuk kebutuhan pengairan sawah maupun untuk kebutuhan lainnya.

5. Hidrologi

Kabupaten Rembang memiliki curah hujan yang rendah dan memiliki sumber air berupa air permukaan dan air tanah. Sumber air permukaan berupa sungai, bendungan dan air laut. Sungai yang melewati wilayah Kabupaten Rembang antara lain Sungai Randugunting, Babagan, Karanggeneng, Kening, Telas, Kalipang, Sudo dan Sungai Patiyan. Di Kabupaten Rembang terdapat 121 bendungan dan 25 daerah irigasi, tetapi tidak sepanjang tahun dialiri air.

6. Kondisi Geologi

Kabupaten Rembang yang berbatasan dengan laut Jawa bagian utara dan pegunungan bagian timur, memiliki beberapa macam kondisi geologi. Dari beberapa macam kondisi geologi tersebut, wilayah Kabupaten Rembang mempunyai kandungan mineral yang kaya akan unsur-unsur yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman. Kandungan yang terbesar adalah jenis *Alluvium* yang meliputi luas 45.470.783 ha atau 44,84 % dari luas wilayah Kabupaten Rembang, kemudian potensi lain adalah *miosen fasies*sedimen yaitu seluas 32.125.000 ha atau 31,68%.

Sedangkan bahan galian golongan C yang ada berupa: *andesit* (di Kecamatan Sedan, Pancur, Kragan, Sluke, dan Lasem), pasir kuarsa (di Kecamatan Bulu, Gunem, Sale, Sarang, Sedan, dan Sluke), kapur (di Kecamatan Sumber, Bulu,

Gunem, Sale, Sarang, dan Sedan), trass (di Kecamatan Pancur, Kragan, dan Sluke), *phospat* (di Kecamatan Gunem, Sale, dan Pamotan), *ball clay* (di Kecamatan Bulu, Gunem, Sarang, dan Sedan), batu bara (di Kecamatan Gunem dan Sale), serta gipsum (di Kecamatan Gunem, Sarang, Sedan, dan Lasem).

7. Gambaran Umum Demografis

Jumlah penduduk Kabupaten Rembang sampai dengan akhir tahun 2014 mencapai 612.552 jiwa yang terdiri dari 310.476 orang laki-laki dan 302.076orang perempuan.Perkembangan jumlah penduduk selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel I.2

Perkembangan Jumlah Penduduk Di Kabupaten Rembang

Jenis data	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah Penduduk	642.776	666.225	688.308	617.067	612.552
- Laki-laki	336.134	336.004	346.873	322.902	310.476
- Perempuan	306.642	330.221	341.435	304.165	302.076

8.Kondisi Ekonomi

a. Potensi Unggulan Daerah

1) Perikanan dan Kelautan

Kabupaten Rembang memiliki potensi perikanan dan kelautan yang sangat besar. Hal ini ditandai dengan wilayah pantai Kabupaten Rembang sepanjang ± 62,5 Km yang banyak terkandung berbagai potensi hasil laut yang melimpah seperti ikan layang, tambang, kembung, selar, tongkol, cumi-cumi, kurisi, teri, manyung, layur, kakap dan rajungan. Potensi tersebut dapat dimanfaatkan oleh keberadaan sebagian penduduk yang bertempat tinggal di sepanjang pantai sebagi nelayan. Di Kabupaten Rembang terdapat 6 Kecamatan yang terletak pada wilayah pantai yaitu : Kecamatan Kaliori, Kecamatan Lasem, Kecamatan Rembang, Kecamatan Sluke, Kecamatan Kragan dan Kecamatan Sarang.

Dengan berbagai upaya secara maksimal, telah dapat dilakukan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan dan potensi laut dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya penangkapan ikan menunjukkan kemajuan yang cukup menggembirakan.Hal ini ditunjukkan

dari jumlah produksi hasil tangkapan ikan yang terus meningkat pada setiap tahunnya.Peningkatan ini dimungkinkan karena disamping bertambahnya sarana dan prasarana penangkapan ikan juga dipengaruhi oleh penerapan metode penangkapan ikan yang dilaksanakan.

Disamping perikanan laut, Kabupaten Rembang juga memiliki potensi perikanan darat yang cukup besardiantaranya :

a) Lahan pertambakan dengan luas potensi2.625 ha dan luas produksi2.396 ha dengan komoditas udang dan bandeng.
b) Kolam ikan air tawar, yang tersebar di Kecamatan Pamotan, sale, Rembang, Bulu dan Sulang dengan luas potensi 35,64 Ha. Potensi ini belum dimanfaatkan secara optimal, hal ini ditandai dengan luas produksi yang masih dibawah kapasitasnya yaitu sebesar 32,4 Ha. Komoditas perikanan air tawar antara lain lele, nila dan tawes.
c) Terumbu karang, yang tersebar dalam 19 gugusan terumbu karang dengan total luas 227,7 km²
d) Komunitas mangrove seluas 221,54 Ha

Kegiatan budidaya perikanan di Kabupaten Rembang dilaksanakan melalui kegiatan budidaya ikan kolam dan budidaya ikan tambak serta budidaya rumput laut sebagai upaya dari rasionalisasi penangkapan ikan yang sudah mulai kecenderungan menurun untuk di daerah pantai.Disamping itu, di Kabupaten Rembang mempunyai potensi budidaya air payau, seperti komoditas udang, bandeng, kepiting dan lain-lain.

2) Pertanian

Komoditas tanaman pangan dan holtikultura di Kabupaten Rembang umumnya berupa tanaman padi, sayur -sayuran, buah mangga, buah siwalan, buah duku woro, buah kawis.Sedangkan untuk peternakan berupa sapi potong, kambing dan domba, itik petelur, ayam kampung.

3) Pertambangan

Sebagian wilayah Kabupaten Rembang terdiri dari gunung kapur yang di dalamnya banyak mengandung berbagai galian tambang. Dari berbagai potensi galian tambang tersebut, sampai saat ini belum dapat diupayakan penambangannya secara maksimal, oleh karena itu dalam jangka kedepan apabila galian tambang dapat dimanfaatkan secara optimal, tentunya akan memberikan kontribusi khususnya terhadap peningkatan pendapatan perkapita masyarakat. Potensi galian tambang potensial yang terkandung di

wilayah Kabupaten Rembang, antara lain: Pasir Kwarsa (Si O2), Phospat (P2 O5), Ball Clay (Al2 O3), Batu Gamping (Ca CO3), Batubara, Trass, Andesit, Tanah Liat / Lempung, Gypsum, Kalsit, Dolomit dan Lignit.

4) Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat

Kabupaten Rembang memiliki berbagai jenis potensi industri kecil dan kerajinan yang sangat unik dan menarik untuk dapat dikembangkan sehingga dapat dijadikan obyek yang dapat menarik investor untuk dapat masuk di Kabupaten Rembang. Banyak potensi industri yang berbasis pada sumber daya alam yang dapat dikembangkan sehingga dapat dijadikan keunggulan komperatif yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Industri tersebut antara lain : garam rakyat, pengolahan ikan, mebel antik, batik, bordir, kuningan, kerajinan kerang, terasi, genteng, pembuatan tas, dompet, sabuk dan lain-lain.

5) Pariwisata dan seni budaya

Beberapa lokasi wisata yang terdapat di Kabupaten Rembang, letaknya tersebar di berbagai lokasi, antara lain :

a) Wisata Peninggalan Pra Sejarah : Situs Plawangan, Megalitikum Terjan
b) Wisata Kartini : Museum Kartini, Makam Kartini
c) Wisata Pantai & Pulau : Pantai Kartini, Pantai Binagun, Pantai Pasir Putih, Pantai Soka Pulau Gede dan Pulau Marongan
d) Wisata Agama : Masjid Agung Rembang, Makam Sunan Bonang Petilasan Sunan Bonang Klentheng Tjoe Hwei Kiong, Klentheng Dasun Vihara Ratanavana Arama
e) Wisata Hutan &Gua :Gua Pasucen Embung "Banyu Kuwung", Hutan Wisata Sumber Semen Hutan Wisata Mantingan.

Masyarakat di Kabupaten Rembang memiliki beraneka ragam budaya daerah, mulai dari budaya daerah yang bernuansa keagamaan hingga budaya daerah yang bernuansa adat-istiadat, Budaya masyarakat banyak dipengaruhi nuansa keagamaan/kepercayaan dan adat-istiadat setempat. Event-event budaya di Kabupaten Rembang, antara lain:

a) Acara Syawalan / Lomban

Acara ini diselenggarakan setiap tanggal 5,6,7 dan 8 Syawal bertempat dilokasi obyek wisata Taman Rekreasi Pantai Kartini, yang dimeriahkan dengan hiburan musik, hiburan anak-anak, dan kesenian tradisional.

b) Penjamasan Bende Becak

Benda pusaka Sunan Bonang berupa "bende" yang diberi nama "Bende Becak" berukuran garis tengah 10 cm. Zaman dahulu bende ini

berfungsi sebagai alat mengumpulkan para wali atau sebagai tanda pemberitahuan akan terjadinya sesuatu peperangan/musibah. Setiap tanggal 10 Dzulhijjah (Hari Raya Idul Adha) pukul 09.00 WIB diadakan upacara penjamasan di rumah juru kunci makam Sunan Bonang.Pada upacara ini dibagi-bagikan ketan kuning serta memperebutkan air bekas penjamasan Bende Becak.

Kabupaten Rembang juga memiliki berbagai makanan khas (kuliner) yang mungkin tidak terdapat di daerah lain, yang secara umum bahan bakunya berasal dari hasil produksi lingkungan alam setempat. Beberapa contoh makanan khas dari Rembang adalah sate sarepeh, mangut, sayur merica, lontong tuyuhan, dumbeg, kaoya dudul, gula semut.

b. Pertumbuhan Ekonomi / PDRB

Perkembangan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Rembang selama 3 tahun terakhir dapat terlihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel I.3
PDRB Kabupaten Rembang Atas Dasar Harga Konstan
(dalam jutaan rupiah)

LAPANGAN USAHA	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013
1. PERTANIAN	**1.067.912,90**	**1.102.834,29**	**1.149.099,45**
a. Tanaman Bahan Makanan	770.417,69	786.568,62	828.711,93
b. Tanaman Perkebunan	56.382,37	68.951,51	70.534,63
c. Peternakan	80.164,41	82.535,97	83.201,07
d. Kehutanan	35.693,68	32.279,98	34.267,79
e. Perikanan	125.254,75	132.498,21	132.384,03
2.PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	**45.179,47**	**47.033,35**	**50.383,28**
a. Minyak & Gas Bumi	-	-	-
b. Pertambangan tanpa Migas	-	-	-
c. Penggalian	45.179,47	47.033,35	50.383,28
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	**95.039,15**	**100.358,03**	**107.609,38**
a. Industri Migas	-	-	-
b. Industri Non Migas	95.039,15	100.358,03	107.609,38
1. Makanan,minuman & tembakau	58.603,48	61.943,43	66.415,74
2.Tekstil,brg kulit & alas kaki	8.315,22	8.706,70	9.356,84
3. Brg kayu & hasil hutan lainnya	11.027,62	11.727,43	12.665,62
4. Kertas dan barang cetakan	728,15	789,85	852,09
5. Pupuk, kimia & brg dari karet	-	-	-
6. Semen & brg galian bkn logam	13.366,80	14.006,84	14.903,28
7. Logam dasar besi & baja	-	-	-
8. Alat angk.mesin & peralatannya	-	-	-
9. Barang lainnya	2.997,88	3.183,77	3.415,81

LAPANGAN USAHA	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013
4. LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH	**11.327,89**	**12.128,95**	**13.348,86**
a. Listrik	10.291,62	11.093,51	12.282,87
b. Gas	-	-	-
c. Air bersih	1.036,27	1.035,43	1.066,00
5. BANGUNAN	**214.875,36**	**231.107,91**	**244.358,56**
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	**397.761,78**	**421.941,88**	**448.168,34**
a. Perdagangan	303.567,12	320.958,18	340.948,05
b. Hotel	775,88	827,94	883,49
c. Restoran	93.418,78	100.155,76	106.336,80
7.PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	**129.402,24**	**136.903,84**	**146.066,81**
a. Pengangkutan	119.844,03	126.680,56	134.848,11
1. Angkutan Rel	-	-	-
2. Angkutan Jalan raya	117.681,72	124.384,29	132.475,04
3. Angkutan laut	-	-	-
4. Angkutan Udara	-	-	-
5. Angkutan Sungai Danau	-	-	-
6. Jasa Penunjang Angkutan	2.162,31	2.296,26	2.373,08
b. Komunikasi	9.558,21	10.223,28	11.218,69
1. Pos dan Telekomunikasi	9.558,21	10.223,28	11.218,69
2. Jasa Penunjang Telekomunikasi	-	-	-
8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN	**57.130,28**	**60.784,80**	**64.779,57**
a. Bank	5.441,07	5.991,65	6.524,65
b. Lembaga keuangan bukan bank	5.289,93	5.694,43	6.118,54
c. Jasa penunjang keuangan	-	-	-
d. Sewa bangunan	40.748,55	43.125,73	45.952,00
e. Jasa Perusahaan	5.650,73	5.972,99	6.184,38
9. JASA-JASA	**365.830,16**	**387.703,41**	**402.661,69**
a. Pemerintah Umum	332.961,88	353.143,37	365.729,04
b. Swasta	32.868,28	34.560,04	36.932,65
1. Jasa Sosial Kemasyarakatan	26.763,01	28.196,15	30.239,45
2. Jasa Hiburan dan Kebudayaan	334,47	351,26	373,17
3. Jasa Perorangan dan RT	5.770,80	6.012,63	6.320,03
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	**2.384.459,23**	**2.500.796,46**	**2.626.475,93**

Sumber data : BPS Kabupaten Rembang Tahun 2011 – 2013

E. Kelembagaan Perangkat Daerah

Bersandar pada prinsip – prinsip otonomi daerah yang memiliki hak, wewenang dan kewajiban mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang mendukung tugas – tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas – tugas pembantuan lainnya maka sebagai implementasinya ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2012 serta dilengkapi pula dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang.

Adapun perangkat daerah di Kabupaten Rembang terdiri dari :

1. **Sekretariat Daerah**
2. **Sekretariat DPRD.**
3. **Dinas Daerah.**

   Dinas Daerah di Kabupaten Rembang terdiri-dari :

   1. Dinas Kesehatan
   2. Dinas Pendidikan
   3. Dinas Pekerjaan Umum
   4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
   5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
   6. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
   7. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
   8. Dinas Pertanian dan Kehutanan
   9. Dinas Kelautan dan Perikanan
   10. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
   11. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
   12. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

4. **Lembaga Teknis Daerah**

   Lembaga Teknis Daerah di Kabupaten Rembang terdiri dari :

   1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
   2. Inspektorat
   3. Badan Kepegawaian Daerah
   4. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana
   5. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
   6. Badan Lingkungan Hidup
   7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

8. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat
9. Kantor Perpustakaan dan Arsip
10. Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno
11. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
12. Satuan Polisi Pamong Praja
13. Kecamatan
14. Kelurahan

F. Aparatur Pemerintah Daerah

Keberhasilan pembangunan di suatu daerah tidak terlepas dari dukungan personil aparat pemerintahan. Untuk itu, Kabupaten Rembang memiliki 8.449 Pegawai Negeri Sipil yang siap mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Adapun kualifikasi kepegawaian Pemerintah Kabupaten Rembang per Desember 2014 adalah sebagai berikut :

Tabel I.4

Strata Pendidikan PNS Per Golongan
Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2014

No	Golongan	Strata Pendidikan						Jumlah
		SD	SLTP	SLTA	Diploma	S1	S2	
1	Golongan I	121	182	1	-	-	-	304
2	Golongan II	53	203	1.114	605	-	-	2.005
3	Golongan III	-	-	616	410	2.094	56	3.176
4	Golongan IV	-	-	114	1.187	1.604	58	3.016
Jumlah		176	363	1.839	2.202	3.745	118	8.499

Adapun untuk pendidikan pejabat yang ada di Kabupaten Rembang sebagaimana tabel berikut :

Tabel I.5

Strata Pendidikan Pejabat Struktural
Pada Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2014

No	Eselon	Strata Pendidikan								Jumlah
		SLTA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3	
1	Eselon II.a	-	-	-	-	-	-	1	-	1
2	Eselon II.b	-	-	-	-	-	-	12	-	12
3	Eselon III.a	-	-	-	-	-	39	11	-	50

4	Eselon III.b	1	-	-	5	-	65	16	-	87
5	Eselon IV.a	42	-	-	15	-	267	44	-	368
6	Eselon IV.b	43	-	-	6	-	36	-	-	85
8	Eselon V.a	29	-	-	3	-	11	-	-	43
Jumlah		115			29		418	84	-	646

G. Permasalahan/Isu Pembangunan Daerah

Memasuki tahun 2014 strategi pembangunan daerah disusun berdasarkan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan mengacu pada permasalahan yang menonjol sebagai isu strategis di kabupaten Rembang. Berdasarkan kondisi umum yang ada serta prediksi perkembangan permasalahan, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan/isu daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang perlu menjadi perhatian bersamapada tahun 2014 sebagai berikut:

a. Kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar masih rendah.

Hal ini ditandai dengan kondisi capaian kinerja pelaksanaan pembangunan sampai dengan tahun 2013, nilai IPM 73,53 dan IPG 65,38 atau masih berada dibawah rata-rata capaian provinsi Jawa Tengah.

b. Jumlah penduduk dibawah garis kemiskinan masih tinggi.

Tingkat kemiskinan sampai dengan tahun 2013 masih diatas angka provinsi, yaitu 20,97 %.

c. Kualitas dan kuantitas infrastruktur dan pelayanan publik yang belum memadai.

Hal ini terlihat dengan belum memadainya kondisi sarana prasarana untuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti sektor pendidikan, kesehatan, air minum, drainase, persampahan maupun air limbah, pengelolaan sumber daya air permukaan yang mampu menampung kelebihan air pada musim hujan.

Selain itu juga terlihat pada infrastruktur wilayah yang berhubungan dengan resiko terjadinya berbagai bencana seperti bencana banjir, gelombang pasang/abrasi, tanah longsor.

d. Pertumbuhan ekonomi daerah masih lambat, pendapatan perkapita masih rendah.

   Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang rata-rata selama 3 (tiga) tahun terakhir masih dibawah pertumbuhan ekonomi propinsi dan nasional, yaitu sebesar rata-rata 4,43 %, bahkan ada kecenderungan penurunan pertumbuhan ekonomi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

e. Investasi dan kemitraan di daerah masih belum optimal.

f. Pengelolaan sumberdaya alam belum optimal, terutama sumberdaya pesisir.

   Keberadaan kawasan hutan mangrove, terumbu karang dan pulau-pulau kecil serta ditemukannya situs-situs sejarah maritim yang belum dikembangkan dalam konsep pembangunan komprehensif dan terpadu dan sejalan dengan upaya pemberdayaan masyarakat pesisir khususnya masyarakat nelayan, termasuk dalam penyediaan dan peningkatan infrastruktur di kawasan pesisir Kabupaten Rembang.

g. Terjadinya degradasi lingkungan hidup

   Perubahan iklim yang cukup ekstrim, serta pemanfaatan sumber daya alam yang demikian pesat, baik sumber daya pesisir maupun sumber daya mineral akan dapat menimbulkan degradasi lingkungan hidup

h. Pemanfaatan peluang globalisasi dan perdagangan bebas belum optimal. Terutama pada fasilitasi dan perlindungan usaha bagi pedagang sektor informal, perdagangan skala kecil dan menengah sejalan dengan berlakunya perdagangan bebas mulai 2010 berdasarkan kesepakatan C-AFTA (2010) dan NAFTA pada tahun 2015 serta perdagangan bebas sesuai dengan persetujuan dalam *World Trade Organizaion*. Selain itu juga terkait Adanya agenda dan target capaian *millenium development goals*(MDG's) 2015, ecolabelling, ISO, Kyoto Protokol.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2010-2015merupakan sebuah dokumen perencanaan komprehensif berwawasan 5 tahunan, yang digunakan sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan sebagai acuan bagi seluruh stakeholder di Kabupaten Rembang dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu 2010-2015.Sebagai dokumen perencanaan lima tahunan, RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2010-2015 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), yang berkedudukan sebagai dokumen perencanaan induk dengan wawasan waktu 20 tahun.

Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2010-2015, acuan utama yang digunakan adalah rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Agenda Pembangunan dan Prioritas Program Pembangunan Bupati/Wakil Bupati Kepala Daerah hasil Pilkada Tahun 2010. Di samping itu, penyusunan RPJMD ini juga mengacu pada RPJM Nasional, dan berbagai kebijakan serta prioritas program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Tujuan merujuk semua dokumen perencanaan dimaksud, adalah untuk menjamin terciptanya sinergitas kebijakan dan sinkronisasi program secara vertikal antar tingkat pemerintahan yang berbeda.

A. VISI DAN MISI

Dengan memperhatikan kondisi umum daerah Kabupaten Rembang, analisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah lima tahun kedepan telah dirumuskan visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Rembang Tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut :"**Terwujudnya Rembang yang Maju, Mandiri, Dinamis dan Sejahtera**". Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah :

1. **Rembang yang Maju,** Kabupaten Rembang memiliki sarana prasarana yang memadai dengan tingkat pelayanan publik yang memuaskan, didukung oleh sistem pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel dan demokratis, ditopang oleh teknologi komunikasi dan informasi.
2. **Rembang yang Mandiri,** adalah Kabupaten Rembang memiliki proporsi PAD yang semakin besar dalam pendapatan daerah dan surplus bahan pangan khususnya palawija dan produk peternakan dengan tetap mempertahankan swasembada padi dan jagung serta produk perikanan yang telah dicapai. Dari sektor industri ditunjukkan oleh pemakaian bahan baku lokal yang lebih tinggi dibandingkan dengan bahan baku impor dalam proses produksinya.
3. **Rembang yang Dinamis,** adalah Kabupaten Rembang mampu mengikuti perkembangan dan perubahan situasi serta kondisi lokal, nasional dan global di bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik.
4. **Rembang yang Sejahtera,** adalah kondisi Kabupaten Rembang dengan masyarakat yang bahagia baik lahir maupun batin. Kebahagian lahir ditunjukkanoleh tingginya derajat kesehatan, tingginya tingkat pendapatan per kapita,kecukupan sandang, pangan dan papan (perumahan). Sedangkan kebahagiaanbatin yang dimaksudkan adalah tingginya religiusitas atau penghayatan terhadapagama dan

kerpecayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ketenteraman dalamkehidupan berumah tangga dan bermasyarakat.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, telah dirumuskan sejumlah misi sebagai berikut :

1. Memacu pertumbuhan investasi dalam rangka menghidupkan dan meningkatkan perkembangan sektor riil dan peningkatan kesempatan kerja.
2. Meningkatkan akses UMKM terhadap sumber permodalan dan menciptakan iklim usaha yang kondusif.
3. Meningkatkan produktivitas pertanian dalam arti luas.
4. Meningkatkan pendapatan asli daerah terutama dari sumber-sumber pendapatan non konvensional dan tidak membebani masyarakat.
5. Meningkatkan mutu, akses dan relevansi pendidikan sejak dari jenjang PAUD sampai dengan jenjang menengah dan pendidikan tinggi yang menjadi kewenangan kabupaten.
6. Meningkatkan mutu dan akses pelayanan kesehatan, baik pada tingkatan pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
7. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan aparatur yang profesional, berbudi pekerti luhur dan agamis.
8. Meningkatan mutu dan pemerataan pelayanan infrastruktur untuk meningkatkan kualitas pelayanan, mendukung pertumbuhan ekonomi dan terwujudnya Rembang Sea-front City .
9. Mengimplementasikan pembangunan yang selalu mengikuti perkembangan dan perubahan situasi serta kondisi lokal, nasional dan global.

B. TUJUAN

Dalam rangka mewujudkan misi-misi sebagaimana telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan daya tarik investasi di Kabupaten Rembang.
2. Meningkatkan penyaluran modal bagi pelaku UMKM
3. Meningkatkan Iklim yang kondusif bagi pengembangan UMKM
4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan usaha pertanian tanaman pangan, hortikulura, perkebunan, peternakan dan perikanan dalam rangka pengembangan wilayah pesisir.
5. Mengoptimalkan intensifikasi, efisiensi dan pemanfaatan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah.
6. Mengoptimalkan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas, perbaikan sarana dan prasarana, penyediaan sarana penunjang pembelajaran, penyediaan beasiswa dan kerjasama dengan pengguna pada semua jenjang pendidikan baik formal maupun non formal.
7. Meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga kesehatan dan lembaga penyelenggara pelayanan kesehatan.
8. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di segala bidang kompeten, profesional, mandiri dan bermanfaat dengan di dasari keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

9. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar, pembangunan infrasturktur pedesaan dan wilayah cepat tumbuh
10. Mengembangkan tata kelola wilayah pesisir yang mampu menjadi pemicu pergerakan ekonomi daerah
11. Mengembangkan tatakelola pemerintahan yang baik, responsif terhadap perkembangan dan perubahan dinamika kebijakan serta proaktif dalam mengantisipasi perkembangan global, ditopang oleh teknologi komunikasi dan informasi yang memadai

C. SASARAN

Sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun, dapat dirumuskan berdasarkan tujuan-tujuan yang ada.

Tujuan-1: Meningkatkan daya tarik investasi di Kabupaten Rembang. Sasarannya adalah :

1. Penyederhanaan prosedur pelayanan dan perijinan investasi.
2. Promosi peluang investasi.
3. Terjaminnya keamanan berusaha.
4. Tersedianya infrastruktur yang memadai.
5. Tersedianya dukungan SDM yang memadai.

Tujuan-2: Meningkatkan penyaluran modal bagi pelaku UMKM. Sasarannya adalah :

1. Penyediaan informasi ketersediaan dana pada perbankan dan pelayanan non bank serta persyaratan pengajuan pinjaman.
2. Penyebaran sarana pelayanan bank dan lembaga keuangan non bank ke pelosok daerah.
3. Ketersediaan skim kredit sesuai dengan perilaku jenis usaha.
4. Adanya kemampuan UMKM untuk menyusun rencana bisnis yang baik.
5. Dimilikinya legalitas asset pelaku usaha sebagai jaminan kredit.

Tujuan-3: Meningkatkan Iklim yang kondusif bagi pengembangan UMKM. Sasarannya adalah :

1. Jaminan kemanan oleh Pemda.
2. Ketersediaan infrastruktur yang memadai.
3. Penyebaran sarana perbankan.

Tujuan-4: Meningkatkan efisiensi dan efektivitas Pengelolaan usaha pertanian tanaman pangan, hortikulura, perkebunan, peternakan dan perikanan. Sasarannya adalah:

1. Mudahnya akses petani terhadap sarana produksi pertaniandan alat mesin pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan.

2. Meningkatnya kemapuan petenai dalam pengelolaan usaha.
3. Tersedianya akses permodalan untuk pengembangan usaha
4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar pertanian.

Tujuan-5: Mengoptimalkan intensifikasi, efisiensi dan pemanfaatan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah. Sasarannya adalah :

1. Meningkatnya intensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah.
2. Meningkatnya efisiensi dalam penarikan pendapatan asli daerah.
3. Terwujudnya sumber PAD baru yang tidak membani masyarakat

Tujuan-6: Mengoptimalkan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas, perbaikan sarana dan prasarana, penyediaan sarana penunjang pembelajaran, penyediaan beasiswa dan kerjasama dengan pengguna pada semua jenjang pendidikan baik formal maupun non formal.Sasarannya adalah:

1. Meningkatnya kualitas proses pembelajaran pada semua jenjang pendidikan.
2. Tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi dan bersertifikat profesi.
3. Terwujudnya penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai pada semua jenjang pendidikan.
4. Terwujudnya Angka Partisipasi Murni(APM) yang tinggi pada semua jenjang pendidikan.
5. Tersedianya beasiswa bagi penduduk miskin.
6. Meningkatnya kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan.

Tujuan-7: Meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga kesehatan dan lembaga penyelenggara pelayanan kesehatan. Sasarannya adalah :

1. Tersedianya tenaga medis yang memadai.
2. Tersedianya obat-obatan yang memadai.
3. Tersedianya peralatan medis yang memadai.
4. Meningkatnya pengelolaan penyelenggara pelayanan kesehatan.
5. Meningkatnya pemerataan pelayanan kesehatan.
6. Tersedianya jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin.

Tujuan-8: Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di segala bidang kompeten, profesional, mandiri dan bermanfaat dengan di dasari keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sasarannya adalah :

1. Meningkatnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan masyarakat.
2. Meningkatnya sarana peribadatan dan pendidikan agama.
3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan dan latihan (Diklat) pegawai.

4. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelatihan kerja/ketrampilan bagi masyarakat.

Tujuan-9: Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar, pembangunan infrasturktur pedesaan dan wilayah cepat tumbuh. Sasarannya adalah :

1. Meningkatnya kualitas prasarana jalan dan jembatan.
2. Meningkatnya kualitas saluran irigasi.
3. Meningkatnya kualitas saluran drainase.
4. Terbangunnya jalan poros desa dan kecamatan.

Tujuan-10: Mengembangkan tata kelola wilayah pesisir yang mampu menjadi pemicu pergerakan ekonomi daerah. Sasarannya adalah :

1. Terbangunya sarana dan prasarana yang mendukung terwujudnya *seafront city.*
2. Terwujudnya pemberdayaan masyarakat wilayah pesisir.
3. Terbangunya kawasan pengembangan budidaya perikanan kelautan.
4. Terwujudnya kawasan wisata bahari.

Tujuan-11: Mengembangkan tatakelola pemerintahan yang baik, responsif terhadap perkembangan dan perubahan dinamika kebijakan dan proaktif dalam mengantisipasi perkembangan global, ditopang oleh teknologi komunikasi dan informasi yang memadai. Sasarannya adalah :

1. Terselenggaranya pemerintahan daerah yang mempertimbangkan prinsip-prinsip demokrasi serta *good and clean governance*.
2. Tersedianya sistem dan kelembagaan layanan publik yang efektif dan efisien.
3. Tersedianya sistem informasi pembangunan yang memadai dan peka terhadap perubahan.
4. Responsif terhadap perkembangan situasi.
5. Responsif terhadap perubahan dinamika kebijakan nasional.
6. Proaktif dalam mengantisipasi perkembangan/ perubahan lingkungan strategis.

D. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH

Dengan berpedoman pada RPJP Daerah Kabupaten Rembang 2005-2025, memasuki tahap pelaksanaan pembangunan lima tahun kedua periode 2010-2015, arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah dijabarkan sebagai berikut :

1. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Rembang tahun 2010-2015 merupakan penjabaran dari RPJP Daerah Kabupaten Rembang 2005-2025 tahap II. Dengan mempertimbangkan berbagai isu strategis, maka arah kebijakan pembangunan lima

tahun kedepan guna mencapai tujuan sebagaimana tertuang dalam visi dan misi RPJM Daerah 2010-2015 adalah sebagai berikut:

a. Mewujudkan SDM yang berkualitas.
b. Mewujudkanperekonomian daerah yang maju dan berdaya saing.
c. Mewujudkanpembangunan infrastruktur yang memadai.
d. Mewujudkan kehidupan demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.
e. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

2. Strategi

Adapun strategi untuk masing-masing kebijakan adalah sebagai berikut:

a. Mewujudkan SDM yang Berkualitas

1) Peningkatan ketaqwaan masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui pelayanan dan kemudahan bagi umat beragama dalam melaksanakan ajaran agamanya.
2) Perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi, sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan tatakelola dan pencitraan publik pendidikan.
3) Peningkatan kesehatan diarahkan pada terwujudnya peningkatan derajat kesehatan sebagai upaya meningkatkan kualitas SDM.
4) Peningkatan frekuensi dan kualitas komunikasi informasi dan edukasi keluarga berencana dan keluarga sejahtera (KIE, KB dan KS) melalui :
5) Peningkatan kualitas, komptensi dan daya saing tenaga kerja, pengembangan kesempatan kerja, pengurangan pengangguran dan meningkatkan kualitas keharmonisan hubungan industrial.
6) Peningkatan kesejahteraan sosial diarahkan pada peningkatan kualitas kehidupan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
7) Peningkatan minat baca masyarakat, kesadaran masyarakat tentang serah simpan karya cetak/karya rekam dan pengembangan sarana/prasarana perpustakaan.
8) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
9) Pengembangan dan pembangunan jati diri bangsa untuk mewujudkan karakter dan identitas bangsa yang terbuka dan berakar pada aktualisasi nilai-nilai budaya setempat.
10) Penurunan jumlah penduduk miskin melalui pemberdayaan masyarakat dan peningkatan akses kualitas hidup berbasis keluarga.
11) Peningkatan kualitas Pemuda yang mandiri, kreatif dan inovatif yang memiliki karakter kebangsaan (nation building) serta memiliki wawasan kebangsaan dan berkepribadian bangsa Indonesia dan peningkatan kualitas olahraga untuk menciptakan SDM suportif dan berprestasi.
12) Pelestarian nilai-nilai budaya yang mampu merespon secara positif dan produktif perkembangan modernisasi yang terjadi di masyarakat.
13) Peningkatan kualitas penyelenggaraan transmigrasi dan meningkatkan jumlah transmigran.

b. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Maju dan Berdaya Saing

1) Pemantapan pertumbuhan ekonomi melalui penguatan struktur perekonomian daerah berbasis sektor primer yang didukung oleh sektor sekunder dan tersier.
2) Pengembangan agrobisnis, melalui pengembangan dan penguatan keterkaitan subsistem antara hulu dan hilir guna meningkatkan nilai tambah produk pertanian yang berdaya saing sesuai dengan permintaan pasar.
3) Pengembangan sistem informasi pertanian dan deseminasi inovasi teknologi guna mendukung pengembangan pembangunan pertanian yang berkelanjutan.
4) Peningkatan kemampuan kapasitas SDM pertanian dalam peningkatan produktivitas pertanian.
5) Pemantapan ketersediaan dan cadangan pangan yang memenuhi kualitas, kuantitas dan kontinuitas bagi masyarakat serta diversifikasi produk pangan.
6) Penguatan Struktur Industri yang diarahkan pada pengembangan sektor agroindustri berbasis industri kecil dan menengah melalui kemitraan yang sehat dengan usaha-usaha ekonomi lokal sebagai leading sektor dalam perekonomian Kabupaten Rembang.
7) Optimalisasi perdagangan melalui peningkatan sarana prasarana perdagangan, sistem distribusi dan informasi pasar untuk menjamin ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang terjangkau dan penguatan akses jaringan perdagangan ekspor.
8) Pemberdayaan koperasi dan UMKM melalui penumbuhan wirausaha baru, peningkatan kompetensi dan perkuatan kewirausahaan, peningkatan produktivitas, pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan teknologi dalam iklim usaha yang sehat.
9) Optimalisasi peran lembaga keuangan dan perbankan melalui peningkatan peran sertanya dalam pengembangan agrobisnis, penyediaan permodalan bagi koperasi dan UMKM
10) Peningkatan realisasi penanaman modal diarahkan untuk meningkatkan iklim investasi yang semakin kondusif dengan mendorong terwujudnya kepercayaan dunia usaha melalui penguatan dan penyederhanaan pelayanan penanaman modal, mengembangkan kebijakan pro penanaman modal, peningkatan infrastruktur ekonomi yang baik dan menekan ekonomi biaya tinggi.
11) Pengembangan Pariwisata yang diarahkan melalui peningkatan obyek wisata, pelestarian peninggalan budaya, tradisi, serta kesenian, dalam rangka membentuk karakteristik budaya masyarakat serta daya tarik kunjungan wisata.

c. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Memadai.

1) Peningkatan pelayanan transportasi untuk mendukung kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat yang dilakukan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan, pemerataan dan keberlanjutan pembangunan daerah.

2) Peningkatan pengelolaan sumberdaya air yang memberikan keadilan, kemanfaatan dan keselarasan masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan di dalam dan antar kawasan serta antar kepentingan melalui konservasi sumberdaya air, pendayagunaan sumberdaya air dan pengendalian daya rusak air. Pengembangan konservasi sumberdaya air untuk melestarikan kuantitas air dan memelihara kualitas air.

3) Peningkatan pemenuhan kebutuhan rumah dan terciptanya lingkungan permukiman yang sehat, aman, nyaman dan lestari sesuai dengan peruntukan dan fungsinya melalui menumbuhkembangkan potensi pembiayaan yang berasal dari swadaya masyarakat, kredit mikro perumahan serta pemerataan pembangunan prasarana sarana dasar permukiman.
4) Perwujudan struktur dan pola ruang wilayah kabupaten melalui pembangunan dan pengembangan infrastruktur wilayah.
5) Perwujudan kawasan agropolitan sebagai pusat agrobisnis yang berdaya saing dan berkelanjutan melalui percepatan pembangunan prasarana sarana, pengembangan kelembagaan dan jejaring pemasarannya.
6) Perwujudan kawasan agroforestry sebagai pusat agrobisnis yang berdaya saing dan berkelanjutan melalui percepatan pembangunan prasarana sarana, pengembangan kelembagaan dan jejaring pemasarannya.

d. Mewujudkan Kehidupan Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

1) Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, melalui peningkatan kompetensi aparatur dan pelayanan publik serta penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip good and clean governance.
2) Peningkatan pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah melalui peningkatan kemandirian keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan, efisiensi, dan efektif.
3) Perwujudan masyarakat yang demokratis melalui peningkatan peran partai politik, lembaga perwakilan rakyat dan partisipasi politik masyarakat yang tinggi dalam pemerintahan dan pembangunan.
4) Peningkatan Pembangunan komunikasi dan informasi melalui perwujudan masyarakat sadar informasi dan terjaminnya hak masyarakat terhadap informasi yang luas dan transparan.
5) Peningkatan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat untuk mewujudkan suasana kondusif bagi pelaksanaan pembangunan.
6) Peningkatan Sistem Administrasi Kearsipan secara efisien melalui pengelolaan arsip secara profesional dengan didukung teknologi informasi yang memadai.

7) Peningkatan sarana dan prasarana komunikasi dan keterbukaan informasi publik yang memadai melalui pengembangan sarana dan komunikasi modern berbasis teknologi informasi dan *website*.

e. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan

1) Pendayagunaan sumberdaya alam terbarukan melalui rehabilitasi dan pemulihan daya dukung lingkungan.
2) Pendayagunaan sumberdaya alam tak terbarukan dengan memperhatikan kelestarian daya dukung lingkungan hidup serta memiliki tanggung jawab sosial terhadap kesejahteraan masyarakat lokal.
3) Peningkatan kualitas penanganan bencana dan pengendalian kerusakan lingkungan melalui berbagai upaya mitigasi bencana dan konservasi lahan dan air.
4) Pengembangan energi melalui diversifikasi energi utama maupun energi terbarukan untuk pemerataan dan pemenuhan distribusi energi
5) Peningkatan nilai tambah dan manfaat usaha pertambangan dengan memperhatikan aspek sosial dan lingkungan hidup.
6) Pengelolaan hutan secara lestari melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian hutan.
7) Pengembangan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan berdasarkan pengelolaan sumber daya laut yang berbasis ekosistem dan kelestarian daya dukung lingkungan.
8) Optimalisasi tata guna lahan melalui peningkatan kualitas pelayanan administrasi pertanahan, penegakkan hukum pertanahan serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam rangka tertib administrasi pertanahan untuk mempertahankan daya dukung lingkungan

E.PRIORITAS DAERAH

Berdasarkan rumusan arah kebijakan dan strategi pembangunan, pendekatan implementasi pembangunan jangka menengah Kabupaten Rembangdilaksanakan melalui 4 (empat) pilar kebijakan umum pembangunan daerah meliputi :

1. PembangunanInfrastruktur Pelayanan Publik yang Representatif dan Komprehensif

a. Fasilitasi peningkatan jalan poros nasional dan propinsi untuk memudahkan akses hingga pedesaan.
b. Optimalisasi jalan poros antar desa dengan lapis hotmix atau cor beton.
c. Peningkatan dan penataan pemukiman.
d. Tercukupinya air bersih dan irigasi di seluruh wilayah Kabupaten Rembang hingga 2015.
e. Program Pembangunan Sungai Terpadu (PPST).
f. Pembangunan embung-embung besar representatif untuk mencukupi kebutuhan irigasi & air bersih, diantaranya : 1) embung Trenggulunan, 2) embung Gedari, 3) embung Kaliombo dan 4) embung Rowo Bolodewo dan embung Tlogo.

g. Penyelesaian Pelabuhan Umum Nasional (PUN) beserta kawasan industri, serta dermaga TPI Sarang-Kragan-Rembang.
h. Peningkatan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN).
i. Peningkatan sarana dan prasarana layanan persampahan, drainase dan air limbah.
j. Pengembangan terminal induk angkutan darat dan sub-sub terminal.

2. Pendidikan Gratis dan Bermutu

a. Optimalisasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
b. Meningkatkan kesejahteraan Guru dan peningkatan sarana prasarana pendidikan formal dan non formal sesuai kemampuan daerah.
c. Pelaksanaan sekolah gratis untuk jenjang pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs) baik negeri maupun swasta.
d. Peningkatan sekolah gratis untuk siswa SMA, SMK, MA, MAK baik negeri maupun swasta sampai kelas XII bagi siswa tidak mampu .
e. Pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi hingga jenjang pendidikan tinggi.
f. Fasilitasi Pendirian polikteknik kelautan dan perikanan.

3. KesehatanGratis dan Berkualitas

a. Pemerintah memberikan pelayanan kesehatan secara gratis kepada masyarakat miskin dan tidak mampu di rumah sakit dr. R. Sutrasno Rembang (BLUD) untuk rawat jalan dan rawat inap kelas III serta rawat jalan dan rawat inap kelas II di seluruh Puskesmas di wilayah Rembang melalui program JKRS (Jaminan Kesehatan Rembang Sehat) dan Rujukan PPK III (rumah sakit provinsi) yang bekerja sama dengan Jamkesda Provinsi Jawa Tengah dalam bentuk rawat jalan dan rawat inap.
b. Peningkatan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dan Puskesmas melalui tercukupinya jumlah SDM, rasio pasien dan tenaga kesehatan yang ideal dan jaminan ketersediaan obat serta sarana dan prasarana kesehatan yang lebih lengkap.
c. Revitalisasi Puskesmas menjadi Puskesmas rawat inap di seluruh Kabupaten Rembang.
d. Menjamin ketersediaan anggaran untuk menyelenggarakan program kesehatan gratis termasuk obat-obatan dan sarana prasarana pendukungnya (JKRS, ASKES dan Jamkesda Provinsi).
e. Peningkatan akses dan pelayanan kesehatan.

4. PengembanganEkonomi Rakyat

a. Pengembangan infrastruktur pertanian (jalan usaha tani, jalan produksi, JIDES, JITUT, dan dam Parit).
b. Pengembangan pertanian organik (*Rembang Go Organic*).
c. Penyediaan sarana produksi dan peningkatan penerapan teknologi pertanian dan perkebunan
d. Pengembangan program dana talangan untuk pertanian dan perikanan.
e. Peningkatan pemasaran dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan dan perikanan (promosi hasil produksi dan fasilitasi temu usaha).
f. Memajukan klaster-klaster industri, terutama industri produk khas Rembang seperti batik Lasem, bordir, batu bata dan genteng, penggaraman, perikanan, industri perkayuan dan lain-lain.

g. Pembukaan kawasan industri terpadu (industri kimia, power plant, pabrik semen) menunjang kawasan pelabuhan umum nasional untuk menjamin peningkatan kesempatan dan peluang kerja.
h. Optimalisasi usaha/industri bidang pertambangan (kapur, galian c) dengan mendatangkan investasi yang mendukung bidang pertambangan.
i. Pengembangan industri pariwisata terpadu (jalan wisata bahari, pulau-pulau kecil, BBS I & BBS II, KBT) dan pemeliharan cagar budaya Kabupaten Rembang.
j. Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha.
k. Revitalisasi koperasi unit desa bidang organisasi,management dan usaha
l. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pengembangan kelautan dan perikanan

F.PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014

Untuk mewujudkan sasaran dalam penyelenggaraan pemerintahan, telah ditetapkan perjanjian kinerja yang telah ditandatangani oleh Bupati Rembang pada awal Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut :

Tabel II.1

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2014

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Penyederhanaan prosedur pelayanan dan perijinan investasi	Tingkat penyelesaian perijinan terhadap waktu yang ditentukan	100 %
2	Promosi peluang investasi	Jumlah pameran investasi	3 kali
		Jumlah usaha mikro kecil dan menengah yang terfasilitasi dalam kegiatan promosi perdagangan di luar daerah	14 UMKM
		Jumlah usaha mikro kecil dan menengah yang terfasilitasi dalam kegiatan promosi perdagangan didalam daerah	40
3	Terjaminnya keamanan berusaha	Jumlah perusahaan yang terdaftar bergerak di sektor perdagangan	200
		Jumlah perusahaan yang terdaftar bergerak di sektor industri	54
		Jumlah perusahaan yang terdaftar bergerak di luar sektor perdagangan dan industri	179
4	Tersedianya infrastruktur yang memadai	Jumlah industri skala besar	6 buah
		Jumlah klaster industri	9 buah
		Rekomendasi BKPRD terhadap perizinan pemanfaatan ruang	9 buah
		Jumlah usaha perdagangan di Kabupaten Rembang	5 buah
		Jumlah pembangunan sarana perdagangan	370 unit
		Jumlah sentra industri	9 buah

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
		Jumlah klaster industri	9 buah
		Prosentase jumlah kios pasar dibandingkan jumlah pedagang pasar	15,7 %
		Prosentase jumlah los pasar dibandingkan jumlah pedagang pasar	2,5 %
5	Tersedianya Dukungan Sumber DayaManusia (SDM) yang memadai	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	70 %
		Pencari Kerja Yang Ditempatkan	5 %
		Jumlah Pengangguran Terbuka	-3 %
		Tingkat Pengangguran Terbuka	4,5 %
		Penempatan Tenaga Kerja	
		a. AKL	103 org
		b. AKAD	182 org
		c. AKAN	61 org
6	Penyebaran Sarana Pelayanan Bank DanLembaga Keuangan Non Bank ke Pelosok Daerah	Jumlah Lembaga Perbankan	27 unit
		Jumlah koperasi	554 unit
		Prosentase pertumbuhan jumlah koperasi	0,91 %
		Prosentase pertumbuhan jumlah anggota koperasi	10 %
7	Ketersediaan Skim Kredit Sesuai dengan Pelaku JenisUsaha	Jumlah Kelompok UEP yang dikelola oleh perempuan	2 klp
		Jumlah penyaluran modal kepada koperasi dan umkm melalui temu usaha	80 hibah
8	Adanya Kemampuan UMKMuntuk Menyusun Rencana Bisnis Yang Baik	Jumlah usaha mikro kecil dan menengah	45.023 UMKM
		Prosentase peningkatan jumlah usaha mikro kecil dan menengah	32.81 %
		Prosentase usaha mikro kecil dan menengah dibandingkan seluruh unit usaha	99.87 %
		Prosentase penyerapan tenaga kerja di sektor usaha mikro kecil dan menengah dibanding jumlah penduduk	18.88 %
		Jumlah sentra industri	9 bh
		Jumlah klaster industri	9 bh
9	Dimilikinya Legalitas AssetPelaku Usaha Sebagai Jaminan Kredit	Jumlah Fasilitasi Pengurusan HAKI Produk Industri	8 HAKI
		Jumlah kelompok yang mendapat fasilitas permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah	11 klp
10	Jaminan Keamanan oleh Pemerintah Daerah	Jumlah Perda yang disusun	7
		Jumlah Perbub yang disusun	25
		Jumlah Keputusan Bupati yang disusun	725
		Rasio jumlah Polisi Pamong Praja dibanding jumlah penduduk	1 per 10.000 pddk
		Jumlah Anggota Linmas terlatih	324 org
		Tingkat penyelesaian pelanggaran trantibum di Kab. Rembang	100%

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
11	Mudahnya akses petani terhadap sarana produksipertanian dan alat mesin pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan	Produksi hasil tangkapan ikan	44.098,75 ton
		Peningkatan ketersediaan alat mesin pertanian	5 %
		Produksi tanaman pangan	
		a. Padi	247.213 ton
		b. Jagung	129.775 ton
		c. Kedelai	5.703 ton
		Produksi hortikultura	
		a. Cabe	987 ton
		b. Mangga	8.489 ton
		Produksi tanaman perkebunan	
		a. Tebu (cane)	43.403 ton
		b. Kelapa (kopra)	4.092 ton
		c. Tembakau	2.412 ton
		Produksi Peternakan	
		a. Daging Sapi	1.276.034 kg
		b. Daging Kambing	142.364 kg
		c. Daging Ayam Ras	382.500 kg
		d. Daging Ayam Buras	776.108 kg
		e. Telur Ayam Buras	636.978 kg
		f. Telur Ayam Ras	32.735 kg
		g. Telur Itik	719.632 kg
		Produksi Perikanan	
		a. Jumlah Produksi Budidaya Air Payau	1.294,72 ton
		b. Jumlah Produksi Budidaya Air Tawar	590,70 ton
		c. Jumlah Hasil Produksi Perikanan Laut di TPI/PPI	63.106,54 ton
12	Meningkatnya kemampuan petani dalam pengelolaan usaha	Peningkatan pelaku usaha sektor tanaman pangan dan hortikultura	5 %
		Peningkatan pelaku usaha sektor perkebunan	5 %
		Peningkatan Pelaku usaha sektor peternakan	5 %
		Peningkatan kelompok usaha sektor Kehutanan	5 %
13	Tersedianya akses permodalan untuk pengembangan usaha	Peningkatan stimulan untuk kelompok tani Pangan dan Hortikultura	5 %
		Peningkatan stimulan untuk kelompok tani peternakan	5 %
		Peningkatan stimulan untuk kelompok tani perkebunan	5 %
		Peningkatan stimulan untuk kelompok tani Kehutanan	5 %
14	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar pertanian	Bertambahnya luas lahan pertanian dan perkebunan yang teraliri jaringan irigasi	0,2 %
		Pembangunan embung	7 unit

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
15	Meningkatnya intensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah	Meningkatnya intensifikasi sumber – sumber pendapatan asli daerah.	139.991.163.200,00
16	Meningkatnya efisiensi dalam penarikan pendapatan asli daerah	Meningkatnya efisiensi dalam penarikan pendapatan asli daerah.	40,00%
17	Terwujudnya sumber PAD baru yang tidak membani masyarakat	Terwujudnya sumber PAD baru yang tidak membebani masyarakat	3.683.275.000,00
18	Meningkatnya kualitas proses pembelajaran pada semua jenjang pendidikan	Angka kelulusan Ujian Nasional SMP/MTs	99.92%
		Angka kelulusan UN SMA/MA/SMK	90.92%
		TK/RA/SD/MI Menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	70%
		SMP/MTs/SMA/SMK/MA melaksanakan MBS dengan baik	100%
19	Tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi dan bersertifikat profesi	Guru SD/MI yang bersertifikat pendidik	70.51%
		Guru SMP/MTs memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan	95.50%
		Guru TK/RA yang layak mendidik dengan kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional	49.18%
		Guru SD/MI memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan	67.37%
		Guru SMP/MTs bersertifikat pendidik	80.46%
		Guru SMA/SMK/MAbersertifikat pendidik	65.49%
		Guru SMA/SMK/MA memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan	97.78%
20	Terwujudnya penyedia sarana dan prasarana pendidikan yang memadai pada semua jenjang pendidikan	TK/RA memiliki sarana dan prasarana belajar/bermain	44%
		Meningkatnya jumlah lembaga PAUD dan TK	56%
		TK/RA menetapkan manajemen sekolah berbasis sekolah	70,00%
		Ruang kelas SD/MI sesuai standar	73,95%
		SD/MI memiliki perpustakaan sesuai standar	54,04%
		SMP/MTs memiliki Laboratorium IPA dan Komputer	66,95%
		SD/MI memiliki Laboratorium IPA dan komputer	16,84%
		SMP/MTs memiliki perpustakaan sesuai standar	90,46%
		Lembaga kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar yang ditetapkan	70.36%
		Meningkatnya tenaga pendidik, instruktur atau penguji praktik kursus/pelatihan kelompok belljar, usaha/magang memiliki kualifikasi	87,08%

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
		sesuai dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan	
		Lembaga kursus memiliki ijin operasional dari pemerintah	98,00
		Lembaga kursus dan lembaga pelatihan terakreditasi	66,76%
21	Terwujudnya Angka Partisipasi Murni (APM) yang tinggi pada semua jenjang pendidikan	APK PAUD	88,50%
		APK SD/MI	103,98%
		APK SMP/MTs	98,46%
		APK SMA/SMK/MA	66,80%
		APM SMP/MTs	99,22%
		APM SMA/SMK/MA	51,70%
		Penduduk usia sekolah yang belum sekolah di SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA menjadi peserta didik program paket A, B dan C	98,55%
		Angka melek huruf	99,90%
		Angka melanjutkan SMP/MTs ke SMA/MA/Kejuruan	82,67%
22	Tersedianya beasiswa bagi penduduk	Angka Putus Sekolah SD	0,01%
		Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,11%
		Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK	0,25%
		Penduduk putus sekolah, pengangguran dan dari keluarga pra sejahtera menjadi peserta didik dalam kursus-kursus/ pelatihan/kelompok belajar usaha/magang (%)	37,11%
23	Meningkatnya kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan	Lulusan SMK diterima didunia kerja sesuai dengan keahliannnya	46,67%
		Lulusan kursus, pelatihan, magang, kelompok belajar usaha dapat memasuki dunia kerja	45,27%
		Lulusan program paket C dapat memasuki dunia kerja	45,27%
24	Tersedianya tenaga medis yang memadai	Rasio dokter Spesialis per 100.000 penduduk	6 per 100 rb pendd
		Rasio dokter per 100.000 per penduduk	40 per 100 rb pendd
		Rasio dokter gigi per 100.000 penduduk	11 per 100 rb pendd
25	Tersedianya obat-obatan yang memadai	Ketersediaan obat sesuai kebutuhan	100 %
		Pengadaan obat esensial	100 %
		Katersediaan obat sesuai standar	100 %
26	Tersedianya peralatan medis yang memadai.	Ketersediaan alat kesehatan sesuai standar	100 %
27	Meningkatnya pengelolaan penyelenggara pelayanan kesehatan.	Kasus Kematian Bayi (AKB)	115 ks
		Kasus Kematian Ibu (AKI)	9 ks
		Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <	100 %

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
		24 jam	
		Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100 %
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit :	
		a. Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk	2 per 100 rb pendd < 15 th
		b. Cakupan balita dengan Penemuan penderita Pneumonia yang ditangani	1.303 balita
		c. Penemuan TB BTA positif (CDR)	70 %
		d. Angka Kesembuhan TB Paru	85 %
		e. Penderita DBD yang ditangani	100 %
		Cakupan kunjungan ibu hamil (K4)	91 %
		Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	80 %
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	100 %
		Cakupan pelayanan nifas	100 %
		Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	80 %
		Cakupan Kunjungan Bayi	90 %
		Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100 %
		Cakupan peserta KB aktif	80 %
		Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	100 %
		Cakupan pelayanan anak balita	85 %
28	Meningkatnya pemerataan pelayanan kesehatan	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota	100
		Cakupan kunjungan rawat jalan	15
		Cakupan kunjungan rawat inap	1,5%
29	Tersedianya Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100 %
		Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100 %
		Cakupan penduduk yang menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan pra bayar	100 %
		Cakupan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin danmasyarakat rentan.	100 %

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
		Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	100 %
		Cakupan Desa Siaga	74,49 %
30	Meningkatnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan masyarakat	Jumlah Produk TTG Lokal unggulan yang dipamerkan pada event tingkat nasional	1 paket
31	Meningkatnya Sarana Peribadatan dan Pendidikan Agama	Jumlah sarana peribadatan dan pendidikan agama yang dibantu	451 unit
32	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan dan latihan (Diklat) pegawai	Jumlah peserta diklat struktural	42 org
		Jumlah PNS yang ikut diklat bendaharawan	80
		Jumlah PNS yang ikut Evaluasi	80
		Jumlah PNS yang ikut diklat teknis/fungsional	20 org
		Jumlah pejabat eselon III yang ikut pelatihan motivasi dan pengembangan potensi	200
		Jumlah PNS yang mendapat bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	10
33	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelatihan kerja/ketrampilan bagi masyarakat	Jumlah dokumen parahita yang tersusun	1 paket
		Jumlah posyandu unggulan yang terbentuk	6 kelompok
		Jumlah kader posyandu yang terlatih	112 kader
		Jumlah data posyandu yang tersusun	1 buku
		Jumlah sarana posyandu yang tersedia	30 unit
		Jumlah orang tua yang mendapatkan pelatihan tentang metode pengajaran bagi anak yang berkebutuhan khusus	100 orang
		Pelatihan ketrampilan bagi penyandang cacat (per tahun)	1
		Pelatihan ketrampilan bagi anak terlantar (per tahun/orang)	1 keg/55 org
		Pelatihan ketrampilan bagi eks penyakit sosial (per tahun)	1 keg
		Pelaksanaan pelatihan ketrampilan bagi keluarga fakir miskin dan wanita rawan sosial ekonomi (kegiatan/tahun)	1 keg
		Jumlah desa lokasi penerima program P2M-BG	2 desa
		Jumlah Produk TTG Lokal unggulan yang dipamerkan pada event tingkat nasional	1 paket
		Jumlah pelaku usaha industri yang dibina atau dilatih	525 orang

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
34	Meningkatnya kualitas prasarana jalan dan jembatan	persentase panjang jalan dalam kondisi baik	85%
		prosentase jembatan dalam kondisi baik.	50%
35	Meningkatnya kualitas saluran irigasi	prosentase peningkatan sawah dengan irigasi teknis	20 %
36	Meningkatnya kualitas saluran Drainase	Prosentase wilayah yang memiliki drainase	50 %
		Penilaian adipura	1 piala
37	Terbangunnya sarana dan prasarana yang mendukung terwujudnya *sea front city*	Jumlah hasil tangkapan ikan	63.106.538 kg
		Prosentase meningkatnya Omset Produksi Hasil Olahan Perikanan	231.198.240 kg
38	Terwujudnya pemberdayaan masyarakat wilayah pesisir.	Jumlah kelompok Pokwasmas	2 klp
		Jumlah Pelatihan Peningkatkan SDM masyarakat di daerah pesisir dan sekitarnya	105 org
39	Terbangunnya kawasan pengembangan budidaya perikanan kelautan	Peningkatan Produksi Garam	117.833 ton
		Jumlah Produksi Benih ikan	51.819.443.ekor
		Jumlah hasil produksi olahan	231.198.264 kg
		Peningkatan produksi perikanan tangkap sebesar 10% per tahun	63.106.53 kg
40	Terwujudnya kawasan wisata bahari	Meningkatnya jml kunjungan wisata (org) 5% per thn)	403,078
		Meningkatnya jml pendapat-an daerah dari obyek wisata (10% per thn)	1,289,771,100
		Meningkatnya jml obyek wisata yg memiliki kelengkapan bahan promosi (bh)	5
		Meningkatnya jumlah event pariwisata daerah dalam setahun (kali).	4
		Meningkatnya jml obyek pari wisata & daya tarik wisata yg memiliki sarana prasarana penunjang lengkap (unit)	5
		Meningkatnya rata2 lama tinggal wisatawan (hr) 5%/th	2.12
41	Terselenggaranya pemerintahan daerah yang mempertimbangkan prinsip-prinsip demokrasi serta *good and clean governance*	Jumlah rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti	100%

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
		Opini penilaian BPK	WTP
		Prosentase SKPD yang menyusun Penetapan kinerja	100%
		Prosentase SKPD yang menyusunLAKIP	100%
42	Tersedianya sistem dan kelembagaan layanan publik yang efektif dan efisien	Nilai IKM	83
		Jumlah sertifikasi ISO	10 unit
		Cakupan penerbitan KTP/KK	100%
		Cakupan penerbitan Akta Catatan Sipil	100%
		Jumlah Koleksi Buku Manual	400 buku
		Jumlah Buku Cerita Sejarah yang Dilestarikan	50 buku
		Jumlah Anggota Perpustakaan	1000 org
		Jumlah Pengunjung/Peminjam Perpustakaan	16.184 0rg
		Jumlah Pengurus	10
		Jenis Arsip yang Terdokumentasikan	14.000 berkas
		Jumlah Arsip yang Dilestarikan dan Diselamatkan	10.000 berkas
		Jumlah Lembaga yang Terbina Kearsipannya	5 SKPD dan 28 Desa
		Jumlah Arsip yang Diproses Sesuai dengan JRA (Jadwa Retensi Arsip)	10.000 berkas
		Jumlah Koleksi Buku Manual	400 buku
		Jumlah Arsiparis	2 orang
43	Tersedianya sistem informasi pembangunan yang memadai dan peka terhadap perubahan	Jumlah media massa baik cetak & elektronik yg mempublikasikan keg pemerintahan dan pembangunan daerah	7000 exp
		Tingkat penyebaran informasi publik dan fasilitasi pers	1
		Jumlah website milik Pemda yang dapat diakses oleh masyarakat	14
		Media msssa sepeti majalah, radio dan televisi;	1
		Media baru seperti website (media online)	1
		Media tradisional seperti petunjuk rakyat	1
		Media Interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya dan/atau	1
		Media luar ruang seperti media buletin,leflet,booklet,brosur,spanduk dan baliho	1
44	Responsif terhadap perkembangan situasi	Prosentase terbentuknya masyarakat sadar bencana	100 %
		Prosentase pelatihan penanggulangan Bencana	100 %
		Prosentase Tim Penanggulangan Bencana yang terdidik	100 %
		Prosentase jumlah korban yang mendapat bantuan	100 %
		Prosentase jumlah sasaran dan prosentase penanggulangan bencana	100 %
45	Responsif terhadap perubahan dinamika kebijakan nasional	Jumlah penyelenggaraan Dialog / Audensi	14 kec
46	Proaktif dalam mengantisipasi perkembangan/ perubahan	Jml dokumen RDTRK	1 dokumen

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
	lingkungan strategis		
		Jm dokumen kajian penelitian dan pengembangan	2 dokumen
		Jumlah radio	14 buah
		Jumlah BTS	135 buah
		Jumlah pemegang ijin usaha penyiaran	14 buah

Anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 1.332.831.681.650,- (satu trilyun tiga ratus tigapuluh dua milyar delapan ratus tiga puluh satu juta enam ratus delapanpuluh satu ribu enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Sasaran 17. Terwujudnya sumber PAD baru yang tidak membebani masyarakat

Capaian sasaran Terwujudnya sumber PAD baru yang tidak membebani masyarakat dapat dilihat dari capaian indikator sebagai berikut :

Tabel III.19

Capaian indikator kinerja sasaran terwujudnya sumber PAD baru yang tidak membebani masyarakat

No	Indikator sasaran	Satuan	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Terwujudnya sumber PAD baru yang tidak membebani masyarakat	Rp	3.683.275.000,00	6.183.205.661,00	167,87%

Wujud dari upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah dengan mencoba menggali sumber-sumber baru pendapatan daerah yang tidak membebani masyarakat. Dan untuk saat ini bentuk optimalisasi dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah diluar penerimaan dari pajak dan retribusi yang tidak membebani masyarakat adalah dengan mengoptimalkan Badan Usaha Milik Daerah yang ada di kabupaten Rembang ditambah dengan penanaman modal di Bank Jateng Cabang Rembang sebagai bentuk investasi permanen yang merupakan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dengan nilai capaian kinerja yang telah ditetapkan tercapai 167,87%. Ini tercermin dari nilai perolehan

Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan untuk TA 2014 capaian perolehannya sebesar Rp. 6.183.205.661,00 atau 99,37 dari anggaran sebesar Rp. 6.222.204.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp2.905.570.401,00 dibandingkan realisasi TA 2013 sebesar Rp3.277.635.260,00. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Kabupaten Rembang berasal dari bagian laba atas penyertaan modal pada PD BPR BKK, dan pembagian deviden PT.Bank Jateng Tahun Buku 2014, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2014		%	2013
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
Deviden PT Bank Jateng	2.197.258.000,00	2.197.258.419,00	100,00	1.993.485.515,00
Cash in Bank Jateng	2.254.000.000,00	2.254.000.000,00	100,00	-
PD BPR-BKK Lasem	1.451.631.000,00	1.451.631.973,00	100,00	1.240.649.745,00
PD BPR-BKK Kaliori	280.315.000,00	280.315.269,00	100,00	-
PD Apotek Daerah	39.000.000,00	-	-	43.500.000,00
Jumlah	6.222.204.000,00	6.183.205.661,00	99,37	3.277.635.260,00

Sasaran 18 :Meningkatnya kualitas proses pembelajaran pada semua jenjang pendidikan.

Capaian sasaran meningkatnya kualitas proses pembelajaran pada semua jenjang pendidikan dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut

Tabel III.20

Capaian Indikator kinerja sasaran meningkatnya kualitas proses pembelajaran pada semua jenjang pendidikan

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
1	Angka kelulusan Ujian Nasional SMP/MTs	99.92%	99.37%	103.6
2	Angka kelulusan UN SMA/MA/SMK	90.92%	99.76%	109.72
3	TK/RA/SD/MI Menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	70%	100%	142.86
4	SMP/MTs/SMA/SMK/MA melaksanakan MBS dengan baik	100%	100%	100
	RATA – RATA			114.04

Rata-rata persentase pencapaian target untuk sasaran 18 adalah 114,04 %. Dari empatindikator yang terdapat pada sasaran 18semuatelah mencapai 100% atau lebih. Kalau dibandingkan dengan data pencapaian pada tahun-tahun sebelumnya selalu mengalami

peningkatan. Pada tahun 2012 rata-rata pencapaian sasaran ini adalah 76,87%, Pada tahun 2013 mangalami kenaikan menjadi 94,55% sedangkan tahun 2014 menjadi 114,04%. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran di semua jenjang pendidikan di Kabupaten Rembang berkualitas baik dan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

Kegiatan-kegiatan untuk mencapai sasaran 18 adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Ujian SD/SMP/SMA/SMK
2. Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan MBS di Satuan dikdas
3. Pengembangan Materi Belajar dan Metode Pembelajaran dengan Menggunakan TIK
4. Pengembangan metode belajar dan mengajar dengan menggunakan TIK
5. Bantuan fasilitasi penyelenggaraan UN

Sasaran 19 :Tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi dan bersertifikat profesi

Capaian sasaran Tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi dan bersertifikat profesi dapat dilihat dari indikator sebagai berikut :

Tabel III.21

Capaian indikator kinerja sasaran tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi dan bersertifikat profesi

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
1	Guru SD/MI yang bersertifikat pendidik	70.51%	68.14%	96.64
2	Guru SMP/MTs memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan	95.50%	93.86%	98.28
3	Guru TK/RA yang layak mendidik dengan kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional	49.18%	49.18%	100.00
4	Guru SD/MI memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan	67.37%	83.45%	123.87
5	Guru SMP/MTs bersertifikat pendidik	80.46%	72,12%	89.63
6	Guru SMA/SMK/MAbersertifikat pendidik	65.49%	62.23%	95.02
7	Guru SMA/SMK/MA memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan	97.78%	95.53%	97.49
	RATA – RATA			100.13

Rata-rata pencapaian target pada sasaran 19 adalah 100,13 %. Dari sisi pencapaian kinerja dengan indikator jumlah atau persentase guru yang layak mengajar atau memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan pada semua jenjang

pendidikan di Kabupaten Rembang dapat dilihat telah mencapai 100% bahkan untuk jenjeng TK/RA dan SD/MI melebihi angka 100%. Hal ini berarti bahwa target untuk memenuhi guru pada semua jenjang pendidikan yang mempunyai kualifikasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan telah dicapai.Keberhasilan ini banyak ditunjang oleh adanya keberhasilan program penyetaraan S1 melalui Universitas Terbuka dan adanya program pemberian subsidi kepada guru yang melanjutkan pendidikan ke jenjang S1.

Akan tetapi untuk pencapaian kinerja dengan indikator persentase guru pada semua jenjang pendidikan yang telah bersertifikasi di semua Jenjang masih berada di di bawah 100% dari target yang ada. Bahkan untuk jenjang TK/RA baru 49,18% guru yang memiliki sertifikat pendidika. Masih rendahnya tingkat pencapaian kinerja tersebut disebabkan oleh adanya kuota dari pemerintah pusat untuk pemberian sertifikat pendidik yang menyebabkan tambahan jumlah guru yang mendapatkan sertifikat menjadi terbatas.

Kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran ke 17 adalah:

1. Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik
2. Pembinaan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
3. Pendidikan Lanjutan Bagi pendidik untuk memenuhi standart kualifikasi
4. Pengembangn mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kepandidikan
5. Pengembangan system penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik
6. Peningkatan manajerial kepala SD/SMP/SMA/SMK
7. Penilaian Kinerja Guru dan Pengembangan Keprofesian berkelanjutan
8. Bantuan peningkatan kualifikasi ke S1 pendidik PAUD
9. Bantuan penyelenggaraan pemilihan pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi formal
10. Bantuan pengembangan profesi pendidik formal
11. Bantuan pengelolaan penilaian angka kredit dan sertifikasi pendidik

Sasaran 20 :Terwujudnya penyedia sarana dan prasarana pendidikan yang memadai pada semua jenjang pendidikan

Capaian sasaran terwujudnya penyedia sarana dan prasarana pendidikan yang memadai pada semua jenjang pendidikan dapat terlihat dari indikator sebagai berikut :

Tabel III.22

Capaian indikator kinerja sasaran terwujudnya penyedia sarana dan prasarana pendidikan yang memadai pada semua jenjang pendidikan

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
1	TK/RA memiliki sarana dan prasarana	44%	33,17%	75,39

	belajar/bermain			
2	Meningkatnya jumlah lembaga PAUD dan TK	56%	113.24%	202,21
3	TK/RA menetapkan manajemen sekolah berbasis sekolah	70,00%	100%	142,86
4	Ruang kelas SD/MI sesuai standar	73,95%	69,08%	93,41
5	SD/MI memiliki perpustakaan sesuai standar	54,04%	80,33%	148,65
6	SMP/MTs memiliki Laboratorium IPA dan Komputer	66,95%	44,79%	66,90
7	SD/MI memiliki Laboratorium IPA dan komputer	16,84%	22,54%	133,85
8	SMP/MTs memiliki perpustakaan sesuai standar	90,46%	71,87%	79,85
9	Lembaga kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar yang ditetapkan	70.36%	66,67%	94,80
10	Meningkatnya tenaga pendidik, instruktur atau penguji praktik kursus/pelatihan kelompok belljar, usaha/magang memiliki kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan	87,08%	81,81 %	93,95
11	Lembaga kursus memiliki ijin operasional dari pemerintah	98,00	100%	102,04
12	Lembaga kursus dan lembaga pelatihan terakreditasi	66,76%	40,74%	61,02
	RATA – RATA			107,88

Rata-rata pencapaian target pada sasaran 20 adalah 107,88 %. Keberhasilan pencapaian ini ditunjang oleh adanya komitmen penuh dari pemerintah dengan memberikan dukungan anggaran baik dari pemerintah pusat (melalui DAK bidang pendidikan), pemerintah provinsi (melalui bantuan keuangan provinsi) serta dari Pemerintah Kabupaten Rembang (melalui alokasi anggaran pada APBD) yang cukup untuk penyediaan sarana prasarana bidang pendidikan.Selain itu dukungan sumber daya manusia yang mengelola kegiatan-kegiatan tersebut juga cukup baik sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi efektif dan efisien.

Secara rata-rata sebenarnya sudah melebihi target, tetapi kalau dilihat per indikator masih ada dua indikator yang belum memenuhi target, yaitu indikator keenam, SD/ MI memiliki laboratorium IPA sesuai standar hanya mencapai 66,90 %. Hal ini disebabkan

pembangunan perpustakaan SMP/MTS hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah. Adapun fokus pemerintah saat ini baru pada memperbaiki ruang kelas yang rusak. Semoga pada tahun-tahun mendatang perhatian pemerintah sudah mengarah kepada pembangunan sarana pendudkung pendidikan antara lain perpustakaan dan laboratorium IPA.

Kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran ketiga adalah:

1. Pembangunan sarana dan prasarana bermain
2. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
3. Pembangunan perpustakaan sekolah
4. Bantuan Pengembangan sarana prasarana PAUD Formal
5. Bantuan Pengadaan Alat Bermain di Luar
6. Bantuan Pengadaan alat Bermain di Dalam
7. Bantuan Rehab Ruang Kelas Rusak SD/SDLB
8. Bantuan Rehab Ruang Kelas Rusak SMP/SMPLB
9. Bantuan Pembangunan Ruang Perpustakaan SD/SDLB
10. Pembinaan Pendidikan kursus dan kelembagaan
11. Penyelenggaraan Akreditasi lembaga PNF
12. Penyediaan sarana pendidikan dassar wajib belajar 9 tahun.

Sasaran 21 :Terwujudnya Angka Partisipasi Murni (APM) yang tinggi pada semua jenjang pendidikan

Capaian sasaran Terwujudnya Angka Partisipasi Murni (APM) yang tinggi pada semua jenjang pendidikan dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut *:*

Tabel III.23

Capaian indikatorkinerja sasaran Terwujudnya Angka Partisipasi Murni (APM) yang tinggi pada semua jenjang pendidikan

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
1	APK PAUD	88,50%	84,96%	96,00
2	APK SD/MI	103,98%	101,28%	97,40
3	APK SMP/MTs	98,46%	101,12%	102,70
4	APK SMA/SMK/MA	66,80%	73,3%	109,75
5	APM SMP/MTs	99,22%	77,26%	77,87
6	APM SMA/SMK/MA	51,70%	45,05%	87,14

7	Penduduk usia sekolah yang belum sekolah di SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA menjadi peserta didik program paket A, B dan C	98,55%	35.1%	35,62
8	Angka melek huruf	99,90%	99,65%	99,75
9	Angka melanjutkan SMP/MTs ke SMA/MA/Kejuruan	82,67%	93,83%	113,50
	RATA – RATA			89,63

Rata-rata pencapaian target pada sasaran 21 adalah 89,63 %. Dari kesembilan indikator yang mencapai target hanya tiga indikator. Yaitu APK SMP/MTs, APK SMA,SMK,MA dan angka melanjutkan SMP/MTs ke SMA,MA,SMK. Indikator yang lain belum dapat mencapai target. Indikator yang masih perlu usaha keras untuk mencapainya adalah indikator ketujuh yaitu Penduduk usia sekolah yang belum sekolah di SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA menjadi peserta didik program paket A, B dan C hanya mencapai 35,65%. Kondisi tersebut disebabkan beberapa hal antara lain:

1. Penduduk usia sekolah ada yang bersekolah di pondok pesantren diniyah pagi hari. Hal itu menyebabkan tidak terdata di sekolah formal dan nonformal.
2. Siswa lulusan SMP/MTs ada yang tidak melanjutkan ke jenjang SMA/SMK/MA maupun paket C disebabkan langsung bekerja sebagai nelayan, buruh bangunan dan sebagainya.

Kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran keempat adalah :

1. Penyediaan dana bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD/SDLB Negeri SMP/SMPLB
2. Penyelenggaraan operasional Sekolah Gratis SMP/SMA/SMK Negeri dan swasta
3. Penyelenggaraan operasional SKB Negeri
4. Penyelenggaraan Akreditasi Lembaga PNF
5. Penyelenggaraan paket B Setara SMP
6. Penyelenggaraan paket C Setara SMA
7. Bantuan fasilitasi keaksaraan lanjutan

Sasaran 22 :Tersedianya beasiswa bagi penduduk

Capaian sasaran Tersedianya beasiswa bagi penduduk dapat dilihat indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel III.24

Capaian indikator kinerja sasaran tersedianya beasiswa bagi penduduk

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
1	Angka Putus Sekolah SD	0,01%	0,01%	100
2	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,11%	0,11%	100
3	Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK	0,25%	0,37%	52
4	Penduduk putus sekolah, pengangguran dan dari keluarga pra sejahtera menjadi peserta didik dalam kursus-kursus/ pelatihan/kelompok belajar usaha/magang (%)	37,11%	37%	99.70
	RATA – RATA			99.90

Rata-rata pencapaian target pada sasaran 22 adalah 99,90 %. Ada duaindikator pada sasaran ke 22 yang sudah mencapai target yaitu indikator angka putus sekolah di SD, dan angka putus sekolah di SMP/MTs.

Untuk angka putus sekolah di SMA/SMK masih tinggi. Hal ini memang disebabkan berbagai faktor, antara lain karena tuntutan ekonomi sehingga anak usia SMA/SMK lebih senang bekerja mencari nafkah daripada sekolah.Selain itu ada juga anak SMA/SMK yang keluar dari sekolah formal dan pindah ke sekolah nonformal yaitu pondok pesantren.

Kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran kelima adalah:

1. Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu
2. Bantuan beasiswa siswa SMA/SMK dari keluarga kurang mampu

Sasaran 23 :Meningkatnya kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan

Capaian sasaran Meningkatnya kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel III.25

Capaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
1	Lulusan SMK diterima didunia kerja sesuai dengan keahliannnya	46,67%	30%	64,28
2	Lulusan kursus, pelatihan, magang, kelompok belajar usaha dapat memasuki dunia kerja	45,27%	37.95%	83,83

3	Lulusan program paket C dapat memasuki dunia kerja	45,27%	33,40%	73,78
	RATA – RATA			73,96

Rata-rata pencapaian target pada sasaran 23 adalah 73,96 %. Ketiga indikator pada sasaran ke 23 ini belum mencapai target. Belum tercapainya indikator-indikator ini disebabkan antara lain sedikitnya lapanggan kerja yang membutuhkan keterampilan tertentu, sedangkan para lulusan SMK, paket C, ataupun kursus berprinsip yang penting mendapatkan pekerjaan walauppun tidak sesuai dengan keahliannya. Kalau dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya tahun ini sudah mengalami kenaikan. Tahun lalu pencapaian sasaran ini hanya 71%. Dengan demikian dapat dikatakan sasaran kinerja ke 23 pada tahun 2014 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2013.

Adapun kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran kedua puluh tiga adalah:

1. Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan industri
2. Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan
3. Bantuan Fasilitasi Pengelolaan Bursa Kerja SMK
4. Bantuan fasilitasi Carier Center SMK
5. Bantuan Fasilitasi Bussines Center SMK
6. Bantuan fasilitasi pemasaran tamatan SMK
7. Bantuan kursus kewirausahaan desa
8. Bantuan kelembagaan kursus dan pelatihan

***S**asaran 24 : Tersedianya tenaga kesehatan yang memadai*

Capaian kinerja sasaran tersedianya tenaga kesehatan yang memadai dapat dilihat dari indikator-indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel III.26
Capaian Kinerja Sasaran Tersedianya tenaga medis yang memadai

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN KINERJA (%)
1	Rasio dokter Spesialis per 100.000 penduduk	6	per 100 rb pendd	2,75	per 100 rb pendd	45,83
2	Rasio dokter per 100.000 per penduduk	40	per 100 rb pendd	10,21	per 100 rb pendd	25,53
3	Rasio dokter gigi per 100.000 penduduk	11	per 100 rb pendd	1,62	per 100 rb pendd	14,73

Rata – rata	28,70

Untuk mengetahui pencapaian sasaran tersedianya tenaga medis yang memadai dengan melihat rasio tenaga medis terhadap jumlah penduduk. Adapun tenaga medis tersebut meliputi dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi dimana capaian rata – rata nya adalah 28,70 % (kurang berhasil). Apabila dibandingkan dengan tahun 2013 dimana capaian kinerja adalah 27,67 % pada tahun 2014 sedikit ada peningkatan hal ini berkaitan dengan adanya tambahan dokter spesilais dan dokter umum di Rumah Sakit Dr. R.Soetrasno dimana pada tahun 2014 RSUD dr. R.Soetrasno sudah berstatus BLUD yang mempunyai wewenang untuk mengadakan penambahan tenaga kesehatan yang diperlukan. Namun apabila dilihat dari capaian kinerjanya masih perlu upaya keras hal ini akan sangat berkaitan dengan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam pelayanan kesehatan di Kabupaten Rembang.

Sasaran 25 :Tersedianya obat-obatan yang memadai

Capaian kinerja sasaran tersedianya obat-obatan yang memadai dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel III.26
Capaian Kinerja Sasaran Tersedianya obat-obatan yang memadai

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN KINERJA (%)
1	Ketersediaan obat sesuai kebutuhan	100	%	97,55	%	97,55
2	Pengadaan obat esensial	100	%	95	%	95
3	Katersediaan obat sesuai standar	100	%	95	%	95
Rata – rata						95,85

Untuk pencapaian sasaran ketersediaan obat – obatan yang memadai dapat dilihat dari indikator ketersediaan obat sesuai kebutuhan, Pengadaan obat esensial dan ketersediaan obat sesuai standar bagi fasilitas pelayanan kesehatan baik di Puskesmas Pembantu, Puskesmas, maupun Rumah Sakit, dimana capaian kinerjanya telah mencapai 95,85 %. (berhasil) . Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2013, pada tahun 2014 Sasaran tersedianya obata – obatan yang memadai adalah mangalmi penurunan yaitu 98,00 menjadi 95,85 %. Hal ini berkaitan dengan proses pengadaan obat yang melalui E

katalog, dimana masih ada beberapa item kebutuhan obat yang belum tersedia di daftar e katalog sampai dengan batas waktu yang ditentukan.

Keberhasilan sasaran ketersediaan obat – obatan yang memadai ditunjang dengan adanya Program obat dan perbekalan kesehatan, dengan adanya kegiatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan, peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan, peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan Rumah Sakit, dimana dana pengadaan obat tersebut adalah dari dana alokasi khusus (DAK) , maupun dana dari APBD Kabupaten .

Sasaran 26 :Tersedianya peralatan medis yang memadai

.

Capaian kinerja sasaran tersedianya peralatan medis yang memadai dapat dilihat dari indikator sebagai berikut :

Tabel III.27

Capaian Kinerja Sasaran Tersedianya peralatan medis yang memadai.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN KINERJA (%)
	Ketersediaan alat kesehatan sesuai standar	100	%	62,28	%	62,28
Rata – rata						62,28

Dalam pencapaian sasaran ketersediaan peralatan medis yang memadai dapat dilihat dari indikator ketersediaan alat kesehatan sesuai standart, dimana capaian kinerjanya baru mencapai 62,28 % (cukup berhasil). Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2013 , capaian kinerjanya ada penurunan hal ini berkaitan dengan adanya peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas PONED dan Puskesmas Rawat Inap pada tahun 2014. Upaya yang akan dilakukan dalam rangka pemenuhan ketersediaan alat kesehatan sesuai strandar adalah melalui Program Pengadaan peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan jaringannya, melalui kegiatan Pengadaan peralatan medis dan non medis untuk Puskesmas dan Puskesmas pembantu.

Sasaran 27 : Meningkatnya pengelolaan penyelenggara pelayanan kesehatan

.Capaian kinerja sasaran meningkatnya pengelolaan penyelenggara pelayanan kesehatan dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel III.28

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya

pengelolaan penyelenggara pelayanan kesehatan.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN KINERJA (%)
1	Kasus Kematian Bayi (AKB)	115	ks	125	ks	91,3
2	Kasus Kematian Ibu (AKI)	9	ks	14	ks	44
3	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100	%	100	%	100,00
4	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100	%	100	%	100
5	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit :					
	a. Acute Flacid Paralysis (AFP) per 100.000 penduduk< 15 th	2	per 100 rb pendd < 15 th	0,62	per 100 rb pendd < 15 th	31
	b. Cakupan balita dengan penderita Pneumonia yang ditangani	1.303	balita	16	balita	1,23
	c. Penemuan TB BTA positif (CDR)	70	%	66,4	%	94,86
	d. Angka Kesembuhan TB Paru	85	%	81	%	95,29
	e. Penderita DBD yang ditangani	100	%	100	%	100,00
6	Cakupan kunjungan ibu hamil (K4)	91	%	85,56	%	94,02

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN KINERJA (%)
7	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	80	%	100	%	125
8	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	100	%	94,31	%	94,31
9	Cakupan pelayanan nifas	100	%	90,87	%	90,87
10	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	80	%	100	%	125
11	Cakupan Kunjungan Bayi	90	%	94,59	%	105,1
12	Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	%	100	%	100
13	Cakupan peserta KB aktif	80	%	83,68	%	104,6
14	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	100	%	100	%	100,00
15	Cakupan pelayanan anak balita	85	%	95,58	%	112,45
Rata – rata						89,95

. Secara umum pengelolaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan sudah berhasil yang dapat dilihat dari 19 indikator yang pencapaian indikator kinerja sebesar 89,95 % (berhasil). Apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2013, capaian sasaran pengelolaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada tahun 2014 meningkat dari 86,48 % pada tahun 2013 menjadi 89,92 % pada tahun 2014 . Walaupun sudah ada peningkatan namun masih ada beberapa indikator yang perlu upaya keras dalam pencapaiannya yaitu indikator Kasus Kematian Ibu yang capaiannya hanya 44 % (kurang berhasil) dari target 9 kasus realisasinya adalah 14 kasus kematian ibu. Untuk indikator Kasus kematian Ibu apabila dilihat dari penyebab kematian ibu pada tahun 2014 sebanyak 57,14 % (8 ks) kematian adalah penyebab tidak langsung terhadap kematian ibu dan hanya 42,86 (6 kasus) adalah penyebab langsung kematian ibu. Penyebab – Penyebab tidak langsung tersebut adalah : Suspect TB Paru, Syok Cardiogenic, Decomp / Jantung, Emboli air

ketuban, Illeus dan juga penyebab lain yang tidak bisa dianalisa / tidak termasuk penyebab medis. Sedangkan penyebab langsung terhadap kematian ibu diantaranya adalah : perdarahan dan hipertensi dalam kehamilan..

Indikator lainnya yang perlu upaya keras dalam pencapaiannya adalah cakupan penemuan kasus Acute Flacid Paralysis (AFP / lumpuh layu) dengan capaian 31 %, dimana target yang ditetapkan adalah 2 per 100.000 penduduk < 15 th (target ditemukannaya AFP : 3 kasus) tetapi baru mencapai 0,62 per 100.000 penduduk < 15 th (realisasi ditemukannya AFP : 1 kasus) . Hal ini berkaitan dengan pada bulan Maret 2014 telah dicanangkan bahwa Asia bebas Polio sehingga Survailance AFP di hentikan, selain hal tersebut sampai dengan Desember 2014 di Kabupaten Rembang hanya ditemukan kasus AFP sebanyak 1 kasus.

Indikator cakupan balita dengan pneumonia yang ditangani dimana capaian kinerjanya adalah 1,23 % , dari target balita yang penumonia sebesar 1.303 balita namun hanya 16 balita yang ditemukan pneumonia. Masih rendahnya penemuan kasus penumonia pada balita tersebut disebabkan beberapa hal diantaranya petugas kesehatan kesulitan mendiagnosa kasus penumonia berat dan belum optimalnya pengelolaan program ISPA.

Untuk meningkatkan Pengelolaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Kabupaten Rembang , Upaya yang ditempuh diantaranya adalah dengan :

1. Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas PONED.
2. Peningkatan Konseling pada Pasangan Usia Subur yang berisiko tentang Perencanaan kehamilan.
3. Pelaksanaan Akreditasi Puskesmas .
4. Peningkatan pendidikan dan pelatihan khususnya pada pengelolaan program ISPA dan MTBS .

Sasaran 28 : Meningkatnya pemerataan pelayanan kesehatan

Capaian kinerja sasaran meningkatnya pemerataan pelayanan kesehatan dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut

Tabel III.29

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya pemerataan pelayanan kesehatan

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN KINERJA (%)
1	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota	100	%	100	%	100,00
2	Cakupan kunjungan rawat jalan	15	%	23,07	%	153,81
3	Cakupan kunjungan rawat inap	1,5	%	1,72	%	114,49
Rata – rata						122,77

Untuk melihat sejauh mana pencapaian sasaran meningkatnya pemerataan pelayanan kesehatan , dapat dilihat dari 3 indikator kinerja dimana capaiannya adalah 122,77% (sangat berhasil), Tercapainya indikator meningkatnya pemerataan pelayanan kesehatan dapat dilihat dari cakupan kunjungan rawat jalan dan rawat inap di Puskesmas dimana capaian kinerjanya adalah 153,81 % dan 114,49 % , yang artinya masyarakat telah memanfaatkan Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan dengan jumlah kunjungan baru sebanyak 140.552 kunjungan. . Hal ini tidak terlepas dari Program Pemerintah yaitu adanya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jaminan Kesehatan Rembang Sehat (JKRS) dimana kunjungan rawat jalan di Puskesmas dengan program JKN dan JKRS sebesar 57,39 % dan kunjungan rawat jalan dengan bayar / umum hanya sebesar 42,61 %. Sedangkan untuk kunjungan rawat inap di Puskesmas dari Program JKN dan JKRS sebesar 56,96 % sedangkan yang dari umum / bayar adalah 43,03

Keberhasilan sasaran meningkatnya pemerataan pelayanan kesehatan ini tidak terlepas komitmen bersama stake holder dalam pembangunan kesehatan, diantaranya peningkatan Puskesmas Kaliori dari Puskesmas Rawat Jalan menjadi Puskesmas Rawat Inap. Dan Peningkatan Puskesmas PONED untuk fasilitas persalinan. Selain hal tersebut juga adanya Program Jaminan Kesehatan nasional (JKN) dan Jamkesda. yang merupakan

salah satu Program Empat Pilar Pemerintah Kabupaten Rembang untuk meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan yang merata, bermutu dan terjangkau.

Sasaran 29 : Tersedianya Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin

Capaian kinerja sasaran Tersedianya Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel III.30

Capaian Kinerja Sasaran Tersedianya

Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN KINERJA (%)
1	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100	%	100	%	100
2	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100	%	100	%	100
3	Cakupan penduduk yang menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan pra bayar	100	%	100	%	100
4	Cakupan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin dan masyarakat rentan.	100	%	100	%	100
5	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	100	%	97,47	%	97,47
6	Cakupan Desa Siaga	74,49	%	100	%	134,25
Rata – rata						105,29

Untuk melihat pencapaian sasaran tersedianya Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat miskin dapat dilihat dari indikator cakupan penduduk yang menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan dan cakupan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin dan rentan, dimana capaiannya adalah 105,29 % (sangat berhasil).Keberhasilan ini

berhubungan dengan Program Pemerintah yaitu Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) melalui Jaminan Kesehatan Rembang Sehat yang berlaku bagi Masyarakat miskin yang tidak masuk JKN .

Sasaran 30 :Meningkatnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan masyarakat.

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan masyarakat.dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel III.31
Capaian Kinerja SasaranMeningkatnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan masyarakat.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	% tahun lalu
Jumlah Produk TTG Lokal unggulan yang dipamerkan pada event tingkat nasional	1 paket	1 paket	100 %	100%
Rata-rata			100 %	100%

Sasaran meningkatnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan masyarakat dapat tercapai 100 %. Jumlah tehnologi tepat guna yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat meliputi pemanfaatan SDA dan posyantek aktif dan hasilnya sesuai dengan .sasaran yang telah ditetapkan.

Sasaran 31 : Meningkatnya sarana peribadatan dan pendidikan agama

Tugas pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di segala bidang salah satunya diwujudkan melalui fasilitasi peningkatan sarana peribadatan dan pendidikan agama dengan selalu tunduk pada aturan terkait yaitu permendagri nomor 32 Tahun 2011. Jenis sarana peribadatan dan pendidikan agama yang selama ini disupport oleh pemerintah meliputi Masjid, mushola,Gereja, TPQ, Madin, Madrasah Ibtidaiyah, MTs, dan Pondok Pesantren. Capaian kinerja sasaran Meningkatnya sarana peribadatan dan pendidikan agama sebagaimana tertuang dalam Tabel di bawah ini.

Tabel III.32

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Sarana Peribadatan dan Pendidikan Agama

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	% tahun lalu
Jumlah sarana peribadatan dan pendidikan agama yang dibantu	451 unit	435 unit	96,45%	115,54

Dari target bantuan kepada sarana peribadatan dan pendidikan agama sejumlah 451 unit terealisasi sebesar 435 unit atau mencapai 96,45% (kategori sangat berhasil). Jumlah anggaran yang diperlukan untuk mencapai sasaran ini adalah sebesar Rp..8.694.500.000 dengan realisasi sebesar Rp.7.902.000.000,- melalui belanja tidak langsung APBD Kab. Rembang TA 2014.

Sasaran 32 : ***Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan dan latihan (Diklat) pegawai***.

Capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan dan latihan (Diklat) pegawai dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel III.33
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan dan latihan (Diklat) pegawai.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	% capaian th lalu
Jumlah peserta diklat struktural	42 org	2 org	5%	91,84%
Jumlah PNS yang ikut diklat bendaharawan	80	80	100%	100%
Jumlah PNS yang ikut Evaluasi	80	80	100%	50%
Jumlah PNS yang ikut diklat teknis/fungsional	20 org	82 org	410%	100%
Jumlah pejabat eselon III yang ikut pelatihan motivasi dan pengembangan potensi	200	200	100%	100
Jumlah PNS yang mendapat bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	10	8	80%	100
Rata-rata			132,5%	92,73%

Sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan dan latihan pegawai dapat tercapai sebesar 132,5%. Rata-rata ini didukung oleh 3 indikator yang telah tercapai sebesar 100%, 1 indikator 410% dan 1 indikator 80% dan 4%. Jika dibandingkan dengan rata – rata capaian pada tahun lalu, mengalami adanya peningkatan, yaitu dari 92,73% meningkat menjadi 132,5%. Penyelenggaraan diklat struktural dilaksanakan dengan mengirim peserta ke Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah. Adapun Jumlah peserta diklat strukturalyang semula ditargetkan 42 orang ternyata hanya terealisasi sebesar 2 orang

karena jumlah peserta yang dikirim ke propinsi hanya 2 orang. Dibandingkan dengan pegawai yang harus memiliki pendidikan dan pelatihan, untuk setiap tahunnya jumlah peserta diklatpim masih sangat kurang. Masih banyak pejabat struktural yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan. Adapun diklat teknis/fungsional, pada tahun 2014target yang ditetapkan 20 orang ternyata bisa memberangkatkan 82 orang atau melebihi target yang telah ditetapkan. Sedangkan Jumlah PNS yang mengiikutiprogram Evaluasi, dari yang ditargetkan 80 orang terealisasi 80 orang.

Sasaran 33 :Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelatihan kerja/ketrampilan bagi masyarakat

Capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelatihan kerja/ketrampilan bagi masyarakat dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel III.34
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelatihan kerja/ketrampilan bagi masyarakat

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah dokumen parahita yang tersusun	1 paket	1 paket	100 %
Jumlah posyandu unggulan yang terbentuk	6 kelompok	6 kelompok	100 %
Jumlah kader posyandu yang terlatih	112 kader	112 kader	100%
Jumlah data posyandu yang tersusun	1 buku	1 buku	100 %
Jumlah sarana posyandu yang tersedia	30 unit	30 unit	100%
Jumlah orang tua yang mendapatkan pelatihan tentang metode pengajaran bagi anak yang berkebutuhan khusus	100 orang	100 orang	100 %
Pelatihan ketrampilan bagi penyandang cacat (per tahun)	1	1	100 %
Pelatihan ketrampilan bagi anak terlantar (per tahun/orang)	1 keg/55 org	1	100 %
Pelatihan ketrampilan bagi eks penyakit sosial (per tahun)	1 keg	1	100 %
Pelaksanaan pelatihan ketrampilan bagi keluarga fakir miskin dan wanita rawan sosial ekonomi (kegiatan/tahun)	1 keg	1	100 %
Jumlah desa lokasi penerima program P2M-BG	2 desa	2 desa	100%
Jumlah Produk TTG Lokal unggulan yang dipamerkan pada event tingkat nasional	1 paket	1 paket	1 paket
Jumlah pelaku usaha industri yang dibina atau dilatih	525 orang	526 orang	100%
Rata-rata			100

Untuk melihat capaian sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelatihan kerja / ketrampilan bagi masyarakat dapat dilihat dari 13 indikator yang telah di tetapkan, dengan capaian sebesar 100 % (berhasil). Pencapaian ini sangat berkaitan dengan beberapa program yang dilaksanakan Pemkab Rembang, diantaranya :

1. Program Pemerintah dalam Peningkatan Kapasitas kelembagaan dan jejaring serta peran serta masyarakat dalam mendukung pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak. Kegiatan yang mendukung adalah :
   a. Penguatan kelembagaan pengarustamaan gender
   b. Penguatan Pokjanal Posyandu
   c. Pelatihan Peningkatan anak berkebutuhan khusus (ABK)
   d. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak
2. Program peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan, yang diwujudkan dengan beberapa kegiatan sebagai berikut :
   a. Pemberdayaan masyarakat berprespektif gender (P2MBG)
   b. Pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan
3. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
   a. Pemanfaatan sumber daya lokal dalam usaha industri
   b. Penumbuhan industri di Desa P2MBG
   c. Penganekaragaman dan peningkatan kualitas produk IKM
   d. Pengembangan Industri Kerajinan Kreatif

4. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
   a. Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan anak cacat dan anak nakal
   b. Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
   c. Pelayanan Fasilitasi Bantuan Sosial bagi PMKS

Sasaran 34 : Meningkatnya kualitas prasarana jalan dan jembatan

Perwujudan meningkatnya kualitas prasarana jalan dan jembatan serta terbangunnya jalan poros desa dan kecamatan dilaksanakan pada penyelenggaraan urusan kegiatanDinas Pekerjaan Umum yang meliputi antara lain pembangunan kebinamargaan atau jalan jembatan

Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar, pembangunan infrastruktur pedesaan dan wilayah cepat tumbuh menjadi prasyarat utama dalam mendorong pengembangan wilayah sebagaimana telah menjadi titik berat pilar pertama prioritas

pembangunan daerah yaitu melalui program penyediaan dan peningkatan infrastruktur ke-PU-an.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran melalui indikator persentase panjang jalan dalam kondisi baik sebagaimana tertuang dalam tabel III.39.

Tabel III.35

Capaian Kinerja sasaran Meningkatnya kualitas prasarana jalan dan jembatan

No.	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	persentase panjang jalan dalam kondisi baik	85%	48.18%	56.68
2	prosentase jembatan dalam kondisi baik.	50%	75%	150
	RATA – RATA			103,34

Secara akumulatif prosentase infrastruktur jalan Kabupaten Rembang dalam kondisi baik dimana dari target 85% terealisasi 48,18% atau tercapai sebesar 309,67 km dari luas seluruh jalan Kabupaten Rembang 642,75 km sehingga prosentase capaian sasaran adalah sebesar 56,68 %. Indikator prosentase jembatan dalam kondisi baik capaian kinerjanya 150% dengan realisasi 75 % dari target 50%.

Adapun program yang mendukung kinerja sasaran ini adalah Program Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan Kabupaten, yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan dalam memperlancar mobilitas aktifitas sosial, perekonomian, perdagangan dan kemasyarakatan.

Hasil kegiatan pemeliharaan dan peningkatan jalan dan jembatan antar kecamatan dan desa di Kabupaten Rembang dari tahun 2011 – 2014 adalah sebagai berikut :

Tabel III.36

Pemeliharaan Dan Peningkatan Jalan Dan Jembatan Antar Kecamatan Dan Desa Di Kabupaten Rembang Tahun 2011 – 2014

No	Kegiatan	2011	2012	2013	2014
1	Jalan dan Jembatan Kabupaten				
	- Pemeliharaan Jalan Kabupaten (km)	11,96	1,74	37,48	31,42
	- Peningkatan Jalan Kabupaten (km)	5,71	21,80	45,68	52,14
	- Penggantian Jembatan (unit)	6,00	-	5,00	10,00
	- Pemeliharaan Jembatan (unit)	7,00	2,00	4,00	-
	- Jalan Hotmix (km)	**-**	**-**	**4,72**	**4,50**

Sumber : DPU Kabupaten Rembang, 2014

Kondisi jalan Kabupaten Rembang hingga akhir tahun 2014 secara umum dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.37
Panjang Jalan Kabupaten Tahun 2011-2014

NO	URAIAN	TAHUN			
		2011	2012	2013	2014
1	Panjang jalan kabupaten (km)	642.75	642.75	642.75	642.75
2	Kondisi jalan baik	321.75	351.58	356.88	309.67
3	Kondisi jalan sedang	161.38	149.81	148.71	168.41
4	Kondisi jalan rusak ringan	83.15	65.85	63.65	86.84
5	Kondisi jalan rusak berat	76.47	75.51	73.51	77.83

Sumber : DPU Kabupaten Rembang, 2014

Permasalahan dalam upaya mewujudkan jalan dan jembatan dalam kondisi baik di Kabupaten Rembang kurun waktu 2014 meliputi :

1. Pada ruas jalan tertentu setiap hari selalu terjadi kelebihan beban muatan kendaraan (tonase)terutama jalur wilayah penambangan material apalagi dibarengi dengan intensitas curah hujan yang cukup tinggi juga ikut memperparah rusaknya kondisi jalan dan jembatan.
2. Kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk merasa ikut memiliki, menjaga, memelihara dan melestarikan prasarana fisik yang telah dibangun.
3. Keterbatasan personil dan sarana mobilitas penanganan program ke-PU-an terutama pada jumlah kendaraan, alat berat, perangkat laboratorium, dan perangkat survey perencanaan.

Untuk mengatasai permasalahan-permasalahan tersebut di atas, diupayakan beberapa alternatif pemecahan masalah sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan guna pemasangan rambu batas muatan dan ketegasan dalam penindakan pelanggaran yang terjadi.
2. Pemanfaatan seoptimal mungkin dan penambahan jumlah personil serta sarana mobilitas penanganan program – program kegiatan ke-PU-an.
3. Mengupayakan tumbuh kembang kesadaran masyarakat untuk merasa ikut memiliki, menjaga, memelihara dan melestarikan prasarana fisik yang telah dibangun dengan menyerahkan aset kegiatan ke desa dengan melakukan serah terima melalui NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah).

Sasaran 35 : Meningkatnya kualitas saluran irigasi

Untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas saluran irigasi melalui program optimalisasi sumber daya air, yang diarahkan untuk peningkatan ketersediaan air baku dan mengoperasikan prasarana dan sarana jaringan sumber daya air untuk keperluan irigasi pertanian dan untuk fungsi pengairan lainnya. Hasil optimalisasi sumber daya air di kabupaten Rembang tahun 2011 – 2014 sebagai berikut :

Tabel III.38

Optimalisasi Sumber Daya Air Di Kabupaten Rembang

Tahun 2011 – 2014

No	Kegiatan	2011	2012	2013	2014
1	Rehabilitasi				
	- Bendung (bh)	23	8	12	3
	- Embung (bh)	29	7	10	-
	- Bangunan Air (bh)	16	9	5	23
	- Saluran (m)	6.389,72	10.572,2	16.305,96	5.280,97
2	Pembangunan / Pembuatan				
	- Bendung (bh)	-	-	3	1

	- Embung (bh)	9	-	-	4
	- Bangunan Air (bh)	-	2	1	2
	- Saluran (m)	1.256,142	1.411,96	1.958,56	1.409,68
3	Pemeliharaan Rutin				
	- Bendung (bh)	6	6	17	10
	- Embung (bh)	-	1	12	7
	- Bangunan Air (bh)	1	10	13	4
	- Saluran (m)	443,05	10.732,91	23.255,34	19.638,17
4	Normalisasi Sungai				
	- Normalisasi Sungai (m)	-	17.995,98	13.891,62	4.788,07
	- Bangunan Air (bh)	**-**	**1**	**-**	**2**

Sumber : DPU Kabupaten Rembang, 2014

Capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas saluran irigasi untuk tahun 2014 sebagai berikut :

Tabel III.39

Capaian Kinerja sasaran Meningkatnya kualitas saluran irigasi

No.	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	prosentase peningkatan sawah dengan irigasi teknis	20 %	16,74 %	83,70%
Rata-rata				83,70%

Pemanfaatan sumber daya air untuk irigasi didukung dengan saluran irigasi primer, sekunder dan tersier (saluran yang langsung menuju sawah/ lahan pertanian). Panjang saluran irigasi primer Kabupaten Rembang pada tahun 2014 adalah 130.953 km, sedangkan saluran irigasi sekunder 119.499 km dan saluran irigasi tersier sepanjang 36.588 km. Capaian kinerja indikator prosentase peningkatan sawah dengan irigasi teknis mencapai 83,70% dari target 20% tercapai 16,74%. Hal tersebut diperoleh dari perhitungan luas persawahan yang teraliri irigasi sebesar 11.347,15 ha mengalami peningkatan sebesar 1900 ha pada tahun 2014.

Adapun Permasalahan utama untuk mewujudkan Meningkatnya kualitas saluran irigasi antara lain minimnya curah hujan yang mengakibatkan ketersediaan air baku untuk air irigasi yang tidak mencukupi dan masih kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk merasa ikut memiliki, menjaga, memelihara dan melestarikan prasarana fisik yang telah dibangun. Sedangkan upaya untuk mengatasi hal ini adalah melakukan penghematan penggunaan air dan melaksanakan layanan pemberian air irigasi secara giliran serta mengusulkan anggaran untuk meningkatkan laju pembangunan melebihi laju kerusakan saluran.

Sasaran 36 : Meningkatnya kualitas saluran drainase

Perbaikan kualitas saluran drainase perkotaan merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dasar, pembangunan infrastruktur pedesaan dan wilayah cepat tumbuh. Perbaikan kualitas saluran drainase yang dikelola meliputi proses pembangunan saluran drainase akibat perkembangan wilayah kota dan pemeliharaannya.

Pengukuran capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas saluran drainase melalui indikator-indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel III.40

Capaian Kinerja sasaran Meningkatnya kualitas saluran Drainase

No.	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Prosentase wilayah yang memiliki drainase	50 %	54.00%	108.00%
2	Penilaian adipura	1 piala	0	0 %
Rata-rata				**54.00%**

Indikator persentase wilayah yang memiliki drainase menunjukkan capaian kinerja berhasil yaitu mencapai 108.00 %. Hampir seluruh wilayah perkotaan di Kabupaten Rembang telah terfasilitasi sarana drainase, beberapa wilayah yang belum pada umumnya adalah wilayah pemukiman baru/pengembangan. Indikator penilaian adipura tidak tercapai kinerjanya karena tahun 2014 Kabupaten Rembang

tidak mendapat Piala Adipura. Adapun permasalahan dan kendala yang menyebabkannya adalah sbb:

1. Penambahan grade penilaian dari 74 menjadi 75.
2. Penurunan poin penilaian disebabkan karena pembangunan Alun-Alun kota Rembang yang masih dalam tahap pengerjaan.
3. Kurangnya tingkat kesadaran para pedagang di Pasar Rembang dalam rangka menjaga kebersihan lingkungan pasar.

Sasaran 37 :Terbangunnya sarana dan prasarana yang mendukung terwujudnyasea front city

*Sea front city*dibangun melalui upaya Pengembangan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan berdasarkan pengelolaan sumber daya laut yang berbasis ekosistem dan kelestarian daya dukung lingkungan. Pada tahun 2014 upaya mewujudkan konsepsi ini dikonsentrasikan melalui peningkatan pengelolaan potensi perikanan tangkap dan perikanan budi daya

Capaian kinerja Sasaran yaitu Terbangunya sarana dan prasarana yang mendukung terwujudnya sea front city yang di nilai dari pengukuran beberapa indikator yaitu Jumlah hasil tangkapan ikandan meningkatnya Omset Produksi Hasil Olahan Perikanan, dengan hasil sebagai berikut :

Tabel III.41

Capaian Kinerja Sasaran Terbangunnya sarana dan prasarana yang mendukung terwujudnya *sea front city*

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian%
1	Jumlah hasil tangkapan ikan	kg	63.106.538	60.772.646	96%
2	Prosentase meningkatnya Omset Produksi Hasil Olahan Perikanan	kg	231.198.240	210.024.000	91%
				Rata-rata	93.5 %

Guna mencapai target di tahun 2014 telah diadakan kegiatan berupa batuan sarana dan prasarana untuk perikanan tangkap berupa bantuan alat tangkap dan modernisasi kapal penangkap ikan. Namun demikian ternyata untuk jumlah hasil produksi perikanan laut hanya tercapai 96% dari target dari target senilai 63.106.538 kg - tercapai, 60.772.646 kg. Ada beberapa kemungkinan yang menjadi faktor penyebabnya di antaranya adanya kelangkaan harga BBM beberapa waktu lalu. Hal ini menyebabkan

selama beberapa waktu para nelayan tidak melakukan aktivitasnya untuk menangkap ikan di laut. Hal ini tentu mempengaruhi produksi perikanan laut yang dihasilkan. Sehingga mempengaruhi Omset Produksi Hasil Olahan Perikanansebesar 91 % dari target senilai 231.198.240 kg tercapai 210.024.000 kg.

Berikut ini data produksi penangkapan perikanan laut yang dihasilkan dari pelelangan di 10 TPI yang terdapat di Kabupaten Rembang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel III.42

Produksi dan Raman TPI di Kabupaten Rembang Tahun 2014

No.	TPI/PPI	Produksi (kg)	Raman (Rp.)
1.	TPI Tunggulsari	3.765	105.260.000,-
2.	TPI Tanjungsari	2.067.437	6.553.235.000,-
3.	PPI Tasikagung I	13.084.544	113.984.014.111,-
4.	TPI Tasikagung II	20.086.425	52.026.380.000,-
5.	TPI Pasar Banggi	7.857	78.570.000,-
6.	TPI Pangkalan	6.120	61.200.000,-
7.	TPI Pandangan	17.752	224.350.444,-
8.	TPI Karang Lincak	2.578	26.943.000,-
9.	PPI Karang Anyar	9.105.208	113.169.365.000,-
10.	PPI Sarang	16.390.960	109.997.149.000,-
	J u m l a h	**60.772.646**	**396.226.466.555,-**

Sasaran 38 :Terwujudnya pemberdayaan masyarakat wilayah pesisir.

Terwujudnya pemberdayaan masyarakat wilayah pesisir dapat dilihat dari indikator sebagai berikut :

Tabel III.43
Capaian kinerja Sasaran Terwujudnya pemberdayaan masyarakat wilayah pesisir.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Jumlah kelompok Pokwasmas	Kelompok	2	2	100
2	Jumlah Pelatihan Peningkatkan SDM masyarakat di daerah pesisir dan sekitarnya	Orang	105	105	100
	Capaian Kinerja Sasaran				100

Terkait dengan sasaran terwujudnya pemberdayaan masyarakat pesisir tercapai 100 %, Kegiatanpemberdayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan kegiatan yang perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dengan dukungan dana dari APBD dan APBN dengan memberikan banyak kegiatan yang bersifat dapat langsung dirasakan oleh masyarakat di daerah pesisir sehingga dapat mencapai visi yaitu terwujudnya kelautan dan perikanan Rembang yang unggul dan maju untuk kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan Pengelolaan perikanan, pesisir dan kelautan secara berkelangjutan dengan dukungan dana APBD dan APBN memberikan banyak kegiatan yang bersifat langsung dapat dirasakan oleh masyarakat didaerah pesisir seperti kegiatan usaha garam. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat ini telah dimulai sejak tahun 2010, dimana pada tahun tersebut Kabupaten Rembang telah ditetapkan sebagai Kabupaten minapolitan garam dan sampai saat ini masih terus berlangsung.

Disamping itu juga terpantaunya kerusakan ekosistem pantai, masalah yang berkaitan dengan perijinan kapal serta hukum terkait dengan pendayagunaan sumberdaya laut. Dimana ketelibatan masyarakat terutama yang tergabung dalam (POKMASWAS) sumberdaya kelautan dan perikanan sangat berperan dalam kegiatan tersebut.

Sasaran 39 : Terbangunnya kawasan pengembangan budidaya perikanan kelautan

Tingginya potensi perikanan tangkap di Kabupaten Rembang tidak serta merta mengurangi perhatian pemerintah kabupaten Rembang terhadap pengembangan budidaya perikanan kelautan.Pemanfaatan sumberdaya melalui kosepsi ramah lingkungan dan sustainable/berkelanjutan diyakini mampu menjamin keberlangsungan kehidupan.Salah satunya adalah melalui perikanan budidaya dengan menggunakan bibit ikan unggul. Namun hal akan semakin lengkap jika dibarengi dengan kapasitas pengolahan hasil ikan tangkap maupun budidaya untuk meningkatkan nilai guna maupun ekonomi komoditas.

Hasil pengukuran kinerja sasaran Terbangunnya kawasan pengembangan budidaya perikanan kelautan sebagaimana tertuang dalam Tabel di bawah ini.

Tabel III.44

Capaian Kinerja Sasaran Terbangunnya kawasan pengembangan budidaya perikanan kelautan

No	Indikator Kinerja	Sat	Target	Realisasi	% Capaian
1	Peningkatan Produksi Garam	Ton	117.833	141.943	120%
2	Jumlah Produksi Benih ikan	Ekor	51.819.443.	51.000.000	99,99
3	Jumlah hasil produksi olahan	Kg	231.198.264	210.024.000	90,84
4	Peningkatan produksi perikanan tangkap sebesar 10% per tahun	Kg	63.106.53	60.772.646	96.32
				Capaian Kinerja Sasaran	101.78

Sasaran kawasan pengembangan budidaya perikanan kelautan di dekati dari dua indikator yaitu omset produksi hasil olahan perikanan dan jumlah bibit ikan unggul. Capaian kinerja sasaran ini mencapai 101.78 atau dalam kategori berhasil. Berkaitan dengan misi Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu untuk meningkatkan pengelolaan potensi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Guna mencapai target di tahun 2014 telah diadakan kegiatan berupa batuan sarana dan prasarana untuk perikanan tangkap berupa bantuan alat tangkap dan modernisasi kapal penangkap ikan.

Upaya sebagaimana tersebut di atas terlihat dari data Unit Pengolahan ikan dan Jumlah Produkasi di Kabupaten Rembang pada Tabel di bawah ini.

Tabel III.45
Unit Pengolahan Ikan di Kabupaten Rembang Tahun 2014

No	Jenis Olahan	Unit	Orang
1.	Teri Nasi	23	420
2.	Pemindangan	529	5.188
3.	Pengeringan/Pengasinan	986	11.299
4.	Pedo	48	258
5.	Jambal	31	124
6.	Pengasapan	578	1.172
7.	Terasi	175	486
8.	Kerupuk	194	532

9.	Petis	89	251
10.	Presto	43	123
11.	Tepung Ikan	21	120
12.	Pengalengan	-	-
13.	Pembekuan	24	1.065
14.	Suri Mie	5	252
15.	Lain-lain (aneka produk)	16	669
	JUMLAH	**2.762**	**21.959**

Sasaran 40 :Terwujudnya kawasan wisata bahari

Sejalan dengan konsep *sea front city*, wisata bahari juga mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Rembang. Sasaran Terwujudnya Kawasan Wisata Bahari didekati dari tiga indikator yaitu Terpeliharanya RM Sea Food di Kawasan BBS, Jumlah wisatawan bahari dan Rata-rata Kunjungan wisatawan. Hasil pengukuran indikator-indikator sasaran sebagai berikut :

Tabel III.46

Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya kawasan wisata bahari

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya jml kunjungan wisata (org) 5% per thn)	403,078	1,321,411	327.83%
2	Meningkatnya jml pendapat-an daerah dari obyek wisata (10% per thn)	1,289,771,100	1,325,738,920	102.79%
3	Meningkatnya jml obyek wisata yg memiliki kelengkapan bahan promosi (bh)	5	5	100%
4	Meningkatnya jumlah event pariwisata daerah dalam setahun (kali).	4	4	100%
5	Meningkatnya jml obyek pari wisata & daya tarik wisata yg memiliki sarana prasarana penunjang lengkap (unit)	5	5	100%

6	Meningkatnya rata2 lama tinggal wisatawan (hr) 5%/th	2.12	2.12	100%
Rata-rata				138,44%

Capaian kinerja sasaran Terwujudnya kawasan wisata bahari mencapai 138,44% masuk kategori sangat berhasil. Tingginya capaian kinerja sasaran ini disumbang oleh indikator jumlah wisatawan yang mencapai 1.321.411 orang, jauh melampaui target 403.078 orang dan penerimaan pendapatan dari obyek wisata yang mencapai Rp. 1.325.738.920 (102,79%) dari target Rp. 1.289.771.100.

Pencapaian tersebut tidak terlepas dari pengelolaan wisata Taman Kartini/Dampo Awang Beach yang semakin profesional. Hal ini juga didukung dengan tercapainya semua target pariwisata (100%) seperti jumlah obyek wisata yang memiliki telah kelengkapan bahan promosi sebanyak 5 obyek (100%), event pariwisata daerah dalam setahun sebanyak 4 kali (100%), rata2 lama tinggal wisatawan 2 hari dalam setahun serta semakin banyaknya pilihan tempat penginapan (hotel) di Kabupaten Rembang.

Sasaran 41 :Terselenggaranya pemerintahan daerah yang mempertimbangkan prinsip-prinsip demokrasi serta good and clean governance.

Capaian kinerja sasaran terselenggaranya pemerintahan daerah yang mempertimbangkan prinsip-prinsip demokrasi serta *good and clean governance* dapat dilihat dari indikator sebagai berikut :

Tabel III.47
Capaian Kinerja Sasaran Terselenggaranya pemerintahan daerah yang mempertimbangkan prinsip-prinsip demokrasi serta *good and clean governance*.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti	100%	73,51%	74 %
Opini penilaian BPK	WTP	WDP	82 %
Prosentase SKPD yang menyusun Penetapan kinerja	100%	100.00%	100.00%
Prosentase SKPD yang menyusunLAKIP	100%	100.00%	100.00%
Rata-rata			89 %

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran terselenggaranya pemerintahan daerah yang mempertimbangkan prinsip-prinsip demokrasi serta *good and clean governance*, dapat diketahui bahwa dari 4 indikator kinerja yang diukur terdapat 2 indikator yang sudah terpenuhi targetnya yaitu prosentase SKPD yang menyusun penetapan kinerja dan LAKIP.

Sedangkan Target WTP ditahun 2014 belum dapat terpenuhi. Dalam hal ini Opini BPK RI terhadap pemeriksaan LKPD 2013 masih dalam status WDP (Wajar Dengan Pengecualian). Belum dapat tercapai target WTP dikarenakan masih banyak catatan-catatan pengelolaan keuangan daerah yang perlu dibenahi terutama masalah Aset Daerah.

Adapun tindaklanjut rekomendasi yang selesai baru mencapai 74 %. Kondisi ini disebabkan hal-hal :

1) Terbatasnya sumber daya manusia baik kualitas dan kuantitas di bidang pengawasan internal;
2) Cakupan Obyek Pemeriksaan internal yang cukup banyak.
3) Ada kecenderungan dari beberapa obyek pemeriksaan yang enggan menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan sehingga proses tindak lanjut menjadi tidak bisa maksimal.
4) Tindak lanjut rekomendasi BPK RI banyak yang bersifat kontinuitas terhadap laporan keuangan berikutnya sehingga secara statistik pencapaian target kinerja atas kesesuaian tindak lanjut pada tahun berjalan belum bisa tercapai.
5) Tindak lanjut terhadap temuan di desa-desa berkaitan dengan pajak-pajak yang wajib disetorkan ke Kas Negara/ Daerah masih banyak yang belum terselesaikan

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1) Melaksanakan pemetaan keseluruhan obyek pemeriksaan di Kabupaten Rembang dan Sinkronisasi dengan Aparat Fungsional Intern lainnya dalam rangka menetapkan Rencana Pelaksanaan Pemeriksaan Tahunan serta mengurangi jumlah obyek pemeriksaan untuk tahun berikutnya
2) Peningkatan frekuensi pelaksanaan tindak lanjut dan merencanakan penambahan tim tindak lanjut hasil pemeriksaan Internal.
3) Pemantauan Pelaksanaan tindaklanjut rekomendasi BPK RI secara terus menerus dan Desk pembinaan SKPD atas hasil pemeriksaan BPK RI.
4) Menetapkan *action plan* atas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI dan melaksanakannya sebagai langkah perbaikan kualitas laporan keuangan daerah.
5) Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa secara efektif dalam mengatasi permasalahan di desa-desa melalui pemeriksaan reguler dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Oleh karena itu ke depan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh strategi sebagai berikut :

1) Meningkatkan komitmen dan integritas dalam proses pembinaan penyelenggaraan pemerintahan melalui kegiatan pengawasan dan proses tindak lanjut hasil pemeriksaan
2) Menggunakan skala prioritas dalam pengadaan prasarana dan sarana penunjang pengawasan serta pengadaan pelayanan administrasi perkantoran
3) Melaksanakan pemetaan keseluruhan obyek pemeriksaan di Kabupaten Rembang dan Sinkronisasi dengan Aparat Fungsional Intern lainnya dalam rangka menetapkan Rencana Pelaksanaan Pemeriksaan Tahunan yang proporsional.

Sasaran 42 : Tersedianya sistem dan kelembagaan layanan publik yang efektif dan efisien.

Capaian kinerja sasaran Tersedianya sistem dan kelembagaan layanan publik yang efektif dan efisien dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut :

Tabel III.48
Capaian Kinerja Sasaran Tersedianya sistem dan kelembagaan layanan publik yang efektif dan efisien

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Nilai IKM	83	76,53	92%
Jumlah sertifikasi ISO	10 unit	7 unit	70 %
Cakupan penerbitan KTP/KK	100%	100 %	100,00%
Cakupan penerbitan Akta Catatan Sipil	100%	100 %	100,00 %
Jumlah Koleksi Buku Manual	400 buku	1200 buku	300%
Jumlah Buku Cerita Sejarah yang Dilestarikan	50 buku	10 buku	20%
Jumlah Anggota Perpustakaan	1000 org	114 orang	11.40%
Jumlah Pengunjung/Peminjam Perpustakaan	16.184 0rg	15.330 org	95%
Jumlah Pengurus	10	10	100.00%
Jenis Arsip yang Terdokumentasikan	14.000 berkas	9000 berkas	65.00%
Jumlah Arsip yang Dilestarikan dan Diselamatkan	10.000 berkas	8000 berkas	80.00%
Jumlah Lembaga yang Terbina Kearsipannya	5 SKPD dan 28 Desa	1 SKPD 29 desa	20.00%
Jumlah Arsip yang Diproses Sesuai dengan JRA (Jadwa Retensi Arsip)	10.000 berkas	8000 berkas	80.00%
Jumlah Koleksi Buku Manual	400 buku	1200 buku	300%
Jumlah Arsiparis	2 orang	2 orang	100,00%
		Rata-rata	88 %

Berdasarkan pengukuran kinerja sasaran tersedianya sistem dan kelembagaan layanan publik yang efektif dan efisien mencapai 88 %. Nilai tersebut merupakan akumulasi dari beberapa indikator, diantaranya Indeks Kepuasan Masarakat berdasarkan hasil survey

yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi dan Kepegawaian di 9 (sembilan) unit pelayanan publik mendapat nilai 76 dari target 83. Sedangkan indikator UPP yang mempunyai sertifikat ISO sebanyaki 7 unit dari 10 UPP. Adapun UPP tersebut adalah :

1. RSUD Dr Soetrasno
2. SMKN1 Rembang
3. SMKN 2 Rembang
4. SMKN Sedan
5. SMAN 1 Rembang
6. SMPN 1 Lasem
7. SMPN 2 Rembang

Cakupan penerbitanKTP dan KK, serta penerbitan Akta Catatan Sipil masing-masing mencapai 100 % dan 100% dari target yang direncanakan. Kondisi ini terkait dengan kebijakan pembuatan E-KTP secara nasional.

Dalam hal pelayanan perpustakaan, Jumlah Pengunjung / Peminjam Perpustakaan mencapai 15.330 pengunjung (95,31%) dari target 16.184 pengunjung. Dari sisi sumberdaya manusia, dari target 11 pengurus dapat terealisasi 10 pengurus (90,90 %).

Sementara di bidang perpustakaan jumlah lembaga yang terbina mencapai sebanyak 1 SKPD dari 5 SKPD yang direncanakan. Jumlah arsip yang diproses sesuai dengan jadwal retensi arsip mencapai 8.000 berkas (80%) dari 10.000 berkas, dan jumlah arsiparis mencapai 100% dari yang ditargetkan 2 orang.

Kedepan yang perlu ditingkatkan dalam perbaikan sistem dan kelembagaan layanan publik perlu menyusun adanya standar pelayanan publik di masing-masing UPP serta melaksanakan survey kepuasan masyarakat secara kontinyu.

Sasaran 43 :Tersedianya sistem informasi pembangunan yang memadai dan peka terhadap perubahan.

Capaian kinerja sasaran Tersedianya sistem informasi pembangunan yang memadai dan peka terhadap perubahan dapat diketahui dari indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel III.49

Capaian Kinerja Sasaran Tersedianya sistem informasi pembangunan yang memadai dan peka terhadap perubahan.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%

Jumlah media massa baik cetak & elektronik yg mempublikasikan keg pemerintahan dan pembangunan daerah	7000 exp	7000 exp	100.00%
Tingkat penyebaran informasi publik dan fasilitasi pers	1	80%	80.00%
Jumlah website milik Pemda yang dapat diakses oleh masyarakat	14	14	100.00%
Media msssa sepeti majalah, radio dan televisi;	1	1	100.00%
Media baru seperti website (media online)	1	1	100.00%
Media tradisional seperti petunjuk rakyat	1	1	100.00%
Media Interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya dan/atau	1	1	100.00%
Media luar ruang seperti media buletin,leflet,booklet,brosur,spanduk dan baliho	1	1	100.00%
		Rata-rata	97,5 %

Dari pencapaian target sasaran tersedianya sistem informasi pembangunan yang memadai dan peka terhadap perubahan, diketahui bahwa jumlah media massa baik cetak & elektronik yg mempublikasikan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah tercapai 100% dari 7.000 eksempelar (kategori berhasil). Tingkat penyebaran informasi publik dan fasilitasi pers dari target 100% terealisasi sebesar 80% .

Secara kuantitatif jumlah website milik pemda yang dapat diakses oleh masyarakat dari target 14 domainterealisasi 14domain dengan capaian 100% (kategori berhasil).

Keberadaan website milik pemda tersebut diharapkan dapat berdaya guna untuk mencapai tujuanpengembangan tata kelola pemerintahan yang baik, responsif terhadap perkembangan dan perubahan dinamika kebijakan dan pro aktif dalam mengantisipasi perkembangan global, ditopang oleh tehnologi yang memadai.

Penyampaian informasi melalui media massa sepeti majalah bangkit, radio Citra Bahari FM dan televisi serta melalui media luar ruang seperti media buletin,leaflet,booklet,brosur,spanduk dan baliho juga telah sesuai target yang direncanakan dengan capaian 100% (kategori berhasil). Informasi melalui media lainnya (sarasehan, ceramah, diskusi, lokakarya juga dapat terlaksana sesuai target yang ditetapkan.

Secara akumulatif pencapaian target sasaran tersedianya sistem informasi pembangunan yang memadai dan peka terhadap perubahan mencapai 97,5% (kategori berhasil).

Sasaran 44 :Responsif terhadap perkembangan situasi.

Capaian kinerja sasaran responsif terhadap perkembangan situasi dapat dilihat dari capaian indikator sebagai berikut :

Tabel III.50

Capaian Kinerja Sasaran Responsif terhadap perkembangan situasi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase terbentuknya masyarakat sadar bencana	100 %	96,23 %	96,23 %
Prosentase pelatihan penanggulangan Bencana	100 %	97,51 %	97,51 %
Prosentase Tim Penanggulangan Bencana yang terdidik	100 %	93,04 %	93,04 %
Prosentase jumlah korban yang mendapat bantuan	100 %	76,16 %	76,16 %
Prosentase jumlah sasaran dan prosentase penanggulangan bencana	100 %	98,55 %	98,55 %
Rata-rata			92,29 %

Sasaran Responsif terhadap perkembangan situasi capaian kinerjanya adalah 92,29 % (berhasil). Kondisi inididasarkan dari pada tertanganinya kejadian bencana di 14 kecamatan sesuai target dan terlaksananya pelatihan teknis tim penanggulangan bencana. Adapun untuk lebih meningkatkan capaian sasaran responsif terhadap perkembangan situasi telah dilakukan berbagai upaya diantaranya :

1. Pembentukan Tim Penyusun Draf Regulasi / peraturan yang terkait dalam pemberian bantuan korban bencana yang berupa Peraturan Daerah , Peraturan Bupati , SOP.
2. Pengkajian kejadian bencana yang melibatkan berbagai pihak (Dinas / Instansi terkait dan stake holder).
3. Peningkatan dan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui pelatihan penanggulangan bencana .

Sasaran 45 :Responsif terhadap perubahan dinamika kebijakan nasional.

Capaian kinerja sasaran responsif terhadap perubahan dinamika kebijakan nasional dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel III.51
Capaian Kinerja Sasaran Responsif terhadap perubahan dinamika kebijakan nasional.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah penyelenggaraan Dialog / Audensi	14 kec	14 kec	100 %
Rata-rata			100 %

Capaian kinerja sasaran responsif terhadap perubahan dinamika kebijakan nasional. Tingkat kepuasan layanan masyarakat atas pelayanan yang diberikan melalui indikator jumlah

penyelenggaraan Dialog / Audensi dari target 14 kecamatan terealisasi 14 kecamatan adalah sebesar 100% (sangat berhasil).

Sasaran 46 : Proaktif dalam mengantisipasi perkembangan/ perubahan lingkungan strategis

Capaian kinerja sasaran proaktif dalam mengantisipasi perkembangan/ perubahan lingkungan strategis dapat dikategorikan **berhasil** dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel III.52
Capaian Kinerja Sasaran Proaktif dalam mengantisipasi perkembangan/ perubahan lingkungan strategis

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jml dokumen RDTRK	1 dokumen	1 dokumen	100
Jm dokumen kajian penelitian dan pengembangan	2 dokumen	6 dokumen	300
Jumlah radio	14 buah	14 buah	100
Jumlah BTS	135 buah	138 buah	102,22%
Jumlah pemegang ijin usaha penyiaran	14 buah	14 buah	100%
RATA – RATA			117,04%

Berdasarkan table diatas Capaian kinerja sasaran proaktif dalam mengantisipasi perkembangan/ perubahan lingkungan strategis adalah **117,04%.** Capaian tersebut tediri dari beberapa indikator yaitu jumlah dokumen kajian penelitian dan pengembangan dari target 2 dokumen terealisasi **6 dokumen** sehingga dinyatakan dalam kategori berhasil. Dokumen tersebut adalah KLHS RDTR Kecamatan Kragan, Sarang, Pamotan, Sulang, Kaliori dan Kajian potensi ekonomi Kec. Lasem berbasis keunggulan local. Untuk jumlah dokumen RDTRK dari target **1 dokumen** terealisasi 1 dokumen Naskah Akademik RDTRK.

Teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu isu utama perubahan paradigma global karena dapat meningkatkan efisiensi, penghematan waktu dan rantai pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu teknologi informasi dan komunikasi mengisyartkan peran penting pemerintah dalam pembinaan akses informasi yang diterima masyarakat. Pemerintah Kabupaten Rembang mengantisipasi hal tersebut ada beberapa cara yaitu kerjasama bidang informasi dan komunikasi, pengembangan kapasitas sarana dan prasarana komunikasi, informasi dan media massa. Ketersediaan BTS sebagai pendukung coverage telekomunikasi seluler yang ditargetkan 135 BTS dan realisasi sebanyak 138 BTS sehingga capaiannya 102,22%.

Di bidang penyiaran radio broadcasting, jumlah radio penyiaran ditargetkan tersedia 14 stasiun dan semua memiliki ijin usaha penyiaran, sedangkan capaian realisasinya berhasil dengan tersedianya 14 stasiun radio dan jumlah ijin usaha penyiaran yang terdaftar sebesar 14 ijin usaha penyiaran.

A. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Kinerja Keuangan Daerah selama Tahun Anggaran 2014 dapat terlihat dari laporan realisasi APBD Tahun Anggaran 2014 unaudited. Secara garis besar kinerja keuangan daerah akan dikaji melalui sisi pendapatan dan sisi belanja sebagai berikut :

1. PENDAPATAN

Pendapatan Pemerintah Kabupaten Rembang pada tahun 2014 meliputi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Pada tahun anggaran 2014 jumlah anggaran Pendapatan adalah sebesar Rp1.384.690.314.469,00 dengan realisasi mencapai Rp1.329.587.756.593,27 atau sebesar 96,02% dari target yang dianggarkan. Pendapatan Asli Daerah mencapai sebesar Rp165.530.925.487,27 atau 104,07%. Pendapatan Transfer sebesar Rp1.021.258.285.387,00 atau sebesar 94,99%. Dan Lain-lain Pendapatan yang Sah mencapai sebesar Rp142.798.545.719,00 atau 94,86%. Hal tersebut ditunjukkan dalam capaian kinerja komponen Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2014 berikut:

Grafik
Capaian Kinerja Komponen Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2014

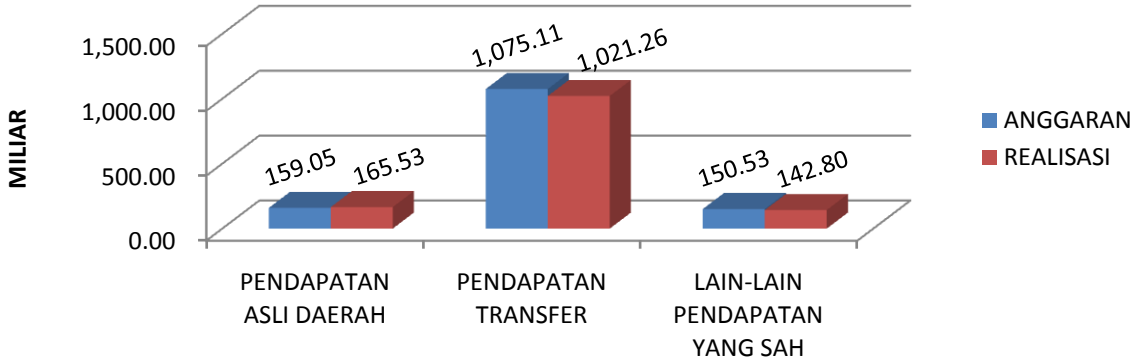

Sumber : Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2014 (unaudited)

Sementara dari proporsi realisasi pendapatan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rembang masih pada prosentase yang terbawah dibandingkan pendapatan transfer dan Lain – lain pendapatan yang sah yaitu sebesar 10,74%

Grafik 3.2
Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2014

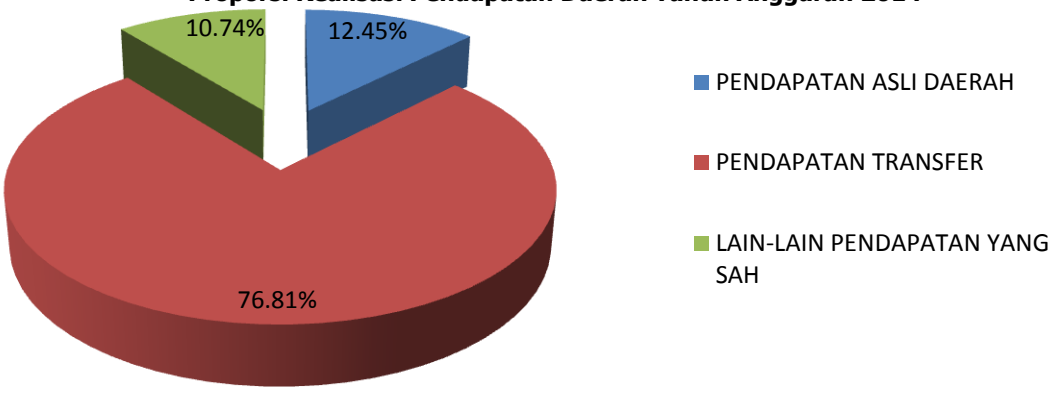

Sumber : Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2014 (unaudited)

Pada tahun anggaran 2014 anggaran Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar Rp159.050.536.339,00 sedangkan realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp165.530.925.487,27 atau menunjukkan pencapaian kinerja sebesar 104,07% dari anggaran yang ditetapkan, dengan rincian Pajak Daerah menyumbang Rp38.643.241.316,00 atau (23,35%), Retribusi Daerah menyumbangkan Rp41.529.546.666,00 atau (25,09%), Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan menyumbangkan Rp6.183.205.661,00atau (3,74%), dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah menyumbangkan Rp79.174.931.844,27 atau (47,83%),

Grafik 3.3
Proporsi Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2014

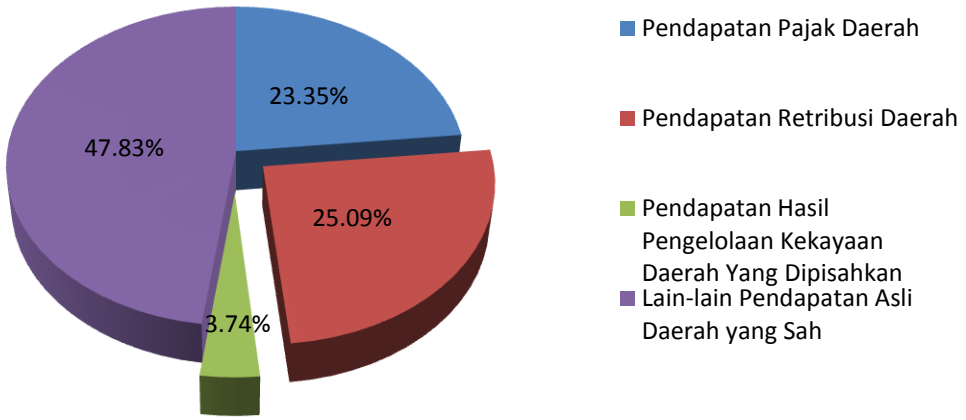

Sumber : Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2014 (unaudited)

Secara keseluruhan pencapaian kinerja Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber kemampuan fiskal Pemerintah Kabupaten Rembang

selama Tahun anggaran 2014 atas perbandingannya dengan anggaran ditunjukkan dalam grafik sebagai berikut :

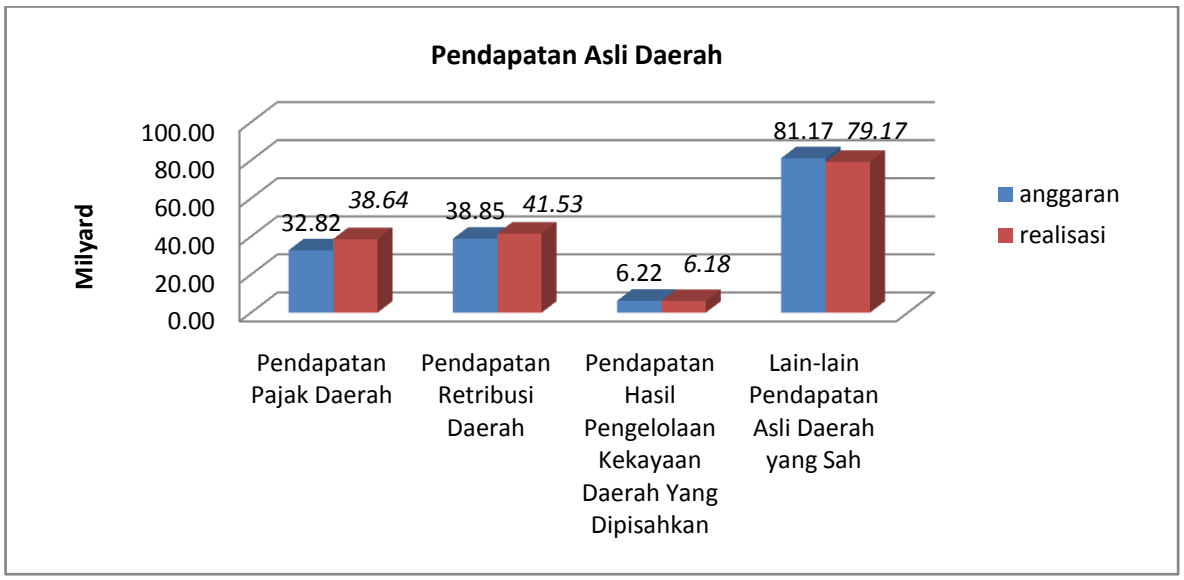

Sumber : Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2014 (unaudited)

Dari grafik di atas tampak bahwa anggaran pendapatan pajak daerah adalah sebesar Rp32.816.917.000,00 tercapai realisasi sebesar Rp38.643.241.316,00 atau mencapai kinerja 117,75%. Anggaran pendapatan retribusi daerah adalah sebesar Rp38.845.073.000,00 tercapai realisasi Rp41.529.546.666,00 atau mencapai kinerja 106,91%. Anggaran pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah sebesar Rp6.222.204.000,00 dengan realisasi Rp6.183.205.661,00 atau mencapai kinerja 99,37%. Sedangkan anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah sebesar Rp81.166.342.339,00 dengan realisasi Rp79.174.931.844,27 atau mencapai kinerja 97,55%.

Pendapatan transfer tercapai realisasi sebesar Rp1.021.258.285.387,00 atau menunjukkan pencapaian kinerja sebesar 94,99% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.075.105.360.130,00. Kontribusi komponen pendapatan transfer di tahun anggaran 2014 mencakup atas transfer pemerintah pusat - dana perimbangan sebesar Rp775.863.183.184,00 atau (75,97%), Transfer pemerintah pusat-lainnya sebesar Rp172.399.233.000,00 atau (16,88%), dan transfer pemerintah propinsi sebesar Rp72.995.869.203,00 atau (7,15%),

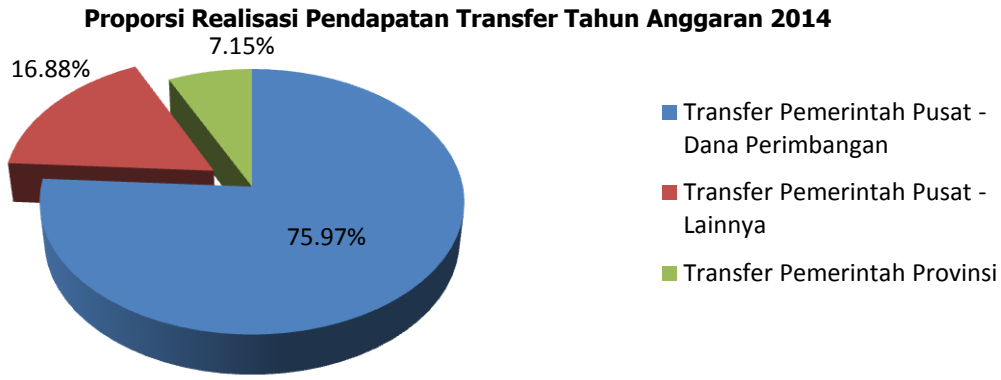

Sumber : Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2014 (unaudited)

Pada tahun anggaran 2014 lain-lain pendapatan yang sah tercapai realisasinya sebesar Rp142.798.545.719,00 atau menunjukkan pencapaian kinerja sebesar 94,86% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp150.534.418.000,00. Kontribusi komponen lain-lain pendapatan yang sah di tahun anggaran 2014 terdiri dari Pendapatan Hibah sebesar Rp541.721.500,00 dan Pendapatan Lainnya sebesar Rp142.256.824.219,00.

2. BELANJA

Pemerintah Kabupaten Rembang pada Tahun anggaran 2014 menganggarkan belanja daerah sebesar Rp1.540.612.631.176,00, dan kemudian direalisasikan sebesar Rp1.275.908.646.560,06 atau 82,82%. Realisasi belanja tahun anggaran 2014 untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung masing-masing sebesar Rp.710.279.611.649,00 dan Rp.565.629.034.911,06,00 seperti ditunjukkan dalam table realisasi belanja per 31 Desember 2014 sesuai Permendagri no 13 tahun 2006 sebagai berikut berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi
BELANJA TIDAK LANGSUNG		
Belanja Pegawai	771.430.254.850,00	632.725.569.032,00
Belanja Bunga	37.000.000,00	14.340.417,00
Belanja Hibah	45.093.345.800,00	39.727.269.200,00
Belanja Bantuan Sosial	4.313.525.000,00	2.552.273.000,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	39.319.500.000,00	35.163.035.000,00
Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	97.125.000,00
Jumlah	**861.193.625.650,00**	**710.279.611.649,00**

Uraian	Anggaran	Realisasi
BELANJA LANGSUNG		
Belanja Pegawai	94.399.646.200,00	86.882.064.160,00
Belanja Barang dan Jasa	363.818.366.438,00	327.292.056.989,06
Belanja Modal	221.200.992.888,00	151.454.913.762,00
Jumlah	**679.419.005.526,00**	**565.629.034.911,06**

Proporsi realisasi belanja per 31 Desember 2014, untuk belanja tidak langsung sebesar 44,33% dengan belanja langsung sebesar 55,67%

Perbandingan Realisasi Belanja Langsung Dan Tidak Langsung
Tahun Anggaran 2014

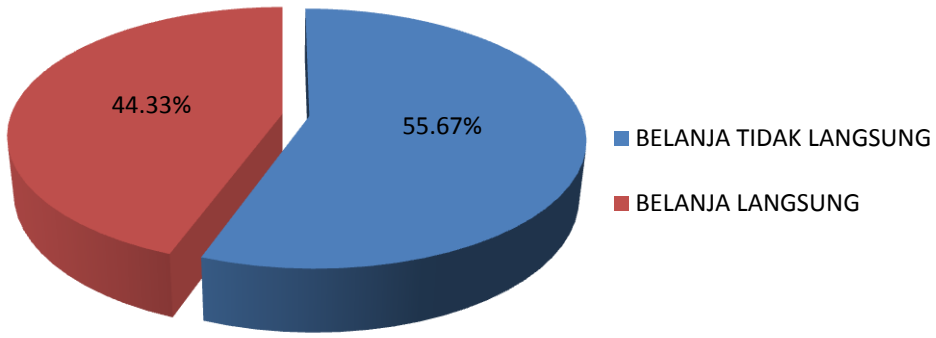

Sumber : Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2014 (unaudited)

Selain pengelompokan belanja seperti di atas, berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan, (SAP) belanja daerah dapat dikelompokkan ke dalam jenis belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga. Pada tahun 2014, Belanja operasi direalisasikan sebesar Rp1.124.356.607.798,06 dari anggaran sebesar Rp.1.318.411.638.288,00 atau (85,28 %), Belanja modal Rp151.454.913.762,00 dari anggaran sebesar Rp.221.200.992.888,00 atau (68,47 %), sedangkan belanja tidak terduga Rp97.125.000,00 dari anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,00 atau (9,71 %).

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
BELANJA OPERASI			
Belanja Pegawai	865.829.901.050,00	719.607.633.192,00	83,11
Belanja Barang	363.818.366.438,00	327.292.056.989,06	89,96
Belanja Bunga	37.000.000,00	14.340.417,00	38,76
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Hibah	45.093.345.800,00	39.727.269.200,00	88,10
Belanja Bantuan Sosial	4.313.525.000,00	2.552.273.000,00	59,17
Belanja Bantuan Keuangan	39.319.500.000,00	35.163.035.000,00	89,43
Jumlah	***1.318.411.638.288,00***	***1.124.356.607.798,06***	***85,28***
BELANJA MODAL			
Belanja Tanah	525.450.000,00	521.915.000,00	99,33
Belanja Peralatan dan Mesin	53.950.652.250,00	30.362.332.519,00	56,28
Belanja Bangunan dan Gedung	74.060.400.050,00	44.216.272.531,00	59,70
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	80.524.453.588,00	74.413.567.612,00	92,41
Belanja Aset Tetap Lainnya	12.140.037.000,00	1.940.826.100,00	15,99
Jumlah	***221.200.992.888,00***	***151.454.913.762,00***	***68,47***
BELANJA TAK TERDUGA	1.000.000.000,00	97.125.000,00	9,71
Belanja Tak Terduga	1.000.000.000,00	97.125.000,00	9,71
Jumlah	***1.000.000.000,00***	***97.125.000,00***	***9,71***
Total Belanja	**1.540.612.631.176,00**	**1.275.908.646.560,06**	**82,82**

Sumber : Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2014 (unaudited)

Proporsi antara belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Belanja Operasi, Modal dan Tak Terduga

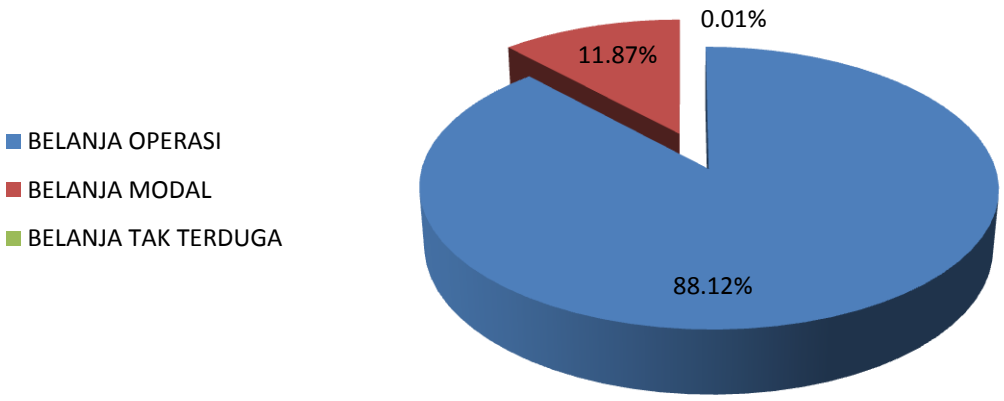

Sumber : Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2014 (unaudited)

Perbandingan kinerja pos-pos belanja daerah tahun anggaran tahun 2014 yang ditunjukkan dalam grafik di atas mencakup Realisasi belanja pegawai sebesar Rp719.607.633.192,00 atau 56,40% dari keseluruhan belanja daerah, terdiri dari realisasi belanja pegawai belanja langsung sebesar Rp86.882.064.160,00 dan realisasi belanja pegawai

belanja tidak langsung sebesar Rp632.725.569.032,00. Realisasi belanja modal sebesar Rp151.454.913.762,00 atau 11,87% dari keseluruhan belanja daerah. Realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp327.292.056.989,06 atau 25,65% dari keseluruhan belanja daerah. Jumlah realisasi belanja bunga Rp14.340.417,00, belanja bantuan sosial Rp2.552.273.000,00, Belanja bantuan keuangan Rp35.163.035.000,00, belanja tidak terduga Rp97.125.000,00, dan belanja hibah sebesar Rp39.727.269.200,00 atau 6,08% dari keseluruhan belanja daerah, sebagaimana ditunjukkan gambar berikut:

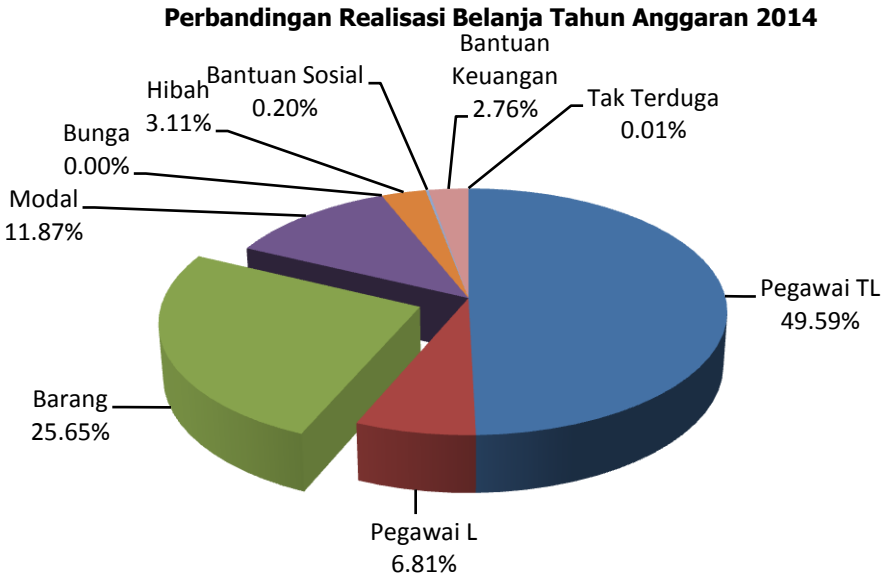

Sumber : Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2014 (unaudited)

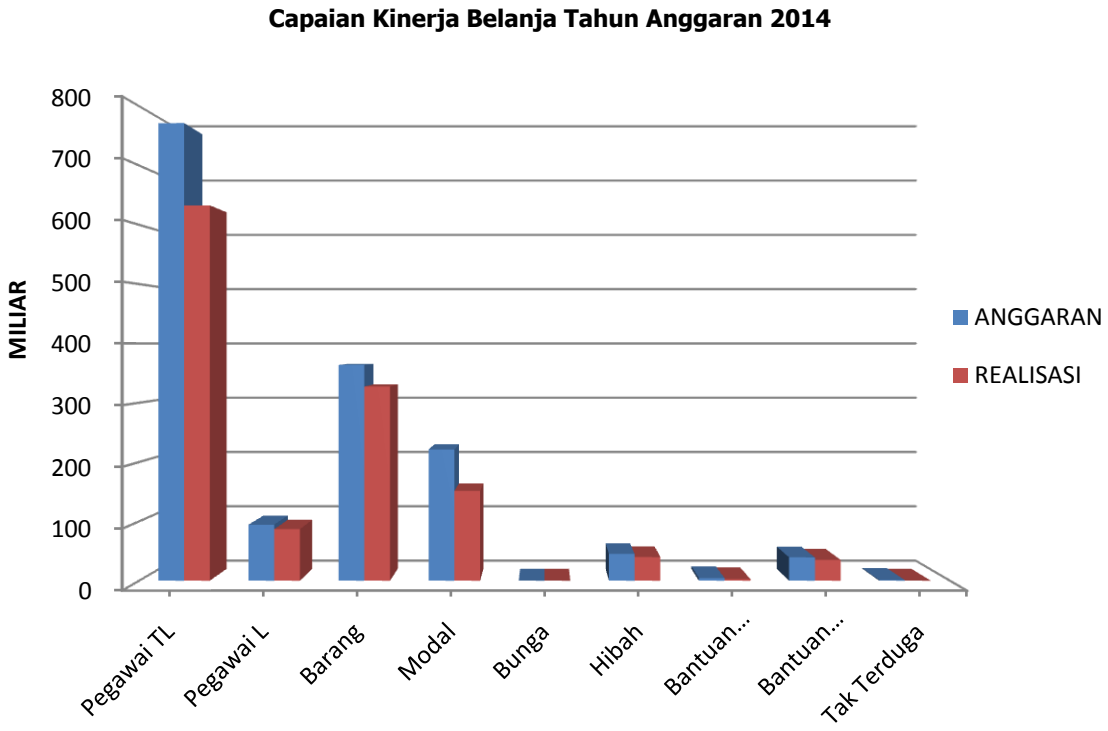

Sumber : Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2014 (unaudited)

3. PEMBIAYAAN

Pada tahun anggaran 2014 jumlah anggaran penerimaan pembiayaan daerah pada pos penggunaan (SiLPA) adalah sebesar Rp167.086.316.707,00 sedangkan realisasinya mencapai Rp167.066.868.874,34 atau menunjukkan kinerja sebesar 99,99% dari yang dianggarkan. Pengeluaran Pembiayaan daerah pada pos penyertaan modal pemerintah daerah dianggarkan sebesar Rp11.109.000.000,00 dengan realisasi Rp11.109.000.000,00 atau 100%, sedangkan pembayaran pokok utang dianggarkan sebesar Rp55.000.000,00 dengan realisasi Rp53.450.842,00 atau 97,18% dibandingkan anggaran 2014.

Secara umum Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, sebelum dilakukan pemeriksaan

Laporan Keuangan Daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan adalah sebagai berikut :

URAIAN	ANGGARAN 2014	REALISASI 2014	%	REALISASI 2013
PENDAPATAN	**1.384.690.314.469**	**1.329.587.756.593,27**	**96,02**	**1.165.433.076.124,01**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	159.050.536.339,00	165.530.925.487,27	104,07	126.808.083.812,01
Pendapatan Pajak Daerah	32.816.917.000,00	38.643.241.316,00	117,75	34.067.851.784,00
Pendapatan Retribusi Daerah	38.845.073.000,00	41.529.546.666,00	106,91	30.924.102.833,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.222.204.000,00	6.183.205.661,00	99,37	3.277.635.260,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	81.166.342.339,00	79.174.931.844,27	97,55	58.538.493.935,01
PENDAPATAN TRANSFER	1.075.105.360.130,00	1.021.258.285.387,00	94,99	922.453.403.781,00
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	790.115.861.651,00	775.863.183.184,00	98,20	716.783.784.793,00
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	232.816.985.000,00	172.399.233.000,00	74,05	150.500.902.000,00
Transfer Pemerintah Provinsi	52.172.513.479,00	72.995.869.203,00	139,91	55.168.716.988,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	150.534.418.000,00	142.798.545.719,00	94,86	116.171.588.531,00
Pendapatan Hibah	709.270.000,00	541.721.500,00	76,38	74.995.000,00
Pendapatan Lainnya	149.825.148.000,00	142.256.824.219,00	94,95	116.096.593.531,00
BELANJA	**1.540.612.631.176**	**1.275.908.646.560,06**	**82,82**	**1.060.648.437.287,84**
BELANJA OPERASI	1.318.411.638.288,00	1.124.356.607.798,06	85,28	924.823.734.943,84
Belanja Pegawai	865.829.901.050,00	719.607.633.192,00	83,11	633.858.409.334,00
Belanja Barang	363.818.366.438,00	327.292.056.989,06	89,96	213.592.815.850,84
Belanja Bunga	37.000.000,00	14.340.417,00	38,76	20.708.119,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Belanja Hibah	45.093.345.800,00	39.727.269.200,00	88,10	42.862.476.900,00
Belanja Bantuan Sosial	4.313.525.000,00	2.552.273.000,00	59,17	1.800.500.000,00
Belanja Bantuan Keuangan	39.319.500.000,00	35.163.035.000,00	89,43	32.688.824.740,00
BELANJA MODAL	221.200.992.888,00	151.454.913.762,00	68,47	135.447.797.344,00
Belanja Tanah	525.450.000,00	521.915.000,00	99,33	24.500.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin	53.950.652.250,00	30.362.332.519,00	56,28	35.674.744.729,00
Belanja Bangunan dan Gedung	74.060.400.050,00	44.216.272.531,00	59,70	25.356.672.785,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	80.524.453.588,00	74.413.567.612,00	92,41	70.124.950.600,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	12.140.037.000,00	1.940.826.100,00	15,99	4.266.929.230,00
BELANJA TAK TERDUGA	1.000.000.000,00	97.125.000,00	9,71	376.905.000,00

URAIAN	ANGGARAN 2014	REALISASI 2014	%	REALISASI 2013
Belanja Tak Terduga	1.000.000.000,00	97.125.000,00	9,71	376.905.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)	**(155.922.316.707)**	**53.679.110.033,21**	**(34,43)**	**104.784.638.836,17**
PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN DAERAH	167.086.316.707,00	167.066.868.874,34	99,99	67.555.128.713,17
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	167.086.316.707,00	167.066.868.874,34	99,99	67.555.128.713,17
PENGELUARAN DAERAH	11.164.000.000,00	11.162.450.842,00	99,99	5.253.450.842,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	11.109.000.000,00	11.109.000.000,00	100,00	5.200.000.000,00
Pembayaran Pokok Utang	55.000.000,00	53.450.842,00	97,18	53.450.842,00
Pembiyaan Netto	155.922.316.707,00	155.904.418.032,34	99,99	62.301.677.871,17
SILPA	**0,00**	**209.583.528.065,55**	**0,00**	**167.086.316.707,34**

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalanpelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Tujuan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk **terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.**

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2014, berdasarkan pada hasil pengukuran, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, yang mencakup penetapan kinerja tahun 2014, pengukuran pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010 – 2015.

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Peraturan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahmaka kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dari pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan melalui media perjanjian kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang. Pengukuran yang dimaksud tersebut merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2014 .

Sedangkan tahapan dalam pengukuran capaian kinerja dilakukan melalui proses pengumpulan data dan analisa data yaitu :

1. Pengumpulan data

   Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang merupakan indikator outcame dari sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Rembang dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2014. Indikator tersebut diperoleh melalui dua sumber yaitu data internal yang berasal dari sistem informasi / pelaporan dari masing – masing SKPD di

Kabupaten Rembang dan data eksternal yang berasal dari luar instansi / lintas sektoral.

2. Analisa data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode Kinerja Instansi Pemerintah yang meliputi ikhtisar pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Yang selanjutnya dilakukan penghitungan capaian kinerja untuk pengukuran pencapaian sasaran. Adapun untuk penghitungan capaian kinerja digunakan rumus sebagai berikut ;

1). Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik, maka menggunakan rumus sebagai berikut ;

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian = Realisasi Kinerja Indikator / Rencana Kinerja Indikator X100%

2) a

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian = (Rencana – (Realisasi – Rencana)) / Rencana X 100%

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dari program dan kegiatan serta indikator makro yang diberlakukan nilaidisertai makna dari nilai tersebut yaitu:

- 80 – 100 = Baik
- 51 – 79 = Cukup
- < 50 = Kurang

B. CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

Kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2014 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah dilaksanakan. Hasil pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang pada Tahun 2014 adalah sebagaimana tersebut pada tabel di bawah ini :

Tabel III.1

Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2014

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)

1	2	3	4	5	6
1	Penyederhanaan prosedur pelayanan dan perijinan investasi	Tingkat penyelesaian perijinan terhadap waktu yang ditentukan	100 %	100%	100
2	Promosi peluang investasi	Jumlah pameran investasi	3 kali	3 kali	100
		Jumlah usaha mikro kecil dan menengah yang terfasilitasi dalam kegiatan promosi perdagangan di luar daerah	14 UMKM	12 UMKM	86
		Jumlah usaha mikro kecil dan menengah yang terfasilitasi dalam kegiatan promosi perdagangan didalam daerah	40	120	300
3	Terjaminnya keamanan berusaha	Jumlah perusahaan yang terdaftar bergerak di sektor perdagangan	200	274	137
		Jumlah perusahaan yang terdaftar bergerak di sektor industri	54	70	130
		Jumlah perusahaan yang terdaftar bergerak di luar sektor perdagangan dan industri	179	304	170
4	Tersedianya infrastruktur yang memadai	Jumlah industri skala besar	6 buah	10 buah	166,67
		Jumlah klaster industri	9 buah	8 buah	88,89
		Rekomendasi BKPRD terhadap perizinan pemanfaatan ruang	9 buah	20 buah	222,22
		Jumlah usaha perdagangan di Kabupaten Rembang	5 buah	9 buah	180
		Jumlah pembangunan sarana perdagangan	370 unit	400 unit	108,11
		Jumlah sentra industry	9 buah	15 buah	166,67
		Jumlah klaster industry	9 buah	15 buah	166,67
		Prosentase jumlah kios pasar dibandingkan jumlah pedagang pasar	15,7 %	16,04 %	102,17
		Prosentase jumlah los pasar dibandingkan jumlah pedagang pasar	2,5 %	2,18 %	87,2
5	Tersedianya Dukungan Sumber DayaManusia (SDM) yang memadai	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	70 %	70 %	100
		Pencari Kerja Yang Ditempatkan	5 %	7 %	140
		Jumlah Pengangguran Terbuka	-3 %	-3 %	100
		Tingkat Pengangguran Terbuka	4,5 %	4,5 %	100
		Penempatan Tenaga Kerja			
		d. AKL	103 org	179 org	174

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
		e. AKAD	182 org	168 org	93
		f. AKAN	61 org	61 org	100
6	Penyebaran Sarana Pelayanan Bank DanLembaga Keuangan Non Bank ke Pelosok Daerah	Jumlah Lembaga Perbankan	27 unit	26 unit	96
		Jumlah koperasi	554 unit	554 unit	100
		Prosentase pertumbuhan jumlah koperasi	0,91 %	0,91 %	100
		Prosentase pertumbuhan jumlah anggota koperasi	10 %	32.95 %	329
7	Ketersediaan Skim Kredit Sesuai dengan Pelaku JenisUsaha	Jumlah Kelompok UEP yang dikelola oleh perempuan	2 klp	2 klp	100
		Jumlah penyaluran modal kepada koperasi dan umkm melalui temu usaha	80 hibah	70 hibah	87,5
8	Adanya Kemampuan UMKMuntuk Menyusun Rencana Bisnis Yang Baik	Jumlah usaha mikro kecil dan menengah	45.023 UMKM	39.363 UMKM	87
		Prosentase peningkatan jumlah usaha mikro kecil dan menengah	32.81 %	16.11 %	49
		Prosentase usaha mikro kecil dan menengah dibandingkan seluruh unit usaha	99.87 %	99,85 %	99.98
		Prosentase penyerapan tenaga kerja di sektor usaha mikro kecil dan menengah dibanding jumlah penduduk	18.88 %	11.61	61.49
		Jumlah sentra industri	9 bh	15 bh	167
		Jumlah klaster industri	9 bh	8 bh	89
9	Dimilikinya Legalitas AssetPelaku Usaha Sebagai Jaminan Kredit	Jumlah Fasilitasi Pengurusan HAKI Produk Industri	8 HAKI	8 HAKI	100
		Jumlah kelompok yang mendapat fasilitas permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah	11 klp	2 klp	18,18
10	Jaminan Keamanan oleh Pemerintah Daerah	Jumlah Perda yang disusun	7	12	171%
		Jumlah Perbub yang disusun	25	45	180%
		Jumlah Keputusan Bupati yang disusun	725	1377	190%
		Rasio jumlah Polisi Pamong Praja dibanding jumlah penduduk	1 per 10.000 pddk	1 per 10.000 pddk	100%
		Jumlah Anggota Linmas terlatih	324 org	324 0rg	100%
		Tingkat penyelesaian pelanggaran trantibum di Kab.	100%	100 %	100%

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
		Rembang			
11	Mudahnya akses petani terhadap sarana produksipertanian dan alat mesin pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan	Produksi hasil tangkapan ikan	44.098,75 ton	57.369,58 ton	127,54
		Peningkatan ketersediaan alat mesin pertanian	5 %	8,13 %	162,60
		Produksi tanaman pangan			
		d. Padi	247.213 ton	183.002 ton	74,03
		e. Jagung	129.775 ton	128.388 ton	98,93
		f. Kedelai	5.703 ton	5.570 ton	97,67
		Produksi hortikultura			
		c. Cabe	987 ton	1.283 ton	130,05
		d. Mangga	8.489 ton	21.601 ton	254,45
		Produksi tanaman perkebunan			
		d. Tebu (cane)	43.403 ton	40.896 ton	94,22
		e. Kelapa (kopra)	4.092 ton	4.021 ton	98,26
		f. Tembakau	2.412 ton	4.115 ton	170,58
		Produksi Peternakan			
		a. Daging Sapi	1.276.034 kg	1.230.390 kg	96,42
		b. Daging Kambing	142.364 kg	136.650 kg	95,99
		c. Daging Ayam Ras	382.500 kg	467.654 kg	122,26
		d. Daging Ayam Buras	776.108 kg	572.490 kg	73,76
		e. Telur Ayam Buras	636.978 kg	618.780 kg	97,14
		f. Telur Ayam Ras	32.735 kg	48.290 kg	147,52
		g. Telur Itik	719.632 kg	914.781 kg	127,12
		Produksi Perikanan			
		d. Jumlah Produksi Budidaya Air Payau	1.294,72 ton	2.518,10 ton	194,49
		e. Jumlah Produksi Budidaya Air Tawar	590,70 ton	1.499,40 ton	253,83
		f. Jumlah Hasil Produksi Perikanan Laut di TPI/PPI	63.106,54 ton	60.772,65 ton	69,00
12	Meningkatnya kemampuan petani dalam pengelolaan usaha	Peningkatan pelaku usaha sektor tanaman pangan dan hortikultura	5 %	4,39 %	87,80
		Peningkatan pelaku usaha sektor perkebunan	5 %	4,80 %	96,00
		Peningkatan Pelaku usaha sektor peternakan	5 %	8,51 %	170,20
		Peningkatan kelompok usaha sektor Kehutanan	5 %	3,11 %	62,20
13	Tersedianya akses permodalan untuk pengembangan usaha	Peningkatan stimulan untuk kelompok tani Pangan dan Hortikultura	5 %	4,89 %	97,80
		Peningkatan stimulan untuk	5 %	7,67 %	153,40

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
		kelompok tani peternakan			
		Peningkatan stimulan untuk kelompok tani perkebunan	5 %	4,63 %	92,60
		Peningkatan stimulan untuk kelompok tani Kehutanan	5 %	3,35 %	67,00
14	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar pertanian	Bertambahnya luas lahan pertanian dan perkebunan yang teraliri jaringan irigasi	0,2 %	0,095 %	47,19
		Pembangunan embung	7 unit	20 unit	285,71
15	Meningkatnya intensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah	Meningkatnya intensifikasi sumber – sumber pendapatan asli daerah.	139.991.163.200,00	165.530.925.487,27	118,24%
16	Meningkatnya efisiensi dalam penarikan pendapatan asli daerah	Meningkatnya efisiensi dalam penarikan pendapatan asli daerah.	40,00%	87,29%	218,23%
17	Terwujudnya sumber PAD baru yang tidak membani masyarakat	Terwujudnya sumber PAD baru yang tidak membebani masyarakat	3.683.275.000,00	6.183.205.661,00	167,87%
18	Meningkatnya kualitas proses pembelajaran pada semua jenjang pendidikan	Angka kelulusan Ujian Nasional SMP/MTs	99.92%	99.37%	103.6
		Angka kelulusan UN SMA/MA/SMK	90.92%	99.76%	109.72
		TK/RA/SD/MI Menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	70%	100%	142.86
		SMP/MTs/SMA/SMK/MA melaksanakan MBS dengan baik	100%	100%	100
19	Tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi dan bersertifikat profesi	Guru SD/MI yang bersertifikat pendidik	70.51%	68.14%	96.64
		Guru SMP/MTs memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan	95.50%	93.86%	98.28
		Guru TK/RA yang layak mendidik dengan kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional	49.18%	49.18%	100.00
		Guru SD/MI memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan	67.37%	83.45%	123.87
		Guru SMP/MTs bersertifikat	80.46%	72,12%	89.63

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
		pendidik			
		Guru SMA/SMK/MAbersertifikat pendidik	65.49%	62.23%	95.02
		Guru SMA/SMK/MA memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan	97.78%	95.53%	97.49
20	Terwujudnya penyedia sarana dan prasarana pendidikan yang memadai pada semua jenjang pendidikan	TK/RA memiliki sarana dan prasarana belajar/bermain	44%	33,17%	75,39
		Meningkatnya jumlah lembaga PAUD dan TK	56%	113.24%	202,21
		TK/RA menetapkan manajemen sekolah berbasis sekolah	70,00%	100%	142,86
		Ruang kelas SD/MI sesuai standar	73,95%	69,08%	93,41
		SD/MI memiliki perpustakaan sesuai standar	54,04%	80,33%	148,65
		SMP/MTs memiliki Laboratorium IPA dan Komputer	66,95%	44,79%	66,90
		SD/MI memiliki Laboratorium IPA dan komputer	16,84%	22,54%	133,85
		SMP/MTs memiliki perpustakaan sesuai standar	90,46%	71,87%	79,85
		Lembaga kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar yang ditetapkan	70.36%	66,67%	94,80
		Meningkatnya tenaga pendidik, instruktur atau penguji praktik kursus/pelatihan kelompok belljar, usaha/magang memiliki kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan	87,08%	81,81 %	93,95
		Lembaga kursus memiliki ijin operasional dari pemerintah	98,00	100%	102,04
		Lembaga kursus dan lembaga pelatihan terakreditasi	66,76%	40,74%	61,02
21	Terwujudnya Angka Partisipasi Murni (APM) yang tinggi pada semua jenjang pendidikan	APK PAUD	88,50%	84,96%	96,00
		APK SD/MI	103,98%	101,28%	97,40
		APK SMP/MTs	98,46%	101,12%	102,70
		APK SMA/SMK/MA	66,80%	73,3%	109,75
		APM SMP/MTs	99,22%	77,26%	77,87
		APM SMA/SMK/MA	51,70%	45,05%	87,14
		Penduduk usia sekolah yang belum sekolah di SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA menjadi peserta didik program	98,55%	35.1%	35,62

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
		paket A, B dan C			
		Angka melek huruf	99,90%	99,65%	99,75
		Angka melanjutkan SMP/MTs ke SMA/MA/Kejuruan	82,67%	93,83%	113,50
22	Tersedianya beasiswa bagi penduduk	Angka Putus Sekolah SD	0,01%	0,01%	100
		Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,11%	0,11%	100
		Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK	0,25%	0,37%	52
		Penduduk putus sekolah, pengangguran dan dari keluarga pra sejahtera menjadi peserta didik dalam kursus-kursus/ pelatihan/kelompok belajar usaha/magang (%)	37,11%	37%	99.70
23	Meningkatnya kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan	Lulusan SMK diterima didunia kerja sesuai dengan keahliannnya	46,67%	30%	64,28
		Lulusan kursus, pelatihan, magang, kelompok belajar usaha dapat memasuki dunia kerja	45,27%	37.95%	83,83
		Lulusan program paket C dapat memasuki dunia kerja	45,27%	33,40%	73,78
24	Tersedianya tenaga medis yang memadai	Rasio dokter Spesialis per 100.000 penduduk	6 per 100 rb pendd	2,75 per 100 rb pendd	45,83
		Rasio dokter per 100.000 per penduduk	40 per 100 rb pendd	10,21 per 100 rb pendd	25,53
		Rasio dokter gigi per 100.000 penduduk	11 per 100 rb pendd	1,62 per 100 rb pendd	14,73
25	Tersedianya obat-obatan yang memadai	Ketersediaan obat sesuai kebutuhan	100 %	97,55 %	97,55
		Pengadaan obat esensial	100 %	95 %	95
		Katersediaan obat sesuai standar	100 %	95 %	95
26	Tersedianya peralatan medis yang memadai.	Ketersediaan alat kesehatan sesuai standar	100 %	62,28 %	62,28
27	Meningkatnya pengelolaan penyelenggara pelayanan kesehatan.	Kasus Kematian Bayi (AKB)	115 ks	125 ks	91,3
		Kasus Kematian Ibu (AKI)	9 ks	14 ks	44
		Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100 %	100 %	100,00

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
		Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100 %	100 %	100
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit :			
		a. Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk	2 per 100 rb pendd < 15 th	3,1 per 100 rb pendd < 15 th	31
		b. Cakupan balita dengan Penemuan penderita Pneumonia yang ditangani	1.303 balita	16 balita	1,23
		c. Penemuan TB BTA positif (CDR)	70 %	66,4 %	94,86
		d. Angka Kesembuhan TB Paru	85 %	81 %	95,29
		e. Penderita DBD yang ditangani	100 %	100 %	100,00
		Cakupan kunjungan ibu hamil (K4)	91 %	85,56 %	94,02
		Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	80 %	100 %	125
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	100 %	94,31 %	94,31
		Cakupan pelayanan nifas	100 %	90,87 %	90,87
		Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	80 %	100 %	125
		Cakupan Kunjungan Bayi	90 %	94,59 %	105,1
		Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100 %	100 %	100
		Cakupan peserta KB aktif	80 %	83,68 %	104,6
		Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	100 %	100 %	100,00
		Cakupan pelayanan anak balita	85 %	95,58 %	112,45
28	Meningkatnya pemerataan pelayanan kesehatan	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota	100	100 %	100,00
		Cakupan kunjungan rawat jalan	15	23,07 %	153,81
		Cakupan kunjungan rawat inap	1,5%	1,72 %	114,49
29	Tersedianya Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100 %	100 %	100

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
		Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100 %	100 %	100
		Cakupan penduduk yang menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan pra bayar	100 %	100 %	100
		Cakupan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin dan masyarakat rentan.	100 %	100 %	100
		Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	100 %	97,47 %	97,47
		Cakupan Desa Siaga	74,49 %	100 %	134,25
30	Meningkatnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan masyarakat	Jumlah Produk TTG Lokal unggulan yang dipamerkan pada event tingkat nasional	1 paket	1 paket	100
31	Meningkatnya Sarana Peribadatan dan Pendidikan Agama	Jumlah sarana peribadatan dan pendidikan agama yang dibantu	451 unit	435 unit	96,45
32	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan dan latihan (Diklat) pegawai	Jumlah peserta diklat struktural	42 org	2 org	5%
		Jumlah PNS yang ikut diklat bendaharawan	80	80	100%
		Jumlah PNS yang ikut Evaluasi	80	80	100%
		Jumlah PNS yang ikut diklat teknis/fungsional	20 org	82 org	410%
		Jumlah pejabat eselon III yang ikut pelatihan motivasi dan pengembangan potensi	200	200	100%
		Jumlah PNS yang mendapat bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	10	8	80%
33	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelatihan kerja/ketrampilan bagi masyarakat	Jumlah dokumen parahita yang tersusun	1 paket	1 paket	100 %
		Jumlah posyandu unggulan yang terbentuk	6 kelompok	6 kelompok	100 %

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
		Jumlah kader posyandu yang terlatih	112 kader	112 kader	100%
		Jumlah data posyandu yang tersusun	1 buku	1 buku	100 %
		Jumlah sarana posyandu yang tersedia	30 unit	30 unit	100%
		Jumlah orang tua yang mendapatkan pelatihan tentang metode pengajaran bagi anak yang berkebutuhan khusus	100 orang	100 orang	100 %
		Pelatihan ketrampilan bagi penyandang cacat (per tahun)	1	1	100 %
		Pelatihan ketrampilan bagi anak terlantar (per tahun/orang)	1 keg/55 org	1	100 %
		Pelatihan ketrampilan bagi eks penyakit sosial (per tahun)	1 keg	1	100 %
		Pelaksanaan pelatihan ketrampilan bagi keluarga fakir miskin dan wanita rawan sosial ekonomi (kegiatan/tahun)	1 keg	1	100 %
		Jumlah desa lokasi penerima program P2M-BG	2 desa	2 desa	100%
		Jumlah Produk TTG Lokal unggulan yang dipamerkan pada event tingkat nasional	1 paket	1 paket	1 paket
		Jumlah pelaku usaha industri yang dibina atau dilatih	525 orang	526 orang	100%
34	Meningkatnya kualitas prasarana jalan dan jembatan	persentase panjang jalan dalam kondisi baik	85%	48.18%	56.68
		prosentase jembatan dalam kondisi baik.	50%	75%	150
35	Meningkatnya kualitas saluran irigasi	prosentase peningkatan sawah dengan irigasi teknis	20 %	16,74 %	83,70
36	Meningkatnya kualitas saluran Drainase	Prosentase wilayah yang memiliki drainase	50 %	54.00%	108.00%
		Penilaian adipura	1 piala	0	0 %
37	Terbangunnya sarana dan prasarana yang mendukung terwujudnya *sea front city*	Jumlah hasil tangkapan ikan	63.106.538 kg	60.772.646 kg	96
		Prosentase meningkatnya Omset Produksi Hasil Olahan	231.198.240	210.024.000	91

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
		Perikanan	kg	kg	
38	Terwujudnya pemberdayaan masyarakat wilayah pesisir.	Jumlah kelompok Pokwasmas	2 klp	2 klp	100
		Jumlah Pelatihan Peningkatkan SDM masyarakat di daerah pesisir dan sekitarnya	105 org	105 org	100
39	Terbangunnya kawasan pengembangan budidaya perikanan kelautan	Peningkatan Produksi Garam	117.833 ton	141.943 ton	120
		Jumlah Produksi Benih ikan	51.819.443.ekor	51.000.000 ekor	99,99
		Jumlah hasil produksi olahan	231.198.264 kg	210.024.000 kg	90,84
		Peningkatan produksi perikanan tangkap sebesar 10% per tahun	63.106.53 kg	60.772.646 kg	96.32
40	Terwujudnya kawasan wisata bahari	Meningkatnya jml kunjungan wisata (org) 5% per thn)	403,078	1,321,411	327.83%
		Meningkatnya jml pendapat-an daerah dari obyek wisata (10% per thn)	1,289,771,100	1,325,738,920	102.79%
		Meningkatnya jml obyek wisata yg memiliki kelengkapan bahan promosi (bh)	5	5	100%
		Meningkatnya jumlah event pariwisata daerah dalam setahun (kali).	4	4	100%
		Meningkatnya jml obyek pari wisata & daya tarik wisata yg memiliki sarana prasarana penunjang lengkap (unit)	5	5	100%
		Meningkatnya rata2 lama tinggal wisatawan (hr) 5%/th	2.12	2.12	100%
41	Terselenggaranya pemerintahan daerah yang mempertimbangkan prinsip-prinsip demokrasi serta *good and clean governance*	Jumlah rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti	100%	73,51%	74 %
		Opini penilaian BPK	WTP	WDP	82 %
		Prosentase SKPD yang menyusun Penetapan kinerja	100%	100.00%	100.00%

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
		Prosentase SKPD yang menyusunLAKIP	100%	100.00%	100.00%
42	Tersedianya sistem dan kelembagaan layanan publik yang efektif dan efisien	Nilai IKM	83	76,53	92%
		Jumlah sertifikasi ISO	10 unit	7 unit	70 %
		Cakupan penerbitan KTP/KK	100%	100 %	100,00%
		Cakupan penerbitan Akta Catatan Sipil	100%	100 %	100,00 %
		Jumlah Koleksi Buku Manual	400 buku	1200 buku	300%
		Jumlah Buku Cerita Sejarah yang Dilestarikan	50 buku	10 buku	20%
		Jumlah Anggota Perpustakaan	1000 org	114 orang	11.40%
		Jumlah Pengunjung/Peminjam Perpustakaan	16.184 0rg	15.330 org	95%
		Jumlah Pengurus	10	10	100.00%
		Jenis Arsip yang Terdokumentasikan	14.000 berkas	9000 berkas	65.00%
		Jumlah Arsip yang Dilestarikan dan Diselamatkan	10.000 berkas	8000 berkas	80.00%
		Jumlah Lembaga yang Terbina Kearsipannya	5 SKPD dan 28 Desa	1 SKPD 29 desa	20.00%
		Jumlah Arsip yang Diproses Sesuai dengan JRA (Jadwa Retensi Arsip)	10.000 berkas	8000 berkas	80.00%
		Jumlah Koleksi Buku Manual	400 buku	1200 buku	300%
		Jumlah Arsiparis	2 orang	2 orang	100,00%
43	Tersedianya sistem informasi pembangunan yang memadai dan peka terhadap perubahan	Jumlah media massa baik cetak & elektronik yg mempublikasikan keg pemerintahan dan pembangunan daerah	7000 exp	7000 exp	100.00%
		Tingkat penyebaran informasi publik dan fasilitasi pers	1	80%	80.00%
		Jumlah website milik Pemda yang dapat diakses oleh masyarakat	14	14	100.00%
		Media msssa sepeti majalah, radio dan televisi;	1	1	100.00%
		Media baru seperti website (media online)	1	1	100.00%
		Media tradisional seperti petunjuk rakyat	1	1	100.00%
		Media Interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya dan/atau	1	1	100.00%
		Media luar ruang seperti media buletin,leflet,booklet,brosur,spanduk dan baliho	1	1	100.00%
44	Responsif terhadap perkembangan situasi	Prosentase terbentuknya masyarakat sadar bencana	100 %	96,23 %	96,23
		Prosentase pelatihan	100 %	97,51 %	97,51

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
		penanggulangan Bencana			
		Prosentase Tim Penanggulangan Bencana yang terdidik	100 %	93,04 %	93,04
		Prosentase jumlah korban yang mendapat bantuan	100 %	76,16 %	76,16
		Prosentase jumlah sasaran dan prosentase penanggulangan bencana	100 %	98,55 %	98,55
45	Responsif terhadap perubahan dinamika kebijakan nasional	Jumlah penyelenggaraan Dialog / Audensi	14 kec	14 kec	100
46	Proaktif dalam mengantisipasi perkembangan/ perubahan lingkungan strategis	Jml dokumen RDTRK	1 dokumen	1 dokumen	100
		Jm dokumen kajian penelitian dan pengembangan	2 dokumen	6 dokumen	300
		Jumlah radio	14 buah	14 buah	100
		Jumlah BTS	135 buah	138 buah	102,22
		Jumlah pemegang ijin usaha penyiaran	14 buah	14 buah	100

C. EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

Sasaran 1 : Penyederhanaan prosedur pelayanan dan perijinan investasi

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta memasuki era globalisasi Pemerintah Kabupaten Rembang terus berupaya meningkatkan kemampuan bersaing dalam menciptakan iklim usaha dan investasi yang sehat. Kondisi sumber daya alam dan potensi yang dimiliki daerah Kabupaten Rembang cukup potensial untuk terus dikembangkan seperti sektor pertambangan, perikanan, pertanian dan peternakan, dan beberapa potensi lain yang juga berpeluang adalah investasi dibidang pariwisata, industri, kerajinan dan jasa. Pengelolaan kondisi alam dan kondisi daerah tersebut, perlu ditumbuhkembangkan secara profesional dan berkelanjutan, sehingga secara ekonomi menyentuh dan mampu meningkatkan perkonomian rakyat / masyarakat Rembang serta dapat memberikan peningkatan pendapatan perkapita masyarakat, secara makro memberi kontribusi yang besar untuk PAD di Kabupaten Rembang.

Untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif agar menarik calon investor salah satunya adalah dengan menciptakan kondisi yang ramah terhadap investor dengan melayani dan memproses perijinan yang diajukan oleh calon investor dengan standar pelayanan prima, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Rembang melalui Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT), dengan visi yaitu ‘Unggul dalam Kualitas Layanan dan Profesional’ siap menyambut dan melayani calon investor yang ingin berinvestasi di Kabupaten Rembang.

Pemerintah Kabupaten Rembang melalui KPPT Kabupaten Rembang dalam melayani para pemohon atau calon investor dalam pengajuan ijin usaha terus melakukan pembenahan, adapun langkah-langkah yang telah dilaksanakan, adalah :

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang ada dilingkungan KPPT khususnya di front office dan back office sebagai upaya untuk meningkatkan keahlian dan kemampuan dalam melaksanakan pelayanan perijinan.
2. Menyusun sistem informasi penanaman modal dan pengelolaan data dalam penerbitan perijinan sehingga lebih memudahkan dalam pelayanan.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam pelayanan perijinan untuk mempercepat proses pelayanan.

Untuk mengukur sejauhmana pencapaian sasaran tersebut, dapat dilihat dalam tabel pengukuran pencapaian sasaran berikut dibawah ini :

Tabel III.2

Capaian penyederhanaan prosedur pelayanan dan perijinan investasi

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Tingkat penyelesaian perijinan terhadap waktu yang ditentukan	%	100	100	100
				Capaian Kinerja Sasaran Rata-Rata	100

Capaian kinerja sasaran rata-rata mencapai 100 % tersebut diatas didasarkan pada data hasil pelayanan perijinan yang telah diselesaikan sebagaimana berikut :

1. Dari pengajuan pada Tahun 2014 terdapat pengajuan ijin sebanyak 648 pemohon yang semuanya telah diproses dan disetujui pada tahun itu, yaitu sejumlah 648 pemohon.
2. Adanya peningkatan jumlah pemohon ijin usaha dari tahun 2011 s/d 2014 yaitu rata-rata meningkat 18,5%, pada tahun 2011 sebanyak 391 pemohon, tahun 2012 sebanyak 426 pemohon, tahun 2013 sebanyak 521pemohon dan tahun 2014 sebanyak 648 pemohon sebagaimana dapat dilihat dalam grafik berikut ini :

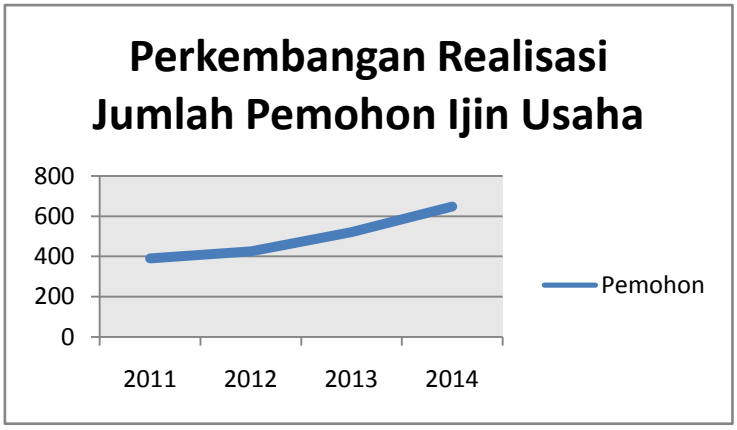

Sasaran 2 : Promosi peluang investasi

Investasi di daerah merupakan salah satu kekuatan penting untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah, karena dengan adanya investasi akan berujung pada penyerapan tenaga kerja yang mampu mengerakkan kegiatan perekonomian didaerah sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tersebut. Daerah dituntut untuk aktif menggali potensi daerahnya dan berupaya untuk dapat menginformasikannya kepada publik melalui berbagai media. Keberadaan informasi yang cepat akses, akurat dan mutakhir akan membantu pihak investor dalam menganalisis potensi daerah dan melakukan investasi.

Ada beberapa langkah dan upaya Pemerintah Kabupaten Rembang yang telah dilaksanakan pada Tahun 2014 untuk mengenalkan potensi yang ada dalam rangka menarik calon investor melalui beberapa SKPD, yaitu :

1. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, telah melaksanakan pameran investasi sebanyak 3 kali, yaitu di Yogyakarta, Jakarta dan Batam. Selain itu Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM serta Bagian Perekonomian Setda Rembang juga ikut mengenalkan potensi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Rembang agar lebih dikenal dan menarik calon investor untuk berinvestasi.
2. Melaksanakan pameran investasi di daerah, yaitu melalui Rembang Expo 2014 yang diikuti oleh sebagian besar UMKM yang ada di Kabupaten Rembang.
3. Mengikuti Pameran Investasi dan Temu Bisnis berskala Nasional yang diselenggarakan oleh BPMD Provinsi Jawa Tengah di Jakarta.
4. Tersusunnya Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) sehingga progran dan rencana pelaksanaan kegiatan penanaman modal lebih terarah dan terencana dengan baik.

Untuk melihat capaian sasaran yang telah ditetapkan tersebut, dapat dilihat dalam tabel pengukuran pencapaian sasaran berikut dibawah ini :

Tabel III.3

Capaian Kinerja Promosi peluang investasi

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah pameran investasi	Kali	3	3	100
2.	Jumlah usaha mikro kecil dan menengah yang terfasilitasi dalam kegiatan promosi perdagangan di luar daerah	UMKM	14	12	86
3.	Jumlah usaha mikro kecil dan menengah yang terfasilitasi dalam kegiatan promosi perdagangan didalam daerah	UMKM	40	120	300
Capaian Kinerja Sasaran Rata-Rata					162

Dari capaian kinerja rata-rata 162% tersebut telah menghasilkan kepeminatan calon investor dan realisasi investasi di Kabupaten Rembang, yaitu diantaranya adanya investasi berskala besar yang telah menanamkan investasinya di Kabupaten Rembang, yaitu PT. Bintang Karya Laut yang bergerak di sektor perikanan, PT. Rembang Smelter Indonesia yang bergerak di sektor pertambangan, perluasan PT. Holi Mina Jaya yng bergerak di pengolahan ikan di Sluke dan Gudang Alfa Mart yang bergerak di sektor perdagangan serta rencana pembangunan PT. Semen Indonesia Rembang yang bergerak dibidang Industri Semen, Sedangkan saat ini sedang berjalan masa konstruksi PT. Semen Indonesia tbk dengan nilai investasi Rp. 4,5 Triliyun.

Sasaran 3 : Terjaminnya keamanan berusaha

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta memasuki era globalisasi, Pemerintah Kabupaten Rembang berupaya terus untuk meningkatkan kemampuan bersaing dengan menciptakan iklim usaha dan investasi yang sehat. Dalam menjamin keamanan berusaha di Kabupaten Rembang, Pemerintah Kabupaten Rembang telah mengambil langkah-langkah agar para calon investor dalam mendirikan usahanya mendapatkan ketenangan dalam menjalankan usahanya, yaitu :

1. Menyusun Naskah Akademis Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Rembang pada Tahun 2014 dan telah dimasukkan ke dalam prolegda Tahun 2015 untuk dapat dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang.

2. Sudah dimilikinya Dokumen Rencana Tata Ruang Daerah (RTRW) Kabupaten Rembang sehingga memudahkan calon investor menentukan pilihan lokasi usaha yang sesuai dengan yang diharapkan.
3. Menyediakan wadah penyelesaian masalah yang ada di KPPT Kabupaten Rembang, sehingga apabila muncul permasalahan akan dapat segera terselesaikan dengan baik, yaitu pada Tahun 2014 ada 9 aduan permasalahan terkait dengan perijinan yang 8 aduan tersebut telah diselesaikan dengan baik dan 1 aduan masih dalam proses penyelesaian.
4. Adanya Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Rembang yang bertujuan memfasilitasi calon investor dalam menentukan lokasi usaha, pada Tahun 2014 BKPRD Kabupaten Rembang telah mengeluarkan rekomendasi kepada calon investor mengenai lokasi yang mereka inginkan untuk usaha.

Untuk melihat pencapaian sasaran tersebut, dapat dilihat dalam tabel pengukuran pencapaian sasaran berikut dibawah ini :

Tabel III.4

Capaian Indikator kinerja terjaminnya keamanan berusaha

No.	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah perusahaan yang terdaftar bergerak di sektor perdagangan	200	274	137
2.	Jumlah perusahaan yang terdaftar bergerak di sektor industri	54	70	130
3.	Jumlah perusahaan yang terdaftar bergerak di luar sektor perdagangan dan industri	179	304	170
Capaian Kinerja Sasaran Rata-Rata				146

Melihat pada hasil capaian diatas diatas terlihat bahwa pencapaian indikator jumlah perusahaan yang terdaftar bergerak di sektor perdagangan 137% dengan jumlah 274 perusahaan, jumlah perusahaan yang terdaftar bergerak di sektor industri 130% dengan jumlah 70 perusahaan dan jumlah perusahaan yang terdaftar bergerak diluar sektor perdagangan dan industri 170% dengan jumlah sebanyak 304 perusahaan, hal ini juga terlihat dengan adanya peningkatan realisasi investasi dan tenaga kerja dari tahun 2011 s/d 2014 sebagaimana berikut ini :

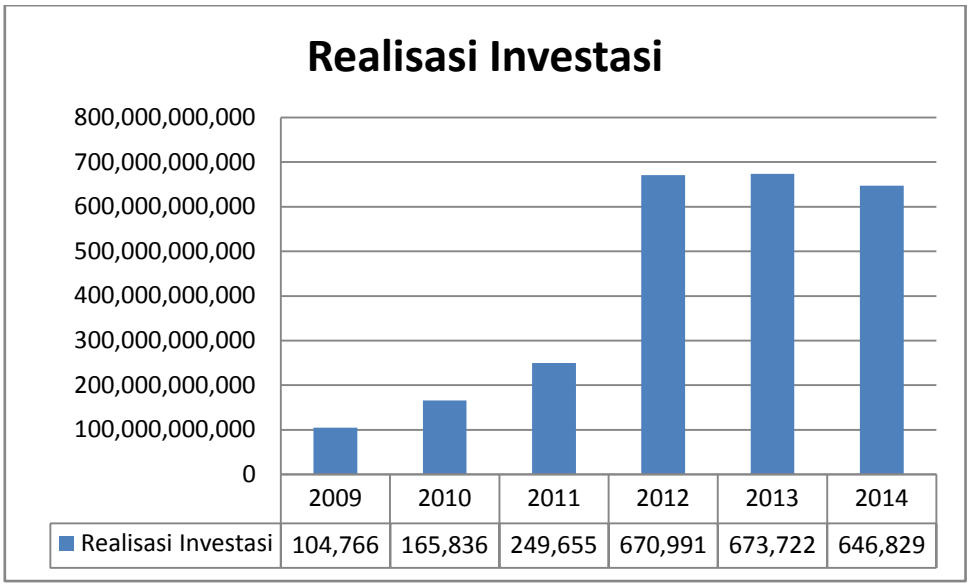

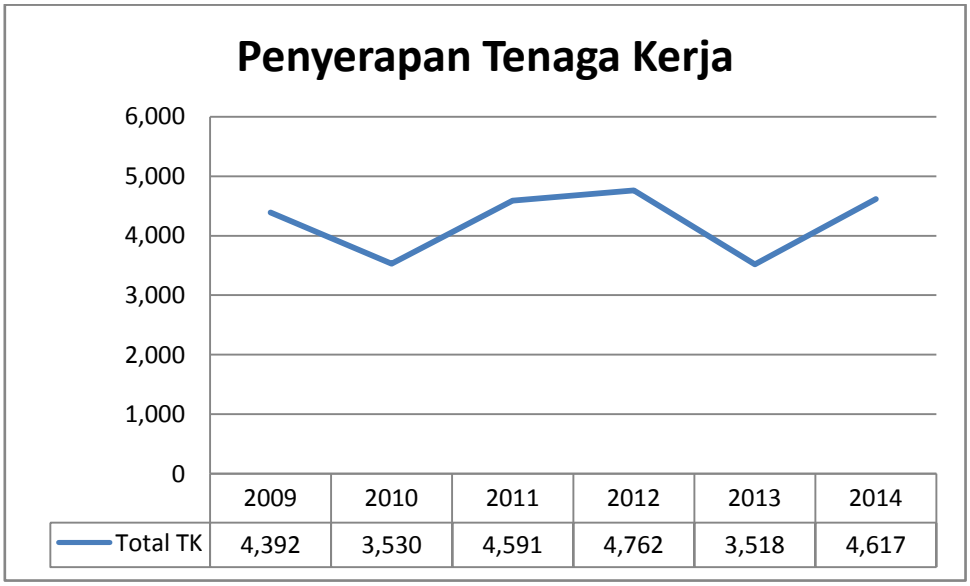

Sasaran 4 : Tersedianya infrastruktur investasi yang memadai

Pemerintah Kabupaten Rembang berupaya memperbaiki dan meningkatkan infrastruktur khususnya yang berkaitan dengan penciptaan investasi di Kabupaten Rembang, dalam rangka mempercepat pertumbuhan kegiatan ekonomi di Kabupaten Rembang.Infrastruktur yang memadai sangat diperlukan untuk meningkatkan akses perekonomian daerah dan menciptakan daya tarik investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Rembang.

Peningkatan investasi di Kabupaten Rembang dapat dilihat dari banyaknya rekomendasi yang dikeluarkan oleh BKPRD terhadap permohonan perizinan pemanfaatan ruang tahun 2014 sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel III.5
Inventarisasi Rekomendasi BKPRD
Terhadap Permohonan Perizinan Pemanfaatan Ruang Tahun 2014

No.	Uraian	Pemohon	Lokasi
1	Rekomendasi Kesesuaian RTRW Terhadap Rencana Penggalian Batu Bahan Industri PT. SAF di Desa Tahunan Kecamatan Sale dan Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem	PT. Sinar Asia Fortuna	Desa Tahunan Kecamatan Sale dan Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem
2	Rekomendasi Kesesuaian RTRW Terhadap Rencana Penggilingan Batu Andesit di Kecamatan Sedan	UD. Arofah (Bpk. Niamurrohman)	Desa Sedan Kecamatan Sedan
3	Rekomendasi Kesesuaian RTRW Terhadap Rencana Penggilingan Batu Andesit di Kecamatan Sedan	PT. Mitra Usaha Exceltama	Desa Karas Kecamatan Sedan
4	Rekomendasi Kesesuaian RTRW Terhadap Rencana Pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kecamatan Sedan	H. MUSLIH	Desa Mojosari Kecamatan Sedan
5	Rekomendasi Kesesuaian RTRW Terhadap Rencana Pendirian Garasi Truk di Kecamatan Sarang	Hj. Sofiyah	Desa Temperak Kecamatan Sarang
6	Rekomendasi Kesesuaian RTRW Terhadap Perluasan Ruko Mutiara di Desa Sumberejo Kecamatan Rembang	Heri Gunardi (PO.Mutiara)	Desa Sumberejo, Kecamatan Rembang
7	Rekomendasi Kesesuaian RTRW Terhadap Perluasan Perumahan Mutiara Megah Asri di Desa Mondoteko Kecamatan Rembang	PT. Kejar Usaha Induk	Desa Mondoteko, Kecamatan Rembang
8	Rekomendasi Kesesuaian RTRW Terhadap Rencana Pendirian SPPBE di Desa Tireman Kecamatan Rembang	PT. Sekar Kedaton Persada	Desa Tireman, Kecamatan Rembang
9	Rekomendasi Kesesuaian RTRW Terhadap Rencana Pendirian Beton Ready Mix di Desa Kemadu Kecamatan Sulang	PT. Varia Usaha Beton	Desa Kemadu, Kecamatan Sulang
10	Rekomendasi Kesesuaian RTRW Terhadap Rencana Penggilingan Batu Andesit di Desa Tanjungan Kec. Kragan dan Ds Kalipang Kec Sarang	CV. Selo Gesang Baraka (Ir. Hidayat Leksonowidodo)	Ds Tanjungan, Kec Kragan dan Desa Kalipang, Kec Sarang
11	Rekomendasi Kesesuaian RTRW Terhadap Rencana Pendirian Pabrik Es di Kawasan TPI Tasikagung, Kecamatan Rembang	CV. Samudera Sakti Rembang (Wuryanto SE)	Desa Tasikagung, Kecamatan Rembang
12	Rekomendasi Kesesuaian RTRW Terhadap Rencana Pembangunan Ruko/Rukan di Kecamatan Lasem	Ghofar Ismail	Desa Sumbergirang, Kecamatan Lasem
13	Rekomendasi Kesesuaian RTRW Terhadap Rencana Pendirian Industri Berbagai Jenis Beton di Kecamatan Bulu	PT. Standar Beton Indonesia	Desa Mantingan, Kecamatan Bulu
14	Rekomendasi Kesesuaian RTRW Terhadap Rencana Pendirian Pengolahan Tepung Ikan dan Produk Makanan Jadi di Kecamatan Kragan	PT. Holi Mina Jaya	Desa Balongmulyo, Kecamatan Kragan
15	Rekomendasi Kesesuaian RTRW Terhadap Rencana Pengolahan Batu Tambang di Desa	PT. Bumi Bening Khatulistiwa	Desa Mojosari, Kecamatan Sedan

	Mojosari Kecamatan Sedan		
16	Rekomendasi Kesesuaian RTRW Terhadap Rencana Pendirian Smelter Nikel di Desa Sendangmulyo dan Desa Blimbing Kecamatan Sluke	PT. Rembang Smelter Indonesia	Desa Sendangmulyo dan Desa Blimbing, Kecamatan Sluke
17	Rekomendasi Kesesuaian RTRW Terhadap Rencana Penambangan Bahan Baku Tambang di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem	PT. Semen Indonesia Rembang	Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem
18	Rekomendasi Kesesuaian RTRW Terhadap Rencana Penggilingan Batu Andesit di Desa Lemah Putih Kecamatan Sedan	CV. Restu Bumi (Yeni Sudiyono)	Desa Lemah Putih, Kecamatan Sedan
19	Rekomendasi Kesesuaian RTRW Terhadap Rencana Pendirian Stone Crusher di Desa Sendangmulyo, Kecamatan Sluke	PT. Bumi Rejo Tirta Kencana	Desa Sendangmulyo, Kecamatan Sluke
20	Rekomendasi Kesesuaian RTRW Terhadap Rencana Pembangunan Jaringan Transmisi SUTT 150 kV di Kecamatan Bulu dan Kecamatan Gunem	PT. PLN (persero) Unit Induk Pembangunan VI	Kecamatan Bulu dan Kecamatan Gunem

Untuk mengukur sejauhmana pencapaian sasarantersedianya infrastruktur investasi yang memadai, dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel III. 6
Capaian kinerja tersedianya infrastruktur yang memadai

No.	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah industri skala besar	6 buah	10 buah	166,67
2.	Jumlah klaster industri	9 buah	8 buah	88,89
3.	Rekomendasi BKPRD terhadap perizinan pemanfaatan ruang	9 buah	20 buah	222,22
4.	Jumlah usaha perdagangan di Kabupaten Rembang	5 buah	9 buah	180
5.	Jumlah pembangunan sarana perdagangan	370 unit	400 unit	108,11
6.	Jumlah sentra industry	9 buah	15 buah	166,67
7	Jumlah klaster industry	9 buah	15 buah	166,67
8.	Prosentase jumlah kios pasar dibandingkan jumlah pedagang pasar	15,7 %	16,04 %	102,17
9.	Prosentase jumlah los pasar dibandingkan jumlah pedagang pasar	2,5 %	2,18 %	87,2
Capaian Kinerja Sasaran Rata-Rata				143,18

Mengacu pada hasil pengukuran diatas terlihat bahwa pencapaian indikator jumlah industri skala besar 166,67% dengan jumlah 10 perusahaan, indikator jumlah klaster industri sebesar 88,89% dengan jumlah 8 klaster, indikator Rekomendasi BKPRD terhadap perizinan pemanfaatan ruang 222,22% dengan jumlah rekomendasi yang telah dikeluarkan

BKPRD sebanyak 20 rekomendasi. Indikator jumlah usaha perdagangan di Kabupaten Rembang sebesar 180% dengan jumlah usaha perdagangan 9 buah, . Indikator jumlah pembangunan sarana perdagangan di Kabupaten Rembang sebesar 108,11% dengan jumlah pembangunan sarana perdagangan 400 buah, indikator jumlah sentra industri sebesar 166,67% dengan jumlah 15 sentra, indikator jumlah klaster industri sebesar 166,67% dengan jumlah 15klaster, indikator prosentase jumlah kios pasar dibandingkan jumlah pedagang pasar sebesar 102,17%, indikator prosentase jumlah los pasar dibandingkan jumlah pedagang pasar sebesar 87,2%.

Melihat capaian kinerja masing-masing indikator, maka capaian kinerja sasaran. Capaian kinerja tersedianya infrastruktur yang memadairata-rata sebesar 143,18%.

Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran kinerjatersedianya infrastruktur yang memadai diantaranya adalah

1. Kurangnya akses permodalan untuk pengembangan industri kecil dan UMKM.
2. Sarana dan prasarana pasar yang kurang representatif.
3. Infrasruktur yang masih kurang memadai untuk menarik datangnya investor.

Sasaran 5 : Tersedianya Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai

Sasaran Tersedianya Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai, dimaksudkan untuk memecahkan isu strategis yaitu masih banyaknya penduduk dibawah garis kemiskinan, terbatasnya akses masyarakat khususnya di perdesaan terhadap sumber – sumber modal yang dipengaruhi oleh kualitas tenagakerja yang berpendidikan, berketrampilan dan berdaya saing relatif rendah dan belum sepenuhnya didukung iklim investasi yang kondusif.

Untuk mencapai Sasaran tersebut ditempuh melalui beberapa indikator sasaran antara lain tingkat partisipasi angkatan kerja, pencari kerja yang ditempatkan, jumlah pengangguran terbuka, tingkat pengangguran terbuka dan penempatan tenaga kerja.

Untuk mengukur sejauhmana pencapaian sasaran tersebut, dapat dilihat dalam tabel berikut dibawah ini :

Tabel III.7
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tersedianya Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	70	70	100
2	Pencari Kerja Yang	%	5	7	140

	Ditempatkan				
3	Jumlah Pengangguran Terbuka	%	-3	-3	100
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,5	4,5	100
5	Penempatan Tenaga Kerja				
	g. AKL	Orang	103	179	174
	h. AKAD	Orang	182	168	93
	i. AKAN	Orang	61	61	100
Capaian Kinerja Sasaran Rata-Rata					115,28

Mengacu pada hasil pengukuran diatas terlihat bahwa pencapaian indikator tingkat partisipasi angkatan kerja 100%, pencari kerja yang ditempatkan 140%, jumlah pengangguran terbuka 100% dan penempatan tenaga kerja rata-rata yang terdiri dari AKL 174 %, AKAD 93%, dan AKAN 100%. Melihat dari capaian masing-masing indikator, maka didapat capaian kinerja sasaran rata-rata sebesar 115,28% (sangat berhasil). Capaian yang melebihi 100% ini didukung oleh adanya capaian pada indikator Prosentase pencari kerja yang ditempatkan yang capaiannya 140 % dan indikator Penempatan Tenaga Kerja yang melebihi 100%.

Pengangguran terbuka merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah bekerja). Jumlah pengangguran terbuka Kabupaten Rembang di targetkan turun sebesar 3 % dan ini telah sesuai dengan realisasi. Informasi jumlah pengangguran terbuka ini berguna sebagai acuan bagi pemerintah untuk membuka lapangan kerja baru dan menunjukkan keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun.

Besarnya angka pengangguran terbuka mempunyai implikasi sosial luas karena mereka yang tidak bekerja tidak mempunyai pendapatan. Semakin tinggi angka pengangguran terbuka semakin besar potensi kerawanan sosial yang ditimbulkannya. Sebaliknya semakin rendah angka pengangguran terbuka maka semakin stabil kondisi sosial dalam masyarakat.

Permasalahan atau kendala yang berkaitan dengan Pencapaian Kinerjadalam upaya mencapai sasaran yang dinilai kurang berhasil adalah sebagai berikut :

a. Belum terpenuhinya sarana prasarana Informasi Pasar Kerja (IPK) / Bursa Kerja Online (BKO) secara maksimal.
b. Minimnya anggaran untuk penempatan dan kurangnya dukungan manajemen dibidang transmigrasi
c. Terbatasnya kuota untuk penempatan transmigrasi dari Provinsi.
d. Belum terpenuhinya SDM baik kualitas maupun kuantitas yang memadai.
e. Belum optimalnya pendayagunaan PSKS dalam pembangunan kesejahteraan sosial

Adapun Strategi Peningkatan Kinerja antara lain :

1. Perlu adanya dukungan sistem manajemen yang profesional dan sumber dana yang memadai serta fasilitas sarana prasarana sebagai penunjang peningkatan kinerja
2. Peningkatan kerjasama dan koordinasi baik internal maupun eksternal
3. Pendayagunaan potensi sumber Dinsosnakertrans baik internal maupun ekternal (peran *stakeholder*).

Langkah – langkah antisipatif dan korektif yang akan ditempuh guna perbaikan dalam rangka mensiasati kekurangan keberhasilan pencapaian sasaran yaitu :

a. Mengajukan anggaran yang lebih banyak baik untuk transmigrasi maupun penempatan tenaga kerja serta koordinasi dengan kab lain dalam hal penempatan tenaga kerja
b. Kerjasama dengan radio swasta di Kab. Rembang ditingkatkan dalam hal informasi tenaga kerja
c. Menambah petugas pengantar kerja.
d. Kerja sama dan koordinasi ke Dinas Provinsi di bidang Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi perlu ditingkatkan.

Sasaran 6 : Penyebaran Sarana Pelayanan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank ke Pelosok Daerah

Salah satu faktor yang mempengaruhi pelaku usaha adalah permodalan, karena dengan adanya modal yang cukup pelaku usaha akan mampu dan dapat mengembangkan usahanya apabila kondisi pasar sangat menguntungkan bagi pelaku usaha.

Pentingnya lembaga keuangan, Bank maupun Non-Bank, bagi pelaku usaha khususnya UMKM adalah dengan diberikannya bantuan modal oleh Bank maupun lembaga keuangan Non-Bank berupa kredit bagi UMKM, karena modal yang diberikan digunakan untuk mengembangkan usaha UMKM sehingga keberadaannya akan dapat bersaing dengan pelaku usaha yang lain khususnya diluar Kabupaten Rembang.

Untuk mengukur sejauhmana pencapaian sasaran tersebut, dapat dilihat dalam tabel berikut dibawah ini :

Tabel III 8
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Penyebaran Sarana Pelayanan Bankdan Lembaga Keuangan Non Bank ke Pelosok Daerah

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)

1	Jumlah Lembaga Perbankan	Unit	27	26	96
2	Jumlah koperasi	Unit	554	554	100
3	Prosentase pertumbuhan jumlah koperasi	%	0,91	0,91	100
4	Prosentase pertumbuhan jumlah anggota koperasi	%	10	32.95	329
				Capaian Kinerja Sasaran Rata-Rata	156

Mengacu pada hasil pengukuran diatas terlihat bahwa pencapaian indikator jumlah lembaga perbankan 96%, pencapaian jumlah koperasi 100%, capaian prosentase pertumbuhan jumlah koperasi 100% dan capaian pertumbuhan jumlah anggota koperasi sebesar 392%. Berdasarkan indikator sasaran tersebut capaian kinerja sasaran rata-rata nya adalah sebesar 156%

Perbankan dan lembaga keuangan Non Bank bertujuan memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk meminjam kredit dengan suatu jaminan maupun menabung.Jumlah Lembaga Perbankan yang tersedia di Kabupaten Rembang sebanyak 26 unit dan Non Bank sejumlah 554 unit.

Sasaran 7 : Ketersediaan Skim Kredit Sesuai Dengan Pelaku Jenis Usaha

Peran serta Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam perkembangan UMKM yang ada di Daerah sehingga langkah-langkah yang diambil sangatlah ditunggu-tunggu kususnya UMKM, karena sebagian besar UMKM yang ada mengalami kesulitan dalam menjalankan usahanya khususnya menyangkut permodalan. Pemerintah Daerah sangat memahami kondisi tersebut sehingga ada langkah-langkah yang kongkret oleh Pemerintah Daerah dalam memberikan bantuan permodalan bagi pelaku usaha yang memang sangat membutuhkan melalui penyaluran bantuan, baik berupa permodalan maupun bantuan peralatan yang diharapkan UMKM yang menerima mampu mengembanggkan usahanya tersebut.

Untuk mengukur sejauhmana pencapaian sasaran tersebut, dapat dilihat dalam tabel berikut dibawah ini :

Tabel III 9
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Ketersediaan Skim Kredit Sesuai Dengan Pelaku Jenis Usaha

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Jumlah Kelompok UEP yang dikelola oleh perempuan	kelompok	2	2	100

2	Jumlah penyaluran modal kepada koperasi dan umkm melalui temu usaha	Hibah	80	70	87,5
				Capaian Kinerja Sasaran Rata-Rata	93,75

Mengacu pada hasil pengukuran diatas terlihat bahwa pencapaian indikator Jumlah Kelompok UEP yang dikelola oleh perempuan 100% dengan jumlah 2 kelompok dan jumlah penyaluran modal kepada koperasi dan UMKM melalui temu usaha sebanyak 87,5% dengan jumlah hibah penyaluran sebanyak 70 hibah. Berdasarkan capaian indikator sasaran tersebut, capaian kinerja sasaran rata-rata sebesar 93,75%

Dalam pemberdayaan masyarakat dan desa apa bila ada permasalahan yang berpotensi muncul adalah belum terwujudnya kemandirian dan keberdayaan masyarakat desa dan belum berkembangnya kelompok usaha ekonomi produktif masyarakat desa, hal ini dapat diketahui masyarakat belum mampu untuk menggali potensi dan memecahkan masalah yang dihadapi.

Sasaran 8 : Adanya Kemampuan UMKM untuk Menyusun Rencana Bisnis Yang Baik

Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah di Daerah dikatakan berhasil adalah salahsatunya dapat dilihat dengan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat ini dapat dilihat salah satunya dengan indikator menurunnya tingkat pengangguran di Masyarakat, hal ini disebabkan karena terbukanya lapangan kerja yang cukup besar di Daerah. Salah satu faktor dalam penciptaan lapangan kerja tersebut selain perusahaan besar adalah pelaku usaha UMKM, peran UMKM sangatlah besar dalam mencipatakan lapangan pekerjaan karena jumlahnya yang cukup besar di Daerah, hal ini sudah dibuktikan keberadaannya sangat mendukung dalam perekonomian Daerah maupun Nasional pada saat krisis yang melanda bangsa kita pada Tahun 1998.

Pentingnya UMKM bagi perekonomian Daerah, haruslah perlu dukungan dari Pemerintah Daerah, sehingga diperlukan pemberdayaan UMKM agar mampu bertahan, bersaing dan berkembang sehingga keberadaannya mampu mendukung Perekonomian Daerah.

Untuk mengukur sejauhmana pencapaian sasaran tersebut, dapat dilihat dalam tabel berikut dibawah ini :

Tabel III 10
Capaian Indikator Kinerja Adanya Kemampuan UMKM untuk Menyusun Rencana Bisnis Yang Baik

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)

1	Jumlah usaha mikro kecil dan menengah	UMKM	45.023	39.363	87
2	Prosentase peningkatan jumlah usaha mikro kecil dan menengah	%	32.81	16.11	49
3	Prosentase usaha mikro kecil dan menengah dibandingkan seluruh unit usaha	%	99.87	99,85	99.98
4	Prosentase penyerapan tenaga kerja di sektor usaha mikro kecil dan menengah dibanding jumlah penduduk	%	18.88	11.61	61.49
5	Jumlah sentra industri	Buah	9	15	167
6	Jumlah klaster industri	Buah	9	8	89
Capaian Kinerja Sasaran Rata-Rata					98

Mengacu pada hasil pengukuran diatas terlihat bahwa pencapaian kinerja sasaran rata-rata adalah sebesar 98%

Ada beberapa hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran terkait dengan kemampuan UMKM untuk menyusun rencana bisnis yang baik adalah, diantaranya :

1. Masih rendahnya jiwa kewirausahaan dikalangan pelaku UKM.
2. Kurangnya akses permodalan penunjang kegiatan UMKM.
3. Kurangnya promosi produk unggulan daerah melalui pameran di luar daerah.
4. Lemahnya daya saing produk.
5. Terbatasnya sarana pendukung promosi.

Sedangkan untuk meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan SDM Aparatur Bidang koperasi.
2. Meningkatkan kegiatan sosialisasi dan pelatihan teknis kewirausahaan
3. Adanya bantuan modal untuk menunjang kegiatan UMKM
4. Meningkatkan kegiatan promosi keluar daerah.
5. Mengadalan pelatihan dan pembinaan IKM.
6. Menambah sarana dan fasilitas pendukung promosi.

Oleh karena itu ke depan dalam rangka meningkatkan target capaian kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh strategi sebagai berikut:

1. Mendorong upaya pengembangan investasi yang memberikan jaminan kepastian usaha

2. Mengembangkan ekonomi daerah dan memperluas kesempatan kerja melalui Koperasi dan pengembangan UMKM
3. Mengikuti kegiatan pameran baik di luar maupun di dalam daerah.
4. Peningkatan kualitas produk.

Sasaran 9. Dimilikinya Legalitas Asset Pelaku Usaha Sebagai Jaminan Kredit

Capaian sasaran Dimilikinya Legalitas Asset Pelaku Usaha Sebagai Jaminan Kredit dapat dilihat dari capaian indikator sebagai berikut :

TabelIII.11
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dimilikinya Legalitas Asset Pelaku Usaha Sebagai Jaminan Kredit

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah Fasilitasi Pengurusan HAKI Produk Industri	HAKI	8	8	100
2.	Jumlah kelompok yang mendapat fasilitas permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah	kelompok	11	2	18,18
Capaian Kinerja Sasaran Rata-rata					**59,09**

Mengacu pada hasil pengukuran diatas terlihat bahwa pencapaian indikatorjumlah Jumlah Fasilitasi Pengurusan HAKI Produk Industri sebesar 100% dan Jumlah kelompok yang mendapat fasilitas permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah sebesar 18,18%, dengan produk-produk yang dilakukan pengurusan HAKI tersebut adalah :

1. Roti Lukna Bakery
2. Rengginang Teri
3. Kripik Nongko Mahkota
4. Batik Kemadu
5. Batik Sumber Rejeki
6. Gorden Ulfiah Mili
7. Kerudung Dista
8. Terasi Leran Jaya

Sasaran 10 :Jaminan Keamanan oleh Pemerintah Daerah

Jaminan keamaan oleh Pemerintah Daerah dapat dilihat dari indikator sebagai berikut :

Tabel III. 12
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Jaminan Keamanan oleh Pemerintah Daerah

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	% th lalu
1	Jumlah Perda yang disusun	7	12	171%	100 %
2	Jumlah Perbub yang disusun	25	45	180%	176 %
3	Jumlah Keputusan Bupati yang disusun	725	1377	190%	299%
4	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja dibanding jumlah penduduk	1 per 10.000 pddk	1 per 10.000 pddk	100%	100 %
5	Jumlah Anggota Linmas terlatih	324 org	324 0rg	100%	105,33 %
6	Tingkat penyelesaian pelanggaran trantibum di Kab. Rembang	100%	100 %	100%	99,85 %
	Capaian Kinerja Sasaran Rata-rata			148,2	146,70

Untuk melihat hasil capaian sasaran Jaminan Keamanan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang, dapat dilihat dari 6 (enam indikator) dengan hasil pencapaian 148,2 % (sangat berhasil). Capaian terbesar adalah Indikator Jumlah Keputusan Bupati yang disusun dari target 725 keputusan telah berhasil disusun 1377 keputusan sehingga capaiannya adalah 190% . Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran rata-rata tahun lalu, tahun 2014 ini mengalami peningkatan, dari capaian rata-rata sebesar 146,70% menjadi 148,2%. Hal tersebut mengambarkan bahwa dengan adanya Peraturan/ Perundangan yang telah ditetapkan sebagai Dasar Hukum pelaksanaan Pemerintahan diharapkan dapat memberikan jaminan hukum bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi pemerintah kabupaten.

Sasaran 11. Mudahnya akses petani terhadap sarana produksi pertanian dan alat mesin pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan.

Sasaran ini dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan masih rendahnya penerapan teknologi pertanian mulai dari teknik budidaya sampai teknik pengolahan hasil, yang berdampak pada belum optimalnya kualitas dan kuantitas komoditas pertanian, perkebunan,peternakan maupun perikanan.

Untuk mengetahui tingkat capaian sasaran tersebut ditempuh melalui beberapa indikator sasaran antara lain peningkatan ketersediaan alat mesin pertanian serta peningkatan produksi pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan. Selengkapnya pencapaian indikator kinerja sasaran ini tersajikan pada tabel berikut :

Tabel III .13

Capaian Indikator Kinerja mudahnya akses petani terhadap sarana produksipertanian dan alat mesin pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Peningkatan ketersediaan alat mesin pertanian	%	5	8,13	162,60
2.	Produksi tanaman pangan				
	g. Padi	ton	247.213	183.002	74,03
	h. Jagung	ton	129.775	128.388	98,93
	i. Kedelai	ton	5.703	5.570	97,67
3.	Produksi hortikultura				
	e. Cabe	ton	987	1.283	130,05
	f. Mangga	ton	8.489	21.601	254,45
4	Produksi tanaman perkebunan				
	g. Tebu (cane)	ton	43.403	40.896	94,22
	h. Kelapa (kopra)	ton	4.092	4.021	98,26
	i. Tembakau	ton	2.412	4.115	170,58
5.	Produksi Peternakan				
	a. Daging Sapi	kg	1.276.034	1.230.390	96,42
	b. Daging Kambing	kg	142.364	136.650	95,99
	c. Daging Ayam Ras	kg	382.500	467.654	122,26
	d. Daging Ayam Buras	kg	776.108	572.490	73,76
	e. Telur Ayam Buras	kg	636.978	618.780	97,14
	f. Telur Ayam Ras	kg	32.735	48.290	147,52
	g. Telur Itik	kg	719.632	914.781	127,12
6.	Produksi Perikanan				
	g. Jumlah Produksi Budidaya Air Payau	ton	1.294,72	2.518,10	194,49
	h. Jumlah Produksi Budidaya Air Tawar	ton	590,70	1.499,40	253,83
	i. Jumlah Hasil Produksi Perikanan Laut di TPI/PPI	ton	63.106,54	60.772,65	69,00
				Capaian Kinerja Sasaran	119,50

Dari indikator kinerja tersebut menunjukkan bahwa tingkat capaian indikator sasaran mudahnya akses petani terhadap sarana produksi pertanian dan alat mesin pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan dapat dikategorikan tercapai, dengan capaian rata-rata **119,50**%. Pencapaian target ini karena

telah didukung oleh pencapaian beberapa program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan serta Dinas Kelautan dan Perikanan.

Gambar 6
Penyerahan Bantuan Handtraktor Oleh Bapak Plt. Bupati Rembang. Kepada Kelompok Tani di Kabupaten Rembang

Data pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Rembang telah terjadi peningkatan yang cukup signifikan atas ketersediaan beberapa alat mesin pertanian jika dibandingkan pada tahun 2013, diantaranya ketersediaan handtraktor dari 1.025 unit menjadi 1.226 unit, Unit penggilingan padi dari 206 menjadi 278 unit dan pompa air dari 3.084 unit menjadi 3.441 unit. Hal ini dikarenakan selain adanya kesadaran dan kemampuan swadaya masyarakat yang mulai meningkatjuga adanya dukungan kegiatan penyediaan peralatan dan mesin pra panen, pasca panen dan pengolah hasil pertanian melalui anggaran APBD Kabupaten maupun bantuan hibah dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Rembang melalui Dinas Pertanian dan Kehutanan juga telah memberikan bantuan 132 unit handtraktor dan 33 unit pompa air kepada kelompok tani guna peningkatan produksi pertanian tanaman pangan.

Sementara pencapaian target peningkatan produksi pertanian masuk dalam kategori akan tercapai, namun untuk pencapaian produksi padi perlu upaya keras lagi mengingat produksinya juga menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Beberapa dukungan kegiatan pencapaian sasaran ini yang telah laksanakan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Rembang, diantaranya perluasan jaringan irigasi mencapai 1.850 hektar yaitu berupa pembangunan JITUT seluas 1.600 Ha, embung sebanyak 16 unit dan irigasi tanah dangkal sebanyak 27 unit, Dam Parit 10 Unit. Selain itu juga adanya upaya peningkatan produktivitas melalui kegiatan SLPTT (Sekolah Lapang Pengelolaan Pertanian Terpadu) padi seluas 9.000 hektar, jagung 1.000 hektar dan kedelai seluas 1.000 hektar.

Selain hal tersebut diatas, meskipun kondisi iklim sedikit lebih menguntungkan untuk kegiatan pertanian jika dibandingkan tahun 2013, yaitu data curah hujan rata-rata tercatat dari 2.764 mm namun turunnya hujan diluar prediksi kalender tanam petani sehingga berdampak pada turunnya produktifitas padi. Pada tahun tidak sampai terjadi puso namun masih ditemukan serangan hama penyakit ringan seluas 2.520 Ha dan angka tertinggi adalah tanaman rusak akibat Hama Putih Palsu 670 Ha disusul kresek 560 Ha dan hama penggerek batang seluas 515Ha. Meski produksi padi turun namun kondisi ketersediaan beras di Kabupaten Rembang masih Surplus hingga 29.063ton dari kebutuhan konsumsi penduduk 51.322ton dengan ketersediaan 80.386 ton dan tingkat konsumsi 100,19 kg/Kap/Th.

Di sektor perkebunan, produktivitas tebu mengalami penurunan walaupun luas tanamnya mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya (dari 8641 Ha menjadi 9.016 Ha) dikarenakan kondisi iklim yang kurang mendukung. Dukungan Program pemerintah untuk pengembangan tebu adalah Bongkar Ratoon, ekstensifikasi lahan maupun penyediaan bibit unggul dari KBD tebu yang luasannya mencapai 1.895 Ha. Kendala dilapangan menunjukkan bahwa luas serangan hama terjadi peningkatan di tahun 2014 ini khususnya serangan hama penggerek pucuk/ batang. Luas serangannya sebesar 277 Ha dari tahun sebelumnya yang hanya 32 Ha, sementara upaya pengendalian sudah dilaksanakan namun baru bisa tercover 250 Ha, karena kurangnya alokasi anggaran pengendalian dibandingkan perluasan areal. Pada komoditas Kelapa masih tingginya serangan hama menyebabkan penurunan jumlah populasi tanaman, selain usia tanaman juga mempengaruhi produktivitas tanaman. Luas serangan hama tanaman kelapa tahun mengalami penurunan sebesar 20 % dan sebagian besar adalah penurunan status serangan dari berat menjadi ringan. Upaya peremajaan telah dilaksanakan setiap tahun dan pada tahun 2014 peremajaan kelapa seluas 47,5 ha. Sedangkan peningkatan produksi tembakau karena penambahan areal tanam yang pada 2013 sekitar 1971 Ha meningkat menjadi 3429 Ha pada tahun 2014..

Demikian juga pada sektor peternakan juga telah memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan, berkat adanya keberhasilan kegiatan inseminasi buatan yang dilakukan oleh petugas inseminator dan dukungan program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan melalui kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak, Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat dan pengembangan pakan ternak. Sementara dengan adanya kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak yang mampu menekan angka kasus kematian ternak hingga 16,9 % dibandingkan tahun 2013.

Guna mencapai peningkatan produksi perikanan di tahun 2014, Dinas Kelautan dan Perikanan telah melaksanakan kegiatan berupa batuan sarana dan prasarana untuk perikanan tangkap berupa bantuan alat tangkap dan modernisasi kapal penangkap ikan. Namun demikian ternyata untuk jumlah hasil produksi perikanan laut hanya tercapai 96,32% dari target. Ada beberapa kemungkinan yang menjadi factor penyebabnya, di antaranya adanya fluktuasi kenaikan harga BBM yang cukup signifikan beberapa waktu lalu. Hal ini menyebabkan selama beberapa waktu para nelayan tidak melakukan aktivitasnya untuk menangkap ikan di laut. Hal ini tentu mempengaruhi produksi perikanan laut yang dihasilkan.

Sedangkan kegiatan yang terkait dengan perikanan budidaya, justru melebih target yang telah disepakati. Hal ini dikarenakan adanya program pemberdayaan usaha mina pedesaan yang memicu berkembangnya kelompok-kelompok pembudidaya ikan, di samping dengan adanya bantuan sarana prasarana perikanan budidaya kepada kelompok pembudidaya ikan tersebut, sehingga mampu meningkatkan produksinya hingga melebihi target yang telah ditetapkan.

Sasaran 12. Meningkatnya kemampuan petani dalam pengelolaan usaha.

Sasaran meningkatnya kemampuan petani dalam pengelolaan usaha dimaksudkan untuk menjawab permasalahan masih lemahnya jaringan pemasaran produksi pertanian, peternakan, dan perkebunan, yang ditandai dengan masih lemahnya daya tawar produk.

Untuk mengetahui tingkat capaian sasaran ini dapat dilihat berdasarkan beberapa indikator antara lain; peningkatan pelaku usaha sektor tanaman pangan hortikultura, peningkatan pelaku usaha sektor perkebunan, peningkatan pelaku usaha sektor peternakan dan peningkatan kelompok usaha sektor kehutanan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel III.14
Capaian Indikator Kinerja meningkatnya kemampuan petani dalam pengelolaan usaha

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Peningkatan pelaku usaha sektor tanaman pangan dan hortikultura	%	5	4,39	87,80
2.	Peningkatan pelaku usaha sektor perkebunan	%	5	4,80	96,00
3.	Peningkatan Pelaku usaha sektor peternakan	%	5	8,51	170,20
4.	Peningkatan kelompok usaha sektor Kehutanan	%	5	3,11	62,20
				Capaian Kinerja Sasaran Rata-rata	104,05

Dari 4 indikator tersebut nampak bahwa baru peningkatan pelaku usaha di sektor peternakan yang tercapai target sasarannya diatas 100% kecuali disektor perkebunan, namun secara rata-rata sudah berhasil yaitu 104,05%.

Beberapa Program yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan dalammendukung pencapaian sasaran ini adalah Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian, perkebunan dan peternakan dengan kegiatan diantaranya promosi atas hasil produksi unggulan daerah melalui event pameran dan promosi agro soropadan expo, selain itu juga pembangunan jalan usaha tani, jalan produksi pertanian dan jalan perkebunan yang totalnya mencapai 60 Km dari dana DAK, DBHCHT maupun Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah dalam rangka memberikan kemudahan angkutan saprodi maupun hasil panen bagi usaha sektor pertanian, perkebunan dan peternakan.

Keberhasilan sasaran ini juga karena adanya peningkatan jiwa kewirausahaan masyarakat dengan melihat peluang dan potensi usaha pada sektor pertanian dan kehutanan terlebih pada sektor peternakan terjadi peningkatan yang cukup tinggi. Hal ini

ditunjukkan dengan adanya peningkatan pelaku usaha baik tingkat kelompok, perorangan maupun badan usaha, tercatat peningkatan pelaku usaha sektor tanaman pangan dan hortikultura dari 387 unit menjadi 461 unit, sektor peternakan dari 270 unit menjadi 293 unit, sektor perkebunan dari 208 unit menjadi 218 unit dan sektor kehutanan dari 321 unit menjadi 331 unit. Sementara yang melakukan ijin usaha pada kantor KPPT (Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu) pada tahun 2013 tercatat sejumlah 152 pelaku usaha yang melakukan ijin usaha baru dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 159 usaha baru di sektor pertanian dan kehutanan.

Selain itu juga adanya dukungan program agribisnis melalui kegiatan pengembangan agribisnis peternakan dan pengembangan agribisnis perkebunan serta program pengembangan pertanian unggulan melalui kegiatan pengembangan sentra produksi komoditas tanaman pangan dan hortikultura juga sangat membantu pengembangan kawasan unggulan.

Dari indikator capaian tersebut peningkatan pelaku usaha sektor kehutanan yang paling rendah (62,20 %). Hal ini dimungkinkan karena pada sektor kehutanan adanya penurunan permintaan akan pasar luar negeri, juga persediaan bahan baku kayu rakyat yang mulai berkurang. Dari data potensi hutan rakyat yang ada, luas hutan rakyat yang mencapai 12.000 hektar hampir 70 % nya adalah kelas umur dibawah 10 tahun. Sehingga untuk meningkatkan usaha di sektor kehutanan perlu adanya terobosan peluang pasar, dan peningkatan kualitas produksi hasil hutan dan Supervisi para pelaku usaha kehutanan khususnya industri penggergajian IUIPHHK.

Sasaran 13. Tersedianya akses permodalan untuk pengembangan usaha

Sasaran tersedianya akses permodalan untuk pengembangan usaha dimaksudkan untuk menjawab isu strategis rendahnya investasi dan jalinan kemitraan di daerah.

Untuk mengetahui tingkat capaian sasaran ini dapat dilihat berdasarkan beberapa indikator antara lain; peningkatan stimulan untuk kelompok tani tanaman pangan dan hortikultura, kelompok tani perkebunan, kelompok tani peternakan dan kelompok tani kehutanan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel III.15

Capaian Indikator Kinerja tersedianya akses permodalan untuk pengembangan usaha

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)

1.	Peningkatan stimulan untuk kelompok tani Pangan dan Hortikultura	%	5	4,89	97,80
2.	Peningkatan stimulan untuk kelompok tani peternakan	%	5	7,67	153,40
3.	Peningkatan stimulan untuk kelompok tani perkebunan	%	5	4,63	92,60
4.	Peningkatan stimulan untuk kelompok tani Kehutanan	%	5	3,35	67,00
Capaian Kinerja Sasaran Rata-rata					102,70

Dari 4 indikator tersebut nampak bahwa capaian kinerja sasaran tersedianya akses permodalan untuk pengembangan usaha adalah 102,70%, dengan pencapaian indikator peningkatan stimulan untuk kelompok tani hutan yang paling rendah namun masih dalam kategori cukup berhasil, yaitu sebesar 67,00%.

Pada sektor tanaman pangan dan hortikultura, pencapaian sasaran ini didukung oleh peningkatan stimulan bantuan subsidi benih dari Kementerian Pertanian dalam kegiatan SLPTT (Sekolah Lapang Pengelolaan Pertanian Terpadu), pada tahun 2014 stimulan yang diberikan berupa bantuan subsidi benih padi non untuk lahan seluas 8.000 hektar, subsidi benih padi hibrida untuk lahan seluas 1.000 hektar, subsidi benih jagung hibrida untuk lahan seluas 1000 hektar dan subsidi benih kedelai untuk lahan seluas 1.000 hektar.

Pada sektor perkebunan, pencapaian sasaran ini didukung oleh peningkatan stimulan bantuan peralatan dan demplot tanaman tembakau 1 ha pada kegiatan agribisnis perkebunan, bantuan pupuk dan bibit tebu untuk KBD seluas 5 Ha pada kegiatan pengembangan bibit unggul perkebunan, serta rawat ratoon 1.890 Ha, pengembangan tanaman perkebunan komoditas kelapa seluas 47,5 Ha, dan kegiatan optimasi lahan berupa kegiatan pengembangan tanaman kopi seluas 200 ha.

Pencapaian sasaran sektor peternakan, didukung oleh peningkatan stimulan bantuan ternak pada kelompok ternak yaitu dari sumber dana APBD Kabupaten Rembang yaitu : kegiatan Pengembangan agribisnis peternakan berupa bantuan 100 ekor kambing PE; kegiatan pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat berupa bantuan 90 ekor domba; kegiatan pemberdayaan kelompok peternakan berupa bantuan 14 ekor sapi potong; serta bantuan hibah keuangan yang anggarannya mencapai Rp. 2.559.000.000,- untuk 77 kelompok usaha peternakan. Sementara dari dana APBN ada bantuan stimulan untuk UPP Ruminansia Rp. 271.000.000,- Integrasi ternak ruminania Rp. 248.000.000,- dan Pengembangan unit pengolahan pupuk organik Rp. 1.000.000.000,- .

Sedangkan tidak tercapainya target kinerja stimulan untuk kelompok tani hutan dikarenakan fasilatiasi kegiatan pembuatan kebun bibit rakyat dari pemerintah pusat mulai dikurangi seiring dengan berkurangnya lahan kritis di Kabupaten Rembang, yaitu dari 15 kelompok penerima kegiatan berkurang menjadi 5 kelompok pada tahun 2014. Sementara fasilitasi pengembangan perhutanan masyarakat pedesaan berbasis konservasi juga berkurang dari 450.000.000,- menjadi 150.000.000 untuk 3 kelompok tani hutan. Namun demikian beberapa kegiatan lainnya mulai dikenalkan kepada kelompok tani hutan yaitu pengembangan hasil hutan bukan kayu diantaranya penanaman empon-empon dibawah tegakan hutan rakyat dan pengembangan porang dikawasan hutan.

Selain itu akses permodalan dari perbankan juga menunjukkan peningkatan yang cukup baik dalam rangka penyediaan kredit untuk pelaku usaha di sektor pertanian, yaitu melalui Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE). Dari data yang ada di Dinas Pertanian dan Kehutanan tercatat bahwa Bank Rakyat Indonesia (BRI) telah mengucurkan kredit untuk kegiatan kelompok tani dan kelompok peternak sebesar Rp. 9.937.000.000,- untuk 83 kelompok dan ini merupakan peningkatan yang cukup signifikan sebesar 17,91% karena jika dibandingkan tahun 2013 hanya sebesar Rp. 8.427.000.000,- untuk 64 kelompok.

Sasaran 14. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar pertanian.

Pemerintah Kabupaten Rembangmenetapkan salah satu sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar pertanian untuk menjawab permasalahan isue strategis mengenai kualitas dan kuantitas infrastruktur dan pelayanan publik yang belum memadai merupakan permasalahan harus diperhatikan. Pembangunan sarana dan prasarana pertanian perlu memperhatikan keberadaan jaringan irigasi yang mengaliri lahan-lahan pertanian. Pembangunan waduk, embung-embung pertanian, jaringan irigasi yang baru dan memperbaiki jaringan irigasi yang sudah rusak merupakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai sasaran tersebut.

Untuk mengetahui tingkat capaian sasaran ini dapat dilihat berdasarkan beberapa indikator antara lain; bertambahnya luas lahan pertanian dan perkebunan yang teraliri jaringan irigasi danterbangunnya embung atau waduk yang mampu menampung kelebihan air pada musim hujan guna memenuhi kebutuhan air baku. Adapun hasil pengukuran kinerja sasaran ini sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel III.16
Capaian Indikator Kinerja meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar pertanian

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Bertambahnya luas lahan pertanian dan perkebunan yang teraliri jaringan irigasi	%	0,2	0,095	47,19
2.	Pembangunan embung	unit	7	20	285,71
				Capaian Kinerja Sasaran Rata-rata	166,45%

Dari hasil capaian kinerja terhadap sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar pertanian cukup baik yaitu **166,45**%. Realisasi dari target indicator pembangunan embung melebihi target yang telah ditetapkan sebesar **285,71**%. Pembangunan embung pertanian melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 7 unit dengan realisasi **20** unit. indicator bertambahnya luas lahan pertanian dan perkebunan yang teraliri jaringan irigasi (ha) dari target 0,2% realisasi 0,09% dengan prosentase capaian 47,19%.

Bertambahnya luas lahan pertanian dan perkebunan yang teraliri oleh jaringan irigasi ini didukung dengan adanya program pengembangan jaringan irigasi pertanian/perkebunan melalui pembangunan Jaringan Irigasi JITUT dan JIDES tahun 2014 yang menambah luas area lahan yang teririgasi seluas 1.900 Ha (0,095%) dari luas lahan pertanian dan perkebunan yang teraliri irigasi sebelumnya sebesar 11.347 ha.

Tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan infrastruktur dasar pertanian khususnya pengelolaan prasarana pengairan adalah bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan daerah aliran sungai; pemeliharaan jaringan irigasi pedesaan; pengembangan sumber-sumber air alternatif dan berskala kecil antara lain melalui pemanfaatan teknologi pengambilan air permukaan dan bawah tanah; pembangunan dan pemeliharaan embung dan bendungan serta pemanfaatan sumber air tanah dan air hujan.

Sasaran 15. Meningkatnya intensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah.

Capaian sasaran meningkatnya intensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel III 17

Capaian Indikator Kinerja Meningkatnya intensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah

No	Indikator sasaran	Satuan	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya intensifikasi sumber – sumber pendapatan asli daerah.	Rp	139.991.163.200,00	165.530.925.487,27	118,24%

Kemandirian suatu daerah biasanya diukur dari kemampuan daerah tersebut untuk mengelola dan menggali potensi keuangan diwilayahnya secara optimal. Artinya capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) diupayakan mampu mencapai target yang telah ditetapkan dari tiap tahunnya.

Intensifikasi berikut dengan *ekstensifikasi* Pendapatan Daerah merupakan bagian dari optimalisasi Pemerintah Daerah Kabupaten yang perlu dilakukan sebagai bentuk kemandirian daerah dalam mengoptimalkan potensi sumberdaya yang ada di dalamnya.

Intensifikasi adalah upaya meningkatkan pungutan atas suatu subyek dan obyek `pendapatan daerah yang potensial namun belum tergali dengan memperbaiki kinerja pemungutannya. Pendapatan daerah yang memiliki potensi yang cukup besar untuk mendongkrak penerimaan Pendapatan Asli Daerah terletak pada penerimaan pajak dan retribusi daerah.

Dasar umum pelaksanaan intensifikasi sumber- sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pertama, memperluas basis penerimaan (pemetaan wilayah subyek dan obyek pajak/retribusi). Kedua, memperkuat proses pemungutan. Ketiga, meningkatkan pengawasan. Keempat, meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan. Kelima, meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.

Meningkatkan perolehan pendapatan daerah atas pajak dan retribusi daerah perlu pengelolaan yang tepat, mengingat kurangnya kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi yang memiliki kecenderungan untuk menghindari kewajiban mereka untuk membayar pajak dan retribusi.

Pemetaan wilayah subyek dan obyek pajak/retribusi dilakukan lebih pada upaya untuk memperluas subyek dan obyek pajak dan retribusi dan

meminimalkan kecenderungan bagi wajib pajak/ retribusi yang menghindari atau belum memenuhi kewajiban mereka. Terutama terhadap wajib pajak orang pribadi, mengingat masih banyak subyek pajak yang penghasilannya melebihi *PTKP* (*Penghasilan Tidak Kena Pajak*)tetapi belum memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Dengan kata lain perlu identifikasi obyek – obyek yang dapat dipungut dan menambah pendapatan daerah, serta mengidentifikasi, memperbaiki data dan jumlah wajib pajak/ retribusi potensial.

Memperkuat proses pemungutan diantaranya dengan disusunnya peraturan daerah dan dilakukan perhitungan untuk penyesuaian tariff retribusi dan penetapan nilai pajak.

Dengan 5 (lima) dasar pelaksanaan intensifikasi secara umum di atas diharapkan pola intensifikasi pendapatan dapat berjalan secara sistematik, efisien dan memperoleh bentuk capaian yang diharapkan diantaranya melalui pendekatan persuasif dan edukatif kepada wajib pajak dan retribusi daerah.

Bentuk pendekatan persuasif dan edukatif pada wajib pajak/ retribusi lebih ditekankan pada proses pemungutan pajak dan retribusi terhutang tahun berjalan, serta tunggakan tahun yang lalu (piutang), atau langsung dengan surat tagihan (khusus untuk piutang yang memiliki kemungkinan bisa tertagih) dimaksudkan agar target penerimaan yang *direncanakan tercapai*.

Koordinasi secara struktural dinas terkait yang mempunyai tugas atau fungsi pemungutan dan kecamatan sampai dengan kelurahan di wilayah kerjanya, dalam rangka *pengawasan* pelaksanaan pemungutan pajak daerah di wilayah kerjanya dimaksud pula untuk mempermudah pola *efisiensi kinerja,* pada Kabupaten Rembang untuk efisiensi dan efektifitas pelayanan dibagi atas 3 (tiga) kelompok rayon mencakup 14 (empat belas) kecamatan, dan *efisiensiadministrasi database* dengan pemuktahiran data, identifikasi kelompok mana yang dapat dikategorikan sebagai wajib pajak/retribusi lancar, piutang bisa tertagih dan piutang tidak bisa tertagih.

Karena sebenarnyalah realitas keberhasilan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi juga dapat dinilai dari seberapa besar piutang pajak dan retribusi dan seberapa besar piutang tersebut dapat tertagih.

Berikut daftar pokok piutang pajak dan piutang retribusi sampai dengan 2014:

Tahun	Daftar Pokok Piutang Pajak s.d 2014	Piutang Pajak Bisa Tertagih	%	Piutang Pajak Bisa Tertagih 2013
2005	2.493.400,00	535.000,00	21,46%	2.493.400,00
2006	15.040.750,00	6.052.000,00	40,24%	15.040.750,00
2007	19.995.100,00	10.740.000,00	53,71%	19.995.100,00
2008	19.725.200,00	11.192.000,00	56,74%	19.725.200,00
2009	64.520.000,00	28.333.600,00	43,91%	66.520.000,00
2010	134.536.356,00	55.480.000,00	41,24%	134.536.356,00
2011	82.214.721,00	63.501.500,00	77,24%	83.094.721,00
2012	52.353.100,00	49.862.150,00	95,24%	52.903.100,00
2013	732.196.750,00	742.710.250,00	101,44%	2.796.977.050,00
2014	2.002.135.000,00	2.002.135.000,00	100,00%	-
Jumlah	**3.125.210.377,00**	**2.970.541.500,00**	**95,05%**	**3.191.285.677,00**

--)Daftar pokok piutang pajak tahun 2005 s.d 2014

Uraian	Daftar piutang Retribusi s.d 2014	Piutang Retribusi bisa tertagih	%	Piutang Retribusi bisa tertagih 2013
Ret. Sewa kios terminal	182.806.250,00	164.546.750,00	0,00%	29.806.750,00
Ret. Sewa kios pasar	208.831.250,00	208.831.250,00	100,00%	243.729.500,00
Ret. Rumdin & sewa Tanah	10.924.000,00	7.865.000,00	72,00%	8.563.000,00
Jumlah	402.561.500,00	216.696.250,00	53,83%	282.099.250,00

--)Daftar pokok piutang retribusi tahun 2005 s.d 2014

Selain itu adanya *sistem administrasi modern pajak* dengan didukung *SDM yang potensial dan berkualitas* diharapkan akan membawa perubahan yang cukup signifikan dari pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi. Karena bagaimanapun *perubahan mekanisme, mutu pelayanan,* membuat semua kegiatan pelayanan mulai dari Penyuluhan, Pembinaan, dan Pengawasan Wajib Pajak lebih terarah dan terukur. Berbagai fasilitas untuk kemudahan dan kenyamanan pelayanan kepada Wajib Pajak dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan perkembangan dan kemajuan Tekhnologi Informasi diantaranya *Call Centre, sarana pengaduan, dan kemudahan pembayaran* yang saat ini bisa dilakukan *secara online di seluruh Bank Jateng*.

Dan selain di 4 (empat) Kecamatan yaitu Kecamatan Pamotan, Kecamatan Lasem, Kecamatan Kragan dan Kecamatan Sulang yang dapat dilakukan pembayaran secara langsung di Bank Jateng,cabang pembantu bagi

wilayah lain yang belum terdapat cabang pembantu Bank Jateng secara berkala sejak tahun 2014 didatangi mobil kas keliling.

Dengan kemudahan tersebut diharapkan pula adanya efisiensi sekaligus meningkatkan kesadaran para wajib pajak dan retribusi dalam mematuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi, setidaknya sampai dengan tahun anggaran 2014 target peningkatan atas intensifikasi pendapatan asli daerah sebesar Rp.139.991.163.200,00 terpenuhi sebesar Rp.165.530.925.487,27 atau 118,24%

Berikut adalah realisasi penerimaan pendapatan daerah atas Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2014 :

Uraian	20014		%	2013
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	32.816.917.000,00	38.643.241.316,00	117,75	34.067.851.784,00
Pendapatan Retribusi Daerah	38.845.073.000,00	41.529.546.666,00	106,91	30.924.102.833,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.222.204.000,00	6.183.205.661,00	99,37	3.277.635.260,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	81.166.342.339,00	79.174.931.844,27	97,55	58.538.493.935,01
Jumlah	159.050.536.339,00	165.530.925.487,27	96,02	126.808.083.812,01

Pada realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di atas, untuk pendapatan pajak daerah terealisasi sebesar Rp. 38.643.241.316,00 dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 32.816.917.000,00 atau 117.75% meningkat sebesar Rp.4.575.389.532,00 dari realisasi tahun anggaran 2013 sebesar Rp. 34.067.851.784,00. Untuk pendapatan retribusi daerah realisasi sebesar Rp. 41.529.546.666,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 41.529.546.666,00 atau 106,91% meningkat sebesar Rp. 10.605.443.833,00 dari realisasi tahun anggaran 2013 sebesar Rp. 30.924.102.833,00.

Bila di perbandingkan jumlah penerimaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah selama 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tahun	Anggaran	Realisasi		Peningkatan Realisasi	
		Rp.	%	Rp.	%
2010	38.655.047.551,00	32.530.703.071,00	84,16%	0,00	0,00%
2011	39.283.899.000,00	35.619.690.780,00	90,67%	3.088.987.709,00	9,50%
2012	40.200.026.700,00	47.981.514.164,00	119,36%	12.361.823.384,00	34,71%
2013	56.224.072.000,00	64.991.954.617,00	115,59%	17.010.440.453,00	35,45%
2014	71.661.990.000,00	*80.172.787.982,00	111,88%	15.180.833.365,00	23,36%

Tabel Target Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

**) data realisasi TA unaudited (sumber data LKPD TA 2014 unaudited)*

Terdapat peningkatan yang cukup sistematik dan signifikan dari tahun anggaran 2010 sampai dengan pencapaian target di tahun anggaran 2014 sebesar 23,36% atau sebesar Rp.15.180.833.365,00 dari realisasi di tahun anggaran 2014 sebesar Rp.80.172.787.982,00 yang terdiri atas pendapatan pajak sebesar Rp.38.643.241.316,00 dan pendapatan retribusi sebesar Rp. 41.529.546.666,00 terhadap total realisasi pendapatan pajak dan retribusi di tahun anggaran 2013 sebesar Rp. 64.991.954.617,00

Grafik Progres Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 5 tahunan

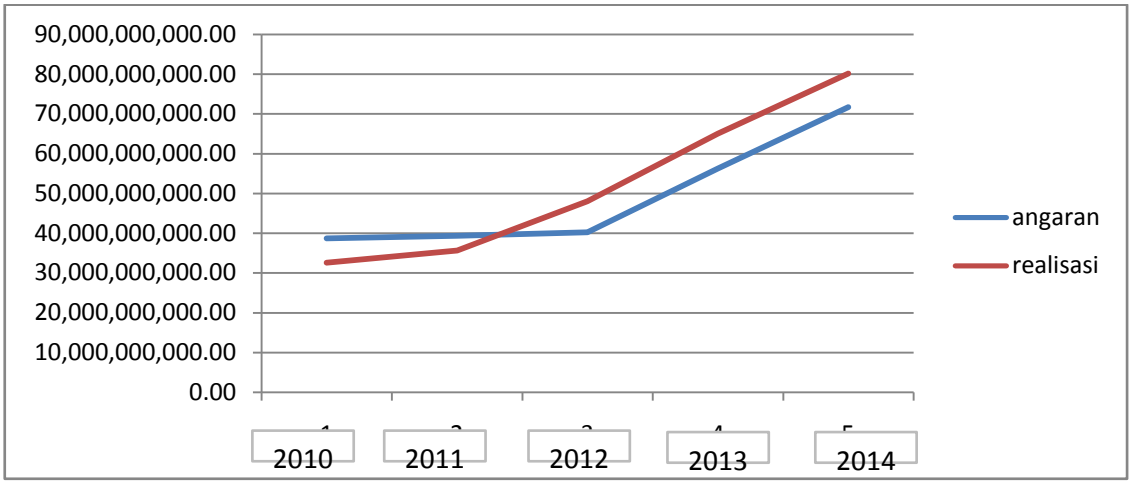

Progres intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak dan retribusi terlihat pada rentang waktu antara tahun anggaran 2011 dan tahun anggaran 2012 yang selanjutnya mulai tahun anggaran 2012 tersebut antara target penerimaan daerah dan realisasinya berjalan meningkat secara stabil dari tahun ke tahun yang mengindikasikan bahwa pencapaian dan optimalisasi baik secara intensifikasi atau ekstensifikasi menunjukan trend positif.

Secara makro gambaran umum peningkatan intensifikasi Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat dari peningkatan realisasi PAD dari tahun 2010 sampai dengan 2014.

Tahun	Anggaran	Realisasi		Peningkatan Realisasi	
		Rp.	%	Rp.	%
2010	78.227.428.000,00	65.699.258.994,62	83,98%	0,00	0,00%
2011	83.354.852.000,00	73.931.945.930,62	88,70%	8.232.686.936,00	12,53%
2012	95.041.791.800,00	103.304.514.980,00	108,69%	29.372.569.049,38	39,73%

2013	127.132.548.700,00	126.808.083.812,01	99,74%	23.503.568.832,01	22,75%
2014	159.050.536.339,00	165.530.925.487,27	104,07%	38.722.841.675,26	30,54%

Grafik peningkatan PAD selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

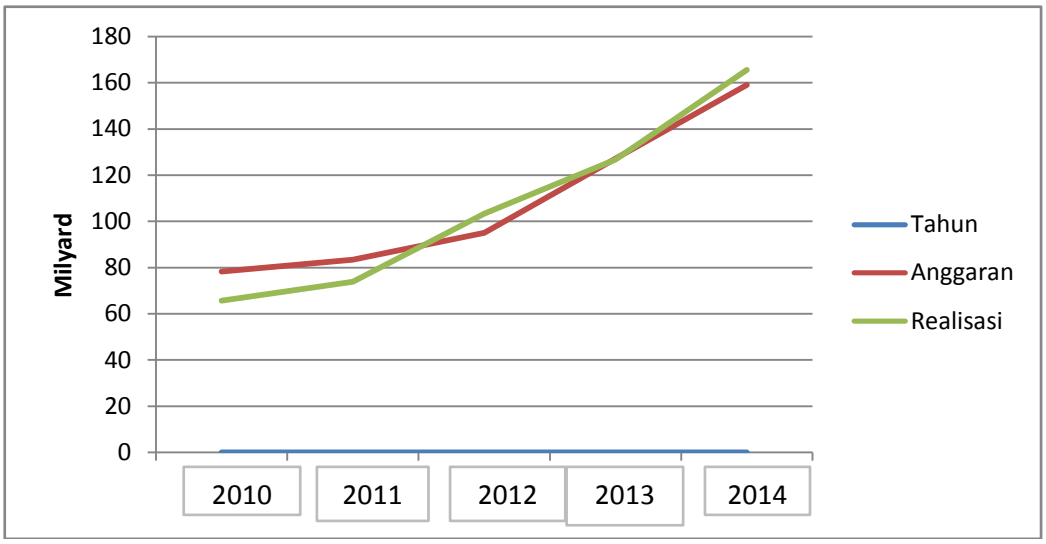

Sasaran 16. Meningkatnya efisiensi dalam penarikan pendapatan asli daerah

Capaian Sasaran Meningkatnya Efesiensi dalam Penarikan Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel III.18
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Efesiensi dalam Penarikan Pendapatan Asli Daerah

No	Indikator sasaran	Satuan	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya efisiensi dalam penarikan pendapatan asli daerah.	%	40,00%	87,29%	218,23%

Realitas dari efisensi Pendapatan Asli Daerah adalah adalah dengan meningkatnya capaian penerimaan daerah dari pajak daerah dan retribusi daerah sampai dengan tahun anggaran 2014 yang diukur dari berkurangnya jumlah piutang pajak/retribusi.

Dari capaian tersebut di atas maka optimalisasi efisiensi pendapatan asli daerah lebih diarahkan pada dilaksanakannya *ekstensifikasi* pengelolaan pendapatan daerah pada wajib pajak/retribusi kategori lancar

atas kewajiban pembayaran pajak/retribusi juga termasuk atas kelompok yang dikategorikan piutang pajak/retribusi yang bisa tertagih.

Bentuk dari efisiensi PendapatanAsli Daerah adalah optimalisasi sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja, maupun sumber daya fisik seperti peralatan kerja, tempat bekerja serta dana keuangan. Disamping adanya faktor dukungan dari atau kepada aparatur dan pelaksananya baik pimpinan maupun masyarakat dalam hal ini kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi.

Tujuan dari optimalisasi ini juga untuk memperluas cakupan subyek pajak/retribusi dan objek pajak/retribusi baik secara kuantitatif maupun kualitatif antara lain dengan cara pendataan baru wajib pajak/retribusi guna meningkatkan serta menggali potensi Wajib Pajak yang ada di wilayah.

Karena baik secara makro atau mikro ekstensifikasi pajak sebagai bentuk efisiensi adalah bagian dari mencermati perkembangan potensi ekonomi di daerah atas subyek atau obyek yang belum dikenai pajak/retribusi. Tentunya sebagai lanjutan atas intensifikasi penerimaan daerah.

Meningkatnya jumlah penerimaan dari kelompok pajak daerah dan retribusi daerah merupakan kontribusi yang cukup efektif guna mengoptimalkan pencapaian target Penerimaan Asli Daerah (PAD) yang didukung kemampuan dan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak/retribusi.

Adapun ektensifikasi pajak/retribusi selain melihat potensi daerah yang ada juga diimbangi dengan sosialisasi jenis – jenis pungutan pajak, sosialisasi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Petunjuk teknis pemungutan pajak dan retribusi daerah sebagai instrument yang wajib diikuti oleh setiap wajib pajak/retribusi daerah.

B A B IV
P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Pada Tahun 2014 merupakan tahun ke-5 pada pencapaian (46)Sasaran Strategis sebagaimana telah ditetapkan dan yangtercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2010tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten RembangTahun 2010-2015.Sesuai hasil evaluasi dari pelaksanaan program dan kegiatan dalamrangka pencapaian Sasaran Strategis untuk mencapai Visi **Terwujudnya Rembang yang Maju, Mandiri, Dinamis dan Sejahtera.**

Berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi dan analisis kinerja yangdilakukan menunjukan bahwa pencapaian terhadap sasaran strategissecara garis besar bermakna baik dalam menunjang tercapainya Visi danMisi Pemerintah Kabupaten Rembang. Namun disadari masih terdapat beberapakelemahan dalam menjalankan amanat sebagaimana yang telahdipercayakan oleh masyarakat dengan mengingat tingkat ekspektasimasyarakat yang kian hari terus bertambah.Oleh karena itu penyediaanPelayanan Publik yang prima, cepat, tepat dan tuntas bagi masyarakatKabupaten Rembang masih terus dibenahi dan ditingkatkan yang kesemuannyademi kemaslahatan dan kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hasil pengukuran kinerja sasaran didapatkan hasil rata-rata capaian kinerja sebesar 108,62 %. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian kinerja sasaran telah sangat berhasil. Walaupun demikian masih ada beberapa indikator kinerja yang masih memerlukan upaya yang serius untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam

pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen aparatur pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan civil society sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara. Dengan demikian diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk memperteguh pelaksanaan reformasi birokrasi sehingga tidak hanya menjadi wacana dan pergulatan pemikiran semata-mata, namun benar-benar dapat diaplikasikan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan bertujuan melayani serta memberdayakan masyarakat.

Capaian kinerja berbagai indikator pada masing-masing tujuan pembangunan jangka menengah tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Hal ini disebabkan beberapa faktor:

a. Dalam penyusunan Renja tahunan, SKPD belum mengacu pada indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
b. Kemungkinan terjadi perbedaan rencana yang tercantum dalam RPJMD dengan renstra SKPD, sehingga SKPD lebih mengacu pada Renstra SKPD daripada yang tercantum dalam RPJMD.
c. Kemampuan keuangan/penganggaran Kabupaten Rembang belum bisa mencukupi semua kebutuhan anggaran yang dibutuhkan untuk pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

B. REKOMENDASI

Rekomendasi dari hasil penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Apabila masih memungkinkan maka SKPD perlu meningkatkan capaian target RPJMD, khususnya pada indikator yang mempunyai capaian kurang dari 100 %
2. Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun berikutnya, sangat bergantung dari kualitas RPJMD periode berikutnya, Bappeda bersama seluruh SKPD perlu merumuskan

indikator kinerja daerah yang bersifat outcome pada skala program, sedangkan indikator kinerja SKPD yang bersifat output dijabarkan dalam Renstra SKPD.

3. Dalam penyusunan RPJMD periode berikutnya, perlu dilakukan penyelarasan Renstra SKPD dengan RPJMD agar program dan kegiatan yang dilaksanakan SKPD sesuai dengan program RPJMD dan mengarah pada pencapaian visi dan misi jangka menengah daerah.
4. Dalam rangka pengukuran dan penilaian kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang perlu didukung dengan elektronik Performance (e-Performance) yaitu aplikasi sistem akuntabilitas kinerja yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang. Aplikasi ini menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja, danmonitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan. Aplikasi ini dapat disinergikan dengan aplikasi e-planning yang dikembangkan Bappeda dan e-budgeting.

Rembang, Maret 2015

Plt. BUPATI REMBANG
WAKIL BUPATI

H. ABDUL HAFIDZ